

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO



UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu hak cipta atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

TIM PENYUSUN

PEMBINA

Syakbani Eko Raharjo
Arief Wicaksono
Bambang Muryanto
Isyadi
Murwedhy Tanomo

PENANGGUNG JAWAB

Boedi Sulistyو, SE, MM

PENYUSUN

Agung Siswanto, SE, M.Si
Anton Praptono, SH
Novi Andari, SE, MM
Susi Wahyu Setyowati, SE, MM
Andhy Yuniyanto, SH, MM
Ferdana Femiliona, SE, MA
Satrio Febrianto Pamungkas, SH
Tomi Yulianti, A.Md
Septian Andi Faizal, SE
Aziz Al Rosyid, SH
Rahma Maulana, S.Si

EDITOR

Masykurudin Hafidz

Hak cipta dilindungi undang - undang.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis penerbit.

All right reserved

Sekapur Sirih Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 berlangsung lancar, aman, tertib dan kondusif. Dalam pelaksanaan Pilkada, terdapat aspek strategis berupa mekanisme kandidasi peserta pemilihan dalam tahapan pencalonan. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, peserta pada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah terdiri dari Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang dan/atau Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta Pemilu.

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo mencatat sejarah. Dalam tahap pencalonan, calon jalur independen untuk pertama kali mencoba ikut dalam kontelasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sukoharjo, walaupun pada akhirnya harus tersingkir dari tahap pencalonan karena hasil verifikasi faktual kedua, syarat dukungan yang dinyatakan Memenuhi Syarat belum memenuhi batas minimal syarat dukungan yang ditentukan, yaitu 7,5% dari jumlah DPT pada pemilu terakhir. Sejarah lainnya pada Pilkada serentak Tahun 2024 di Kabupaten Sukoharjo hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, sehingga dalam surat suara, kolom pasangan calon bersanding dengan kolom kosong.

Melalui buku ini, gambaran dinamika tahapan pencalonan dituangkan dalam sebuah buku berjudul "*Partisipasi Pilkada Sukoharjo*" sebagai bagian

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

dari penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Buku ini diharapkan memperkaya khasanah literasi kepemiluan serta dapat memberikan kontribusi berupa bahan evaluasi dan pembelajaran pelaksanaan tahapan pencalonan dalam tata kelola penyelenggaraan Pilkada dimasa yang akan datang.

Akhir kata, KPU Republik Indonesia mengapresiasi penyusunan buku ini sebagai wujud KPU Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kelembagaan, melayani pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dan melayani peserta pemilihan dengan adil dan setara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

Jakarta, 25 Maret 2025
Ketua Komisi Pemilihan Umum



M. Afifuddin

SAMBUTAN KPU JAWA TENGAH



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah dapat berlangsung lancar, aman, tertib dan kondusif. Kesuksesan ini mencatatkan Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang seluruh kepala daerahnya dapat dilantik serentak pada gelombang pertama tanggal 20 Februari 2025.

Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah terdapat tiga komponen penting, yaitu peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan dan pemilih yang diberikan pelayanan seluas-luasnya untuk mengekspresikan pilihannya. Bahwa terdapat fakta dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik, meskipun pada tahapan awal pencalonan, terdapat bakal pasangan calon berproses melalui mekanisme pencalonan perseorangan, meskipun akhirnya tidak memenuhi syarat hingga tidak dapat melanjutkan tahap pendaftaran Calon. Sedangkan komponen pemilih, Kabupaten Sukoharjo memiliki daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 684.491 yang terdiri dari pemilih laki-laki yang tersebar di 12 kecamatan pada 150 desa dan 17 kelurahan dengan jumlah TPS 1.305.

Bahwa kehadiran pemilih dalam sebuah pemilu (voter turnout) merupakan persepsi terbatas atas partisipasi politik yang paling populer, padahal sesungguhnya makna partisipasi politik dengan dimensi yang lebih meluas mencakup keterlibatan warga negara dalam rangkaian proses perumusan agenda kebijakan, proses pengambilan kebijakan, pengisian jabatan kenegaraan, pelaksanaan kebijakan, kontrol terhadap kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dengan fakta tersebut, penyelenggara pemilihan

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

pada KPU Kabupaten Sukoharjo, PPK di kecamatan, PPS di desa/ kelurahan, KPPS dan Petugas ketertiban di TPS dan Pantarlih serta stakeholder terkait, dituntut memiliki variasi strategi dalam meningkatkan partisipasi pemilih untuk menggunakan hak pilih serta keterlibatan pemilih dengan memupuk kesadaran pemilih sebagai ikhtiar menentukan masa depan daerah melalui kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024.

KPU Provinsi Jawa Tengah mengapresiasi penyusunan buku riset/ penelitian dengan tema Tingkat Partisipasi Pemilih sebagai bagian dari penyusunan laporan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2024. Buku ini diharapkan dapat menjadi literasi kepemiluan dan memberi kontribusi sebagai bahan evaluasi strategi sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, materi sosialisasi dan pendidikan pemilih, metode yang digunakan, aktor penyampai pesan kepemiluan, kelompok strategis sasaran sebagai bagian masukan positif dalam tata kelola penyelenggaraan Pilkada dimasa yang akan datang.

Semoga buku ini dapat menginspirasi dan memberikan manfaat.

Semarang, 8 Maret 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah



Handi Tri Ujiono

SAMBUTAN KETUA KPU SUKOHARJO



Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Semoga apa yang kita kerjakan dan disertai doa akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kepentingan dan kemaslahatan umat.

Selanjutnya saya menyambut baik tentang penyusunan buku ini yang nantinya akan menjadi harapan kebaikan demokrasi pada masa mendatang. Disaat Indonesia yang tengah memiliki jalan panjang untuk menjadi negara yang berdemokrasi serta dalam tahap menemukan bentuk idealnya. Dalam prosesnya , setiap tahapan pemilihan tentu ada sebuah fase yang dinamakan dialog, debat, sosialisasi hingga dinamika dan bahkan kritik yang tidak boleh terhenti atau sengaja dihentikan. Karena Jika itu terhenti atau sengaja dihentikan, maka berhenti pula proses demokratisasi untuk mewujudkan indonesia menjadi bangsa dan negara yang demokratis.

Sebagai refleksi, proses pemilihan serentak di Kabupaten Sukoharjo telah berjalan lancar , aman sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pelaksanaannya juga telah sesuai dengan perencanaan yang disusun. Mulai dari proses penerimaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari kemendagri yang merupakan dasar penyusunan Daftar Pemilih Tetap, Pemetaan Jumlah TPS,, Pembentukan Badan Adhoc di tingkatan Kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), ditingkatan desa yang disebut Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di setiap TPS, tahapan pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai pada pelaksanaan pemilihan dan penetaapan calon bupati dan wakil bupati terpilih berjalan aman dan lancar.

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

Semua tahapan yang telah dilalui tentu tak lepas dari hubungan baik yang dibangun oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dengan stakeholder atau pihak pihak terkait di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Adalah hal yang wajib bagi kami KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menjaga demokrasi di Sukoharjo melalui fungsi fungsi sosialisasi diberbagai kalangan dan berbagai aspek lapisan masyarakat. Hal ini penting dan harus kami lakukan mengingat salah satu program dan target kami adalah meningkatkan partisipasi masyarakat, meningkatnya index demokrasi dan literasi politik. Melalui berbagai sarana dan jajaran badan adhoc kami miliki baik ditingkatan PPK ataupun PPS , sosialisasi terus kami lakukan agar supaya masyarakat tau ,mengerti dan paham akan agenda Pemilihan Serentak tahun 2024 yaitu dengan memilih Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Bupati – Wakil Bupati Sukoharjo serta tak lupa kami juga mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024.

Akhir kata, atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo mengucapkan terima kasih setinggi tingginya kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu serta bergotong royong mewujudkan pemilihan serentak di kabupaten sukoharjo berjalan aman, tertib dan lancar. Saran dan masukan yang selama ini diberikan kepada kami merupakan bentuk kepedulian kita bersama dalam upaya mewujudkan sukoharjo yang santun ,berwawasan politik serta demokratis.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sukoharjo



Syakbani Eko Raharjo

PENGANTAR

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan elemen fundamental dalam sistem demokrasi di Indonesia di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk secara langsung menentukan pemimpin daerah mereka. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada tidak hanya mencerminkan kesadaran politik warga tetapi juga menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan yang terpilih yang mana semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilihan semakin kuat pula legitimasi pemerintahan daerah yang terbentuk sebaliknya jika rendahnya partisipasi pemilih sering kali menjadi sinyal adanya persoalan dalam sistem demokrasi baik itu ketidakpercayaan terhadap proses pemilu atau kurangnya akses informasi yang memadai bagi publik.

Di Kabupaten Sukoharjo dinamika Pilkada menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih dari satu periode ke periode lainnya fluktuasi ini mencerminkan tren partisipasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk mobilisasi politik kemudian kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, akses masyarakat terhadap informasi politik serta ketegangan yang muncul selama proses pemilu dalam hal ini peran penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong partisipasi pemilih upaya seperti edukasi politik yang efektif serta penciptaan suasana kompetisi yang sehat dan transparan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada.

Sejak diterapkannya kebijakan Pilkada serentak pada 2015 Kabupaten Sukoharjo telah menyesuaikan diri dengan regulasi nasional dalam menyelenggarakan Pilkada secara langsung setiap lima tahun sekali meskipun terdapat peningkatan partisipasi pada Pilkada 2020 namun tantangan untuk mempertahankan dan meningkatkan angka partisipasi pemilih tetap

menjadi isu penting terutama dengan adanya dinamika pada Pilkada 2024. Oleh karena itu, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan perlu memahami dan mengatasi hambatan yang mengurangi partisipasi pemilih serta mencari solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi.

Melalui pembahasan ini penulis berharap dapat menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih di Kabupaten Sukoharjo serta merumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat yaitu dengan memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap tingkat partisipasi yang nantinya diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas demokrasi di tingkat lokal semakin diperkuat.●

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
SAMBUTAN	vii
DAFTAR T ISI	xiii
TABEL	xvi
DAFTAR ISTILAH	xvi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Metode Dan Instrumen Penelitian	6
1) Pengumpulan Data	6
2) Analisis Data	7
BAB II	
TEORI DAN KONSEP	9
A. Teori Partisipasi Politik	9
B. Teori Pendidikan Politik Dan Peranannya Dalam Membangun Partisipasi Politik Berkualitas	13
C. Teori Perilaku Pemilih	16
D. Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Partisipasi Politik Yang Berkualitas Melalui Pembentukan Perilaku Pemilih	19
BAB III	
PEMBAHASAN	23
A. Tren Peningkatan dan Penurunan Partisipasi	

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

Pemilih Sukoharjo dari Masa Ke Masa	23
1. Pilkada 2013 (Pilgub Jawa Tengah)	24
2. Pilkada 2014 (Pilpres dan Pileg)	28
3. Pilkada 2015 (Pilbup Sukoharjo)	32
4. Pilkada 2018 (Pilgub Jawa Tengah)	36
5. Pemilu 2019 (Pilpres)	39
6. Pilkada 2020 (Pilbup Sukoharjo)	43
7. Pilkada 2024 (Pilbup Sukoharjo)	44
8. Tabel Tren Partisipasi Pemilih Sukoharjo 2013 - 2024	46
B. Faktor yang Mempengaruhi Tren Partisipasi Pilkada Sukoharjo	48
C. Peran Penyelenggara Pilkada Sukoharjo dalam Pendidikan Pemilih	55
1. KPU, Bawaslu, dan Sistem Demokrasi	57
2. Peran KPU dan Bawaslu dalam Pendidikan Politik	60
D. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik	66
1. Partai Politik dan Sistem Demokrasi	66
2. Partai Politik Alternatif dalam Masyarakat yang Beraspirasi di Negara Demokrasi	69
3. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik	72
E. Perilaku Pemilih dalam Pilkada Sukoharjo	75
1. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Sosiologis (Sociological Model)	76
2. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Psikologi Sosial (Michigan Model)	78
3. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)	81
4. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Civic Voluntarism Model (CVM)	85

BAB IV

MODEL PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN 91

A. Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan	91
B. Polemik Tentang Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih:	

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

Apakah Terbatas pada Aspek Teknis?	93
C. Peran KPU dalam Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada	95
D. Tantangan dan Solusi dalam Penyuluhan Pemilih	98
E. Evaluasi dan Dampak Pendidikan Pemilih	99
F. Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk Masa Depan Demokrasi	101
BAB V	
PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Rekomendasi untuk Peningkatan Partisipasi	108
DAFTAR PUSTAKA	113
TIM PENULIS	117

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tren Partisipasi Pemilih Sukoharjo 2013-2024

46

DAFTAR ISTILAH

BAWASLU	: Badan Pengawas Pemilu
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TPS	: Tempat Pemungutan Suara
PILKADA	: Pemilihan Kepala Daerah
PILGUB	: Pemilihan Gubernur
PILPRES	: Pemilihan Presiden
PILEG	: Pemilihan Legislatif
PILBUP	: Pemilihan Bupati
CVM	: Civic Voluntarism Model
SIREKAP	: Sistem Informasi Rekapitulasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Tingginya angka partisipasi tidak hanya mencerminkan antusiasme masyarakat dalam menentukan pemimpin, tetapi juga menjadi indikator utama legitimasi pemerintahan yang terpilih. Pemilu yang partisipatif menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi dan merasa bahwa suara mereka memiliki dampak terhadap kebijakan dan arah pembangunan yang akan diambil oleh pemerintah. Sebaliknya, rendahnya partisipasi pemilih dapat menjadi sinyal adanya berbagai persoalan dalam proses demokrasi, seperti kurangnya kepercayaan terhadap sistem pemilu, apatisisme politik, ataupun terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi dan infrastruktur pemilihan teks pemilihan kepala daerah, partisipasi pemilih memiliki peran yang sangat krusial

Tidak seperti pemilu nasional yang memiliki cakupan yang lebih luas, pemilihan kepala daerah termasuk Pilkada Sukoharjo lebih berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat lokal. Pemimpin daerah yang dipilih melalui Pilkada memiliki kewenangan dalam menyusun kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari perencanaan pembangunan, pelayanan publik, hingga pengelolaan anggaran daerah. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses Pilkada tidak hanya menjadi hak politik, tetapi juga merupakan tanggung jawab dalam memastikan bahwa pemerintahan daerah dipimpin oleh individu yang kompeten, memiliki integritas, serta berkomitmen terhadap kepentingan publik.

Kabupaten Sukoharjo yang terletak di Provinsi Jawa Tengah memiliki

posisi strategis dalam politik daerah dan nasional. Dengan jumlah pemilih yang mencapai lebih dari 670 ribu dalam Pilkada 2015, dinamika politik di ak terlepas dari tren politik di Jawa Tengah maupun Indonesia secara keseluruhan. Dalam sejarahnya, tingkat partisipasi pemilih di Sukoharjo menunjukkan pola yang fluktuatif. Pada Pilkada Sukoharjo 2015, partisipasi pemilih hanya mencapai 66,2%, angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh KPU. Berbagai faktor turut berkontribusi pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada tersebut. Diantaranya kurangnya persaingan dalam kontestasi Pilkada, dominasi calon petahana, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Tren ini mengalami perubahan signifikan dalam Pilkada 2020. Meskipun dilaksanakan dalam situasi pandemi COVID-19 yang penuh dengan tantangan, Pilkada Sukoharjo 2020 justru mencatat peningkatan partisipasi mencapai 78,8%. Angka ini tidak hanya melampaui Pilkada sebelumnya, tetapi juga mendekati angka partisipasi dalam Pemilu 2019, yang secara nasional mencapai 80-81%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa dengan strelenggaraan yang tepat, hambatan-hambatan yang berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dapat diatasi. KPU Sukoharjo sendiri menerapkan berbagai strategi untuk menjaga antusiasme pemilih, seperti penguatan sosialisasi berbasis digital, penerapan protokol kesehatan yang ketat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta kemudahan administrasi bagi pemilih.

Meskipun terdapat peningkatan partisipasi dalam Pilih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Pilkada di Sukoharjo ke depan. Data menunjukkan bahwa dalam beberapa pemilu lainnya, partisipasi pemilih masih berfluktuasi. Sebagai contoh, dalam Pilkada Sukoharjo 2024, tingkat partisipasi kembali mengalami sedikit penurunan, yaitu 74,3%. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan dalam meninipasi pemilih bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan secara otomatis, tetapi memerlukan upaya berkelanjutan dalam membangun kesadaran politik masyarakat serta memperbaiki aspek teknis dalam penyelenggaraan pemilu.

Rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada pada dasarnya dapat menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Partisipasi pemilih

merupakan salah satu indikator vital dalam menilai sejauh mana sistem demokrasi berjalan secara sehat dan inklusif. Ketika tingkat partisipasi rendah, proses pemilihan sebagai mekanisme perwakilan rakyat kehilangan esensinya untuk merepresentasikan kehendak mayoritas masyarakat. Akibatnya, pemerintahan yang dihasilkan dari Pilkada dengan partisipasi rendah cenderung memiliki legitimasi yang lebih lemah di mata publik. Legitimasi yang lemah ini berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berkuasa, sehingga memperbesar jarak antara rakyat dan pemimpin yang terpilih. Pemerintahan dengan legitimasi rendah akan menghadapi tantangan lebih besar dalam memperoleh dukungan masyarakat. Kebijakan yang diambil, meskipun bertujuan untuk kepentingan publik, akan lebih rentan terhadap resistensi dan penolakan. Kondisi ini dapat memperlambat proses pembangunan, memperbesar polarisasi sosial, serta memperburuk kualitas tata kelola pemerintahan. Masyarakat yang merasa tidak terwakili cenderung bersikap apatis terhadap kebijakan publik, bahkan berpotensi menumbuhkan sikap antipati terhadap seluruh proses politik.

Selain itu, rendahnya partisipasi pemilih juga membuka celah bagi praktik politik transaksional. Dengan jumlah pemilih yang sedikit, kandidat atau tim sukses lebih mudah memetakan kelompok-kelompok pemilih yang potensial untuk dipengaruhi melalui cara-cara yang tidak demokratis, seperti politik uang atau pemberian bantuan materiil. Pola semacam ini berisiko mereduksi makna Pilkada dari arena kompetisi gagasan menjadi sekadar ajang transaksi kepentingan. Praktik politik transaksional tidak hanya mencederai integritas demokrasi, tetapi juga memperkuat budaya korupsi dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada menjadi salah satu tantangan utama dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Upaya ini membutuhkan sinergi antara penyelenggara pemilu, pemerintah daerah, partai politik, media, serta masyarakat sipil untuk membangun kesadaran politik, memperkuat pendidikan pemilih, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam Pilkada bukan sekadar hak, melainkan fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan yang berintegritas,

akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilih dipengaruhi oleh sejumlah faktor utama, seperti tingkat pendidikan politik, kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, akses terhadap informasi politik, serta daya tarik kandidat yang bersaing. Namun, pengaruh faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial dan politik daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo menjadi semakin relevan untuk melihat pola-pola yang muncul dan mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Berangkat dari latar belakang ini, buku ini akan membahas secara mendalam mengenai tren partisipasi pemilih di Sukoharjo, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada mendatang. Dengan memahami dinamika partisipasi pemilih di tingkat lokal, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa setiap warga memiliki peran aktif dalam menentukan pemimpinnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam buku ini meliputi:

1. *Bagaimana Tren Peningkatan atau Penurunan Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Sukoharjo?*

Pertanyaan ini terkait dengan signifikansi partisipasi pemilih terhadap kualitas demokrasi dan legitimasi pemerintah daerah yang terpilih di Sukoharjo. Dalam hal ini akan dibahas konsekuensi demokratis jika partisipasi tinggi maupun rendah, serta relevansi Sukoharjo sebagai cermin kondisi partisipasi politik di tingkat lokal.

2. *Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo?*

Pertanyaan ini berfokus pada identifikasi faktor kunci yang mendorong atau menghambat masyarakat Sukoharjo untuk menggunakan hak pilihnya. Pembahasan akan mencakup faktor struktural (misalnya aturan dan penyelenggaraan Pilkada), faktor

individu pemilih (seperti tingkat pendidikan politik, kepercayaan pada pemerintah, preferensi terhadap calon), maupun faktor kontekstual (misalnya situasi pandemi, persaingan antar kandidat, peran partai politik, dan media informasi).

3. *Bagaimana peran penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan pendidikan politik sehingga partisipasi akan meningkat?*

Pertanyaan ini akan mengelaborasi bagaimana peran kemitraan antar aktor-aktor Pilkada Sukoharjo dalam meningkatkan tingkat partisipasi pemilih melalui strategi-strategi pendidikan politik yang mereka lakukan.

4. *Bagaimana gambaran perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo?*

Pertanyaan ini akan mengantarkan pembaca untuk mengetahui bagaimana gambaran latar belakang perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo

C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan buku ilmiah populer ini adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo. Melalui analisis data partisipasi dan konteks politik setempat, pembaca diharapkan memperoleh gambaran jelas mengenai apa saja pendorong dan penghambat utama partisipasi pemilih di Sukoharjo.
- Memberikan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi serta strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Buku ini akan mengulas berbagai tantangan, seperti apatisisme politik, hoaks atau misinformasi, kendala teknis pemilihan, hingga kondisi khusus seperti pandemi. Selanjutnya, dibahas pula strategi-strategi yang dapat ditempuh oleh penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan. Misalnya peningkatan sosialisasi pendidikan pemilih, inovasi layanan pemungutan suara, dan kolaborasi dengan komunitas lokal – sebagai upaya mendorong partisipasi yang lebih tinggi.
- Menyediakan rekomendasi kebijakan praktis untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo mendatang. Rekomendasi ini disusun berdasarkan temuan analisis dan studi kasus, sehingga dapat menjadi masukan bagi KPU daerah, pemerintah lokal, partai

politik, serta masyarakat sipil dalam memperbaiki kualitas partisipasi pemilih. Dengan implementasi rekomendasi tersebut, diharapkan tingkat partisipasi pemilih pada pemilu-pemilu berikutnya di Sukoharjo dapat meningkat, sehingga demokrasi lokal semakin kuat dan inklusif.

D. Metode Dan Instrumen Penelitian

Penelitian yang dijalankan dalam buku ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi literatur dalam menilik tren partisipasi pemilih dalam Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 2024. menurut Creswell (1998), metodologi kualitatif merupakan sebuah metodologi yang menyelami fenomena sosial secara kritis, detail dan dalam. Penelitian kualitatif biasanya memiliki sifat deskriptif dan induktif. Penelitian kualitatif juga mendorong para peneliti untuk menilik sudut pandang dari tiap objek yang diteliti. metode kualitatif juga bisa mendorong para peneliti untuk meraih informasi dengan berbagai bentuk, seperti tulisan, lisan, serta pengamatan perilaku narasumber mereka (Bogdan & Biklen, 1982).

Studi literatur menjadi satu alternatif yang digunakan karena membuat para penulis memiliki kesempatan untuk menggali banyak sudut pandang, temuan terdahulu, dan teori yang bisa menjelaskan fenomena sesuai isu tertentu. Studi literatur juga mendorong para penulis untuk menggali data secara mendalam dan lebih luas tanpa diikuti dengan pengumpulan data primer secara langsung secara luring. Pendekatan ini pun didefinisikan sebagai aktivitas untuk mengkajib data tertentu yang didapat dari hasil penelitian maupun referensi tertentu (Sarwono, 2006). Berangkat dari hal itu, metode analisis kualitatif diikuti pendekatan studi kasus menjadi pilihan tepat dalam menganalisis secara mendalam mengenai tren partisipasi pemilih di Pilkada 2024 ini.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang para penulis lakukan dalam penyusunan buku ini merupakan pengumpulan data yang berasal dari literatur, laporan, dan evaluasi atas Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) khususnya di Sukoharjo, Jawa Tengah pada tahun 2024. Data yang dirumuskan

pada buku ini bisa ditilik dari sisi akuntabilitas dan faktualnya, sehingga data ada bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Data yang ada juga tidak lepas dari data enumerator yang ada dalam media. Dalam hal ini, pengumpulan data mengenai tren partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo, Jawa Tengah menjadi tolok ukur bagaimana buku ini disusun. Dengan menganalisis tren partisipasi, penelitian ini pun menganalisis bagaimana pendidikan politik dan berbagai fungsi KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam menjalani kesadaran politik bagi masyarakat Indonesia. Dalam pemilihan kepala daerah juga terdapat alur-alur yang merujuk pada persiapan hingga evaluasi pilkada. Dalam segi persiapan, kita bisa menilik bagaimana pelaksanaan dan peninjauan itu hadir untuk mendorong pilkada yang transparan.

Selain itu, dibutuhkan pula pengawasan kampanye hingga pendidikan politik bagi masyarakat secara luas, baik itu dari generasi tua hingga generasi muda. Pada konteks ini, tren partisipasi pemilih bisa menjadi isu kontemporer karena mencangkup berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya, pengecekan dan pengawasan pada masa tenang pun merupakan hal krusial dalam penjalinan pilkada yang baik. Distribusi logistik hingga pengawasan sampai pilkada berakhir menjadi alur yang tidak bisa ditinggalkan. maka dari itu, penelitian ini akan mengisi celah kosong untuk mengkaji secara lebih jauh bagaimana dinamika pilkada dari tahun ke tahun hingga bagaimana tren partisipasi pemilih masyarakat pada agenda Pilkada Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2024.

2. Analisis Data

Bagi Bogdan dan Biklen (1982) pada moleong (2007) menjelaskan bahwa teknik analisis data merupakan sebuah usaha para penulis untuk mengatur dan mengolah data data penelitian sebelum akhirnya penulis mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan serta dibagikan. miles dan Huberman (1992) juga menandai bahwa penelitian kualitatif memiliki dua model teknik analisis. Pertama adalah teknik Flow Model of Analysis atau bisa juga disebut model analisis mengalir. Kedua merupakan Interactive Model Analysis atau model analisis Interaktif. Penelitian yang dituliskan pada buku ini

menggunakan teknik analisis kedua, yakni Interactive Model Analysis. Teknik analisis data ini menunjukkan adanya interkoneksi antara elemen elemen penelitian dalam proses pencarian data. Miles dan Huberman (1992) juga menjelaskan teknik tersebut terbagi menjadi empat alur secara bergantian, diantaranya adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penyusunan kesimpulan maupun verifikasi. Ketika berbagai data telah dikumpulkan, khususnya mengenai tren partisipasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada Sukoharjo, Jawa Tengah 2024, tahap selanjutnya yang dilakukan merupakan tahap pengecekan data. Tahap ini menjadi poin kunci karena memungkinkan para penulis untuk meneliti kesalahan kesalahan yang bisa saja menjadi penghambat dalam analisis data.●

BAB II

TEORI DAN KONSEP

Penelitian ini akan mengadopsi beberapa teori relevan untuk menganalisis tren partisipasi dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2024. Teori pertama berfokus pada pemahaman mengenai bagaimana proses partisipasi dalam pemilihan umum dan pilkada berlangsung. Teori kedua menekankan peran pendidikan politik dalam membangun partisipasi pemilih yang berkualitas. Sementara itu teori ketiga akan mengkaji perilaku pemilih dan bagaimana ketiga teori tersebut saling terkait satu sama lain membentuk kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya partisipasi pemilih dalam pilkada. Penelitian ini juga akan memperhatikan aspek-aspek sosiologis, psikologi sosial, teori pilihan rasional, serta voluntarisme dalam menganalisis fenomena ini.

A. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat menjadi tolok ukur utama yang menentukan sejauh mana pemerintahan dapat dianggap sah dan representatif. Keterlibatan warga negara dalam berbagai proses politik, mulai dari pemilihan umum hingga aktivitas politik lainnya, tidak hanya mencerminkan kesadaran politik individu, tetapi juga berperan dalam menjaga stabilitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Para ahli politik telah mengkaji fenomena partisipasi politik dari berbagai perspektif, menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhinya, bentuk-bentuk keterlibatan yang beragam, serta implikasi dari tingkat partisipasi masyarakat terhadap legitimasi politik suatu negara. Berikut ini akan dibahas berbagai pandangan ahli mengenai partisipasi politik serta faktor-faktor yang membentuknya.

Menurut Ramlan Surbakti (2010), partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan dan keputusan pemerintah. Dalam praktiknya, partisipasi politik tidak hanya terbatas pada aktivitas pemilihan umum, tetapi juga mencakup bentuk-bentuk lain seperti keterlibatan dalam organisasi sosial, demonstrasi, petisi, hingga diskusi publik yang membahas kebijakan politik. Michael Rush dan Phillip Althoff (2000) menekankan bahwa partisipasi politik adalah hak sekaligus kewajiban bagi setiap individu dalam masyarakat demokratis. Mereka menegaskan bahwa semakin banyak individu yang terlibat dalam proses politik, semakin kuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk. Dengan kata lain, demokrasi yang sehat sangat bergantung pada seberapa aktif masyarakat dalam menjalankan hak politiknya.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson (1994) menyoroti bahwa partisipasi politik tidak selalu berjalan dalam koridor yang legal dan formal. Dalam konteks negara berkembang, mereka menemukan bahwa ketika masyarakat merasa akses terhadap politik formal tertutup atau tidak efektif, mereka cenderung menggunakan metode lain, termasuk demonstrasi jalanan, aksi protes, dan bahkan tindakan yang melibatkan unsur kekerasan. Dalam kondisi ini, partisipasi politik berfungsi sebagai ekspresi ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem yang ada. Adnan Nursal (2004) lebih lanjut mengaitkan partisipasi politik dengan persepsi individu terhadap lingkungan sosial dan politik mereka. Menurutnya, cara individu menyerap informasi, baik dari media maupun interaksi sosial, memengaruhi keputusan mereka dalam terlibat atau tidak dalam proses politik. Pendidikan, pengalaman sosial, dan paparan informasi memainkan peran kunci dalam membentuk sikap dan preferensi politik seseorang.

Damsar (2010) berpendapat bahwa partisipasi politik dapat dikategorikan ke dalam berbagai bentuk, mulai dari aktivitas yang bersifat pasif, seperti mengikuti berita politik dan mendiskusikannya dalam lingkungan sosial, hingga bentuk yang lebih aktif, seperti menjadi anggota partai politik atau mengorganisir gerakan sosial. Dengan demikian, partisipasi politik bukan hanya soal memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga melibatkan berbagai tindakan yang dapat

mempengaruhi kebijakan publik. Dari perspektif ini, bisa dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin besar peluang untuk menciptakan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan rakyatnya.

Partisipasi masyarakat dalam politik menjadi tolok ukur penting yang menentukan kualitas sistem pemerintahan dalam sistem demokrasi. Dalam konteks pemilihan umum, misalnya, semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemungutan suara, semakin besar legitimasi pemimpin yang terpilih. Legitimasi ini penting untuk menciptakan stabilitas politik karena masyarakat cenderung lebih menerima hasil pemilu jika mereka merasa telah turut serta dalam prosesnya. Sebaliknya, jika partisipasi pemilih rendah, pemerintahan yang terbentuk bisa menghadapi tantangan dalam hal kepercayaan publik dan stabilitas politik. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi politik menjadi agenda utama dalam menjaga keberlanjutan demokrasi.

Peningkatan partisipasi politik tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor seperti pendidikan politik, akses terhadap informasi, dan lingkungan sosial. Dalam masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, kesadaran politik cenderung lebih berkembang, sehingga mereka lebih aktif dalam mengikuti dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Begitu juga dengan akses terhadap informasi media, terutama media digital dan media sosial, berperan penting dalam membentuk opini publik dan meningkatkan keterlibatan politik masyarakat. Generasi muda, yang lebih akrab dengan teknologi digital, menunjukkan pola partisipasi politik yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka lebih cenderung memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyuarakan pendapat, mendiskusikan isu-isu politik, dan mengorganisir gerakan sosial.

Kampanye digital, petisi online, serta aksi solidaritas virtual menjadi bentuk baru dari partisipasi politik yang berkembang di era digital. Namun, di sisi lain, tantangan utama dari partisipasi politik melalui media digital adalah penyebaran informasi yang belum tentu akurat, yang dapat menyebabkan polarisasi opini di masyarakat. Oleh karena itu, meningkatkan literasi politik dan digital menjadi langkah strategis dalam memastikan bahwa keterlibatan politik yang terjadi benar-benar

berbasis pada informasi yang valid dan relevan.

Sikap politik seseorang dibentuk oleh banyak faktor, termasuk pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan eksposur terhadap media. Sikap ini kemudian berpengaruh terhadap keputusan individu dalam berpartisipasi dalam politik atau tidak. Ada individu yang secara aktif mengikuti perkembangan politik dan terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi, sementara ada juga yang memilih untuk bersikap apatis atau bahkan tidak peduli sama sekali terhadap politik. Sikap apatis ini sering kali muncul akibat ketidakpercayaan terhadap sistem politik yang ada, baik karena pengalaman buruk di masa lalu maupun karena melihat tidak adanya perubahan yang berarti meskipun mereka berpartisipasi. Dalam demokrasi yang ideal, semua kelompok masyarakat memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam politik. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak kelompok yang mengalami hambatan dalam menyalurkan aspirasi politik mereka. Kelompok marjinal, seperti masyarakat miskin, kaum perempuan, serta kelompok minoritas, seringkali menghadapi kendala struktural yang menghambat keterlibatan mereka dalam politik. Oleh karena itu, kebijakan inklusif yang memungkinkan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik tanpa diskriminasi menjadi sangat penting dalam menjaga keseimbangan demokrasi.

Partisipasi politik tidak hanya sekadar keterlibatan individu dalam pemilu, tetapi juga merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Ketika masyarakat aktif dalam politik, mereka memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Partisipasi ini bisa berbentuk tuntutan transparansi, desakan untuk akuntabilitas, serta keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Dengan adanya mekanisme ini, pemerintah menjadi lebih terbuka terhadap kritik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa kasus, rendahnya partisipasi politik justru disebabkan oleh sistem politik itu sendiri yang kurang mendukung keterlibatan masyarakat. Misalnya, dalam sistem politik yang terlalu birokratis dan elitis, akses masyarakat terhadap kebijakan publik menjadi terbatas. Hal ini mengakibatkan alienasi politik, di mana masyarakat merasa bahwa keputusan politik tidak lagi mencerminkan aspirasi mereka. Dalam kondisi seperti ini, perlu ada reformasi sistem politik

agar lebih terbuka dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya demokrasi di berbagai negara, pendekatan terhadap partisipasi politik juga mengalami perubahan. Jika pada masa lalu partisipasi politik lebih bersifat konvensional, seperti keanggotaan dalam partai politik dan pemilihan umum, saat ini partisipasi politik semakin berkembang ke arah yang lebih fleksibel dan berbasis digital. Hal ini menunjukkan bahwa pola keterlibatan masyarakat dalam politik terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, partisipasi politik adalah elemen kunci dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Berbagai perspektif dari para ahli menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran politik, memperluas akses terhadap informasi yang kredibel, serta menciptakan kebijakan yang inklusif menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat yang aktif dalam politik tidak hanya membantu menciptakan pemerintahan yang lebih legitimate, tetapi juga berkontribusi dalam membangun budaya politik yang lebih partisipatif dan inklusif.

B. Teori Pendidikan Politik Dan Peranannya Dalam Membangun Partisipasi Politik Berkualitas

Pendidikan politik merupakan elemen yang sangat penting dalam membangun partisipasi politik yang berkualitas. Pendidikan politik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang struktur pemerintahan atau hak-hak kewarganegaraan tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku pemilih yang rasional dan aktif dalam proses politik. Untuk memahami lebih jauh mengenai peran pendidikan politik dalam konteks demokrasi kita perlu menggali teori-teori pendidikan politik yang mendasari konsep tersebut serta bagaimana literasi politik dapat dikembangkan dalam masyarakat.

Salah satu teori utama yang sering digunakan untuk memahami pendidikan politik adalah teori pembelajaran sosial yang dikembangkan

oleh Albert Bandura dalam bukunya *Social Learning Theory*. Menurut Bandura pembelajaran tidak hanya terjadi melalui pengalaman langsung tetapi juga melalui observasi terhadap perilaku orang lain dalam konteks sosial. Dalam konteks pendidikan politik teori ini mengacu pada bagaimana individu belajar tentang politik dan kebijakan dengan mengamati orang lain misalnya melalui diskusi politik atau melalui contoh-contoh perilaku politik yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Pendidikan politik yang efektif menurut Bandura terjadi ketika individu tidak hanya menerima informasi tetapi juga terlibat dalam pengalaman sosial yang memungkinkan mereka untuk mengamati dan menganalisis perilaku politik dari berbagai sumber hal ini sangat relevan dalam demokrasi dikarenakan para pemilih harus mampu menilai pilihan politik mereka berdasarkan informasi yang objektif dan kritis bukan hanya sekedar mengikuti tren sosial atau identitas kelompok.

Pendidikan politik berperan penting dalam pengembangan literasi politik yang mana Literasi politik merupakan kemampuan untuk memahami dan menganalisis informasi yang relevan dengan politik yang kemudian menjadi fondasi bagi partisipasi politik yang bermakna. Robert Dahl dalam bukunya *Democracy and its Critics* menekankan pentingnya pemahaman masyarakat terhadap sistem politik untuk memastikan keberlangsungan demokrasi masyarakat yang melek politik adalah masyarakat yang dapat menilai pilihan-pilihan politik dengan objektif dan kritis serta dapat berpartisipasi dalam proses politik dengan cara yang terinformasi dan tidak terjebak dalam manipulasi informasi literasi politik ini sangat penting untuk memerangi hoax dan informasi yang salah yang sering kali tersebar di masyarakat terutama di era digital saat ini para pemilih yang memiliki literasi politik yang baik akan dapat mengidentifikasi informasi yang valid dan membuat keputusan yang lebih rasional dalam pelaksanaan pemilu.

Seiring dengan perkembangan teori pendidikan politik diskursus tentang demokrasi deliberatif juga menawarkan pandangan yang menarik. Jürgen Habermas, seorang filsuf sosial mengemukakan pentingnya ruang publik di mana individu dapat berpartisipasi dalam diskusi yang rasional dan terbuka mengenai isu-isu politik dalam demokrasi deliberatif keputusan politik bukan hanya hasil dari suara mayoritas tetapi juga

melalui proses komunikasi dan diskusi yang saling menghormati antar pihak-pihak yang terlibat. Pendidikan politik dalam konteks ini bertujuan untuk mendorong pemilih untuk tidak hanya berfokus pada identitas kelompok atau bias pribadi tetapi untuk berpikir lebih kritis dan rasional dalam memilih kebijakan atau kandidat oleh karena itu pendidikan politik harus mencakup keterampilan komunikasi yang efektif kemudian juga mencakup kemampuan untuk mendengarkan berbagai pandangan dan membangun argumen yang dapat dipertanggungjawabkan dalam ruang publik.

Di sisi lain peran partai politik dalam pendidikan politik menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Anthony Downs melalui teori perilaku pemilihnya menyatakan bahwa partai politik tidak hanya bertugas untuk mengorganisir suara dan membentuk kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai agen yang menyebarkan informasi politik kepada pemilih. Partai politik berperan dalam membantu masyarakat memahami perbedaan kebijakan dan program yang ditawarkan oleh berbagai calon atau partai meskipun demikian peran ini harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab dikarenakan seringkali partai politik lebih cenderung untuk mengedepankan kepentingan elektoral mereka daripada menyampaikan informasi yang objektif kepada para pemilih oleh karena itu meskipun partai politik memiliki kekuatan untuk mendidik masyarakat mereka juga harus menjaga integritas dalam memberikan informasi yang akurat dan berimbang.

Partai politik dengan segala kapasitas dan pengaruhnya juga memiliki potensi untuk memperkenalkan program pendidikan politik yang lebih sistematis dan terstruktur kepada masyarakat melalui program pendidikan ini partai politik dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam baik itu mengenai proses politik kemudian hak-hak pemilih serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi hal ini akan memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan tidak hanya mengikuti sentimen kelompok atau kampanye yang emosional. Partai politik dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi pendidikan politik yang objektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Mengingat pentingnya literasi politik dan pendidikan politik da-

lam membangun masyarakat demokratis peran partai politik harus diimbangi dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas diskursus politik melalui saluran-saluran yang terbuka dan demokratis dengan demikian pendidikan politik tidak hanya mencakup aspek pengajaran tentang hak dan kewajiban tetapi juga melibatkan pengembangan keterampilan sosial yang dapat mendorong individu untuk berpartisipasi dalam proses politik secara sadar dan kritis. Keterlibatan partai politik dalam pendidikan politik apabila dilakukan dengan cara yang tepat akan menciptakan pemilih yang tidak hanya cerdas secara politik tetapi juga aktif dalam mengawal keberlanjutan dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Pendidikan politik yang kuat akan menciptakan pemilih yang tidak hanya memilih berdasarkan informasi yang terbatas atau emosi sesaat tetapi juga yang mampu melakukan refleksi kritis terhadap berbagai isu politik di sinilah pentingnya pendidikan politik yang berbasis pada literasi politik yang baik dan didukung oleh partai politik yang menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab dan integritas melalui pendidikan politik yang efektif kita dapat berharap untuk menciptakan sebuah demokrasi yang lebih matang di mana setiap individu tidak hanya diberi kebebasan untuk memilih tetapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat keputusan yang terbaik bagi kepentingan bersama.

C. Teori Perilaku Pemilih

Ketiga adalah teori yang dihasilkan dari berbagai ragam aspek, yakni Sociological, Social Psychological (Michigan Model), *Rational Choice Theory*, *Civic Voluntarism Model (CVM)*. Pertama adalah Sociological Model atau model sosiologis yang menjelaskan bahwa perilaku para pemilih dalam dinamika pemilihan umum akan selalu dipengaruhi faktor faktor tertentu seperti kelas sosial, agama, hingga identifikasi diri setiap orang dalam kelompok atau komunitas tertentu (lazarsfeld et al., 1944). Penelitian yang dilakukan lazarsfeld et al (1994) di amerika Serikat menunjukkan bahwa masyarakat akan cenderung memilih calon pejabat publik yang merupakan bagian dari kelompok satu identitas dengan mereka. Ketika kita membicarakan Indonesia, agamalah yang tidak jarang

menjadi variabel signifikan dalam mempengaruhi keputusan politik setiap orang, khususnya di daerah-daerah dengan heterogenitas agama. Seperti contoh, di beberapa dengan mayoritas agama tertentu, kandidat dengan latar belakang dan pengalaman yang berhubungan dengan agama tersebut akan lebih kuat mendapat dukungan dari masyarakat lokal.

Studi yang dilakukan oleh Ubaidullah & Ahmady (2022) menjelaskan bahwa tokoh agama dengan menggunakan jaringan keagamaan memiliki peran dalam pembangunan partisipasi politik masyarakat. Penggunaan jaringan keagamaan ini mampu menjadi bekal dalam menggalang dukungan di masyarakat rural. Model sosiologis ini juga menunjukkan adanya peran krusial dari sebuah interaksi dalam pembangunan opini politik bagi publik, khususnya daerah dengan interaksi kelompok yang kuat. Faktor kelas sosial juga mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilu dan pilkada. Dalam konteks Indonesia pun, aspek kelas sosial ini sangat relevan, dimana mereka cenderung menawarkan kebijakan ekonomi dengan gaya populis. Berangkat dari hal itu, model ini relevan sebagai bekal untuk memahami partisipasi pemilih di Sukoharjo, Jawa Tengah (Lazarsfeld et al., 1944).

Aspek kedua berangkat dari *Social Psychological Model*, khususnya pada Michigan Model. Model ini mengelaborasi adanya hubungan emosional dan psikologis pemilih yang berangkat dari masyarakat dengan partai politik itu sendiri. Identifikasi partai dan nilai yang mereka usung dianggap sebagai prediktor utama dalam pola pemilihan para masyarakat. Relasi ini tidak jarang dimanifestasikan dalam hubungan keluarga, dimana afiliasi tetap stabil antargenerasi. Model ini juga mencakup persepsi publik atas isu dan tiap kandidat yang juga menjadi salah satu alasan mereka menentukan pilihan. Hal ini pun berhubungan dengan daya tarik personal yang mampu melepas atau menarik preferensi memilih tiap individu sebagai pemilih, walaupun identifikasi partai menjadi poin dominan. Konteks lokal pun bisa dibawa dalam analisis model ini, dimana tiap daerah yang cenderung dinamis menjadi analisis krusial pada penelitian ini. Selain itu, keterlibatan pemilih dalam diskusi politik juga menjadi salah satu faktor penguatan relasi psikologis antara mereka dengan kandidat (Campbell et al., 1960). Maka

dari itu, model ini sangat berguna dalam menganalisis pola perilaku pemilih di Pilkada.

Aspek ketiga adalah Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), yang merupakan pendekatan dengan berfokus pada keputusan individu yang diambil berdasarkan pertimbangan rasional mengenai keuntungan dan biaya yang terkait dengan pilihan yang ada. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Anthony Downs dalam bukunya *An Economic Theory of Democracy* (1957) yang berargumen bahwa pemilih dalam pemilu bertindak sebagai individu rasional mereka membuat keputusan dengan cara menilai manfaat yang mereka dapatkan dari memilih calon tertentu dan membandingkannya dengan biaya yang harus dikeluarkan, seperti waktu dan tenaga untuk berpartisipasi dalam pemilu.

Menurut teori ini pemilih akan memilih kandidat yang menawarkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi mereka, terutama dalam hal ekonomi, kesejahteraan, dan kebijakan sosial yang relevan. Meskipun pemilih bertindak berdasarkan pertimbangan rasional mereka sering kali tidak memiliki informasi yang lengkap atau sempurna tentang kandidat atau kebijakan yang diusulkan hal ini mengarah pada konsep rasionalitas terbatas yang di mana keputusan dibuat berdasarkan informasi yang terbatas dan tidak selalu optimal. Downs menyebut ketidaksempurnaan informasi ini sebagai suatu hambatan dalam pengambilan keputusan rasional. Teori ini juga memperkenalkan konsep informasi asimetris yang menjelaskan bahwa para pemilih tidak selalu memiliki akses yang sama terhadap informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang sepenuhnya rasional oleh karena itu para pemilih mungkin saja bergantung pada petunjuk sosial baik seperti iklan politik, kampanye, atau rekomendasi dari tokoh yang mereka percayai untuk dapat mengurangi ketidakpastian dalam memilih calon.

Teori ini menjelaskan bahwa tingkat partisipasi pemilih akan bergantung pada bagaimana para pemilih menilai biaya dan manfaat dari berpartisipasi dalam pemilihan yang dimana Jika pemilih merasa bahwa manfaat yang mereka peroleh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan misalnya karena kebijakan yang diusulkan calon kandidat relevan dengan kehidupan mereka maka mereka lebih cenderung untuk ikut berpartisipasi. Sebaliknya jika dalam pelaksanaannya manfaat dirasa

kecil atau biaya terlalu tinggi maka tingkat partisipasi bisa menurun. Teori Pilihan Rasional ini sangat bermanfaat untuk menjelaskan dinamika naik turunnya partisipasi dalam Pilkada kemudian Faktor-faktor seperti relevansi isu yang dibawa oleh calon, efektivitas kampanye, serta tingkat keterlibatan sosial dapat mempengaruhi keputusan individu untuk berpartisipasi.

Adapun pada aspek keempat adalah *Civic Voluntarism Model* atau CVM, berangkat dari pendapat bahwa partisipasi politik didorong dari tiga faktor utama yaitu sumber daya (keterampilan, waktu, uang), psikologi politik (kepercayaan diri dalam mendorong pengaruh pada lingkup politik), dan keinginan untuk berpartisipasi dalam konteks Indonesia sendiri. model ini sangat relevan ketika kita ingin menjelaskan variasi partisipasi dan bentuk tindak politik masyarakat, baik di daerah perkotaan, maupun pedesaan. Seperti contoh, di daerah pedesaan, minimnya sumber daya serta akses informasi teknologi menjadi problematika utama bagi partisipasi politik para masyarakat.

Disamping itu, di daerah perkotaan para pemilih cenderung lebih aktif dalam menyuarakan pendapat dan opininya karena mereka mempunyai akses maksimal dalam sumber daya informasi dan teknologi. model ini juga menekankan betapa pentingnya pendidikan politik dalam peningkatan kepercayaan diri pemilih untuk memilih yang mereka inginkan. Dalam konteks pilkada maupun pemilu, partai politik serta kandidat tidak jarang menggunakan strategi mobilisasi yang berbeda dengan kandidat lain dan berbeda dari cara lama untuk menarik partisipasi masyarakat berdasarkan karakteristik pemilih. Oleh karena itu model ini mampu menawarkan analisis analitik dalam program pendidikan politik efektif (Verba et al., 1995).

D. Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Partisipasi Politik Yang Berkualitas Melalui Pembentukan Perilaku Pemilih

Partisipasi politik menjadi sangat menentukan bagi kelangsungan dan kemajuan pemerintahan, terutama dalam konteks demokrasi modern. Demokrasi bukan hanya soal jumlah orang yang ikut memilih akan tetapi lebih pada kualitas partisipasi itu sendiri. Partisipasi yang bermakna

mebutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik serta kemampuan untuk berinteraksi secara rasional dengan proses politik yang ada. Oleh karena itu pendidikan politik memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pemilih yang cerdas, kritis, dan rasional melalui pendidikan politik pemilih tidak hanya memahami hak dan kewajibannya akan tetapi juga diberikan alat untuk mengevaluasi informasi politik yang diterima dan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman yang mendalam.

Pendidikan politik tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang struktur politik dan hak-hak warga negara tetapi juga untuk membentuk perilaku pemilih yang lebih rasional pemilih yang rasional akan memilih berdasarkan pertimbangan kebijakan yang diajukan oleh calon pemimpin bukan hanya berdasarkan afiliasi sosial seperti suku, agama, atau identitas kelompok lainnya. Pendidikan politik yang efektif dapat mengurangi polarisasi sosial dan memperkecil kemungkinan pemilih jatuh pada pilihan yang didasarkan pada identitas kelompok semata. Joseph Schumpeter dalam teori elit demokrasi menekankan bahwa demokrasi yang baik memerlukan pemilih yang tidak hanya banyak tetapi juga yang memahami dengan baik berbagai pilihan yang ada dan dampaknya terhadap masyarakat (Schumpeter, 1942) Hal ini berarti pendidikan politik harus menjadi bagian dari proses yang lebih besar untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil oleh para pemilih didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bukan hanya emosi atau loyalitas kelompok.

Selain itu pendidikan politik juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik di luar pemilu. Robert Putnam dalam bukunya *Making Democracy Work* menunjukkan bahwa partisipasi politik yang sehat dan berkualitas tidak hanya tercermin dalam pemilu tetapi juga dalam keterlibatan warga dalam proses baik itu pengambilan keputusan publik, pengawasan kebijakan, serta diskusi dan debat politik. Pendidikan politik yang baik menciptakan masyarakat yang aktif bukan hanya pada saat pemilu saja akan tetapi sepanjang waktu masyarakat yang tereduksi politiknya akan lebih terbuka untuk terlibat dalam berbagai bentuk partisipasi politik baik itu seperti diskusi publik, kampanye politik, atau pengawasan terhadap kebijakan yang diambil

oleh pemerintah (Putnam, 1993).

Pendidikan politik bukan hanya tentang mengenalkan individu pada teori-teori politik, tetapi juga memberikan keterampilan praktis untuk berpikir kritis terhadap berbagai fenomena politik yang ada di sekitar mereka. Pendidikan politik dapat mengajarkan individu untuk mengenali berbagai isu politik yang mungkin mempengaruhi hidup mereka serta bagaimana cara berpartisipasi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan hal ini akan memperkaya kualitas demokrasi dikarenakan semakin banyak individu yang mampu membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan benar maka semakin kecil kemungkinan terjadinya manipulasi atau kesalahan dalam pengambilan keputusan.

Sebagai negara dengan tantangan dalam meningkatkan kualitas demokrasinya Indonesia memerlukan sistem pendidikan politik yang lebih baik dan lebih menyeluruh terkhusus di daerah Sukoharjo. Pengenalan tentang sistem politik kemudian hak-hak kewarganegaraan dan bagaimana cara berpartisipasi yang tepat harus diberikan sejak dini yang mana Jika pendidikan politik berjalan dengan baik maka kualitas dari para pemilih juga akan meningkat yang pada gilirannya nanti akan meningkatkan kualitas pemilu dan pemerintahan secara keseluruhan dalam hal ini pendidikan politik menjadi fondasi yang sangat penting dalam memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar mencerminkan keinginan masyarakat yang teredukasi dan cerdas (Muhtadi, 2011).

Pendidikan politik juga membantu menciptakan pemilih yang lebih kritis terhadap informasi yang diterima. Di era informasi seperti saat ini di mana hoaks dan manipulasi politik sering kali berkembang para pemilih yang memiliki pemahaman yang baik tentang proses politik akan lebih mampu memilah informasi yang benar dan salah yang mana hal ini berperan penting dalam mengurangi ketergantungan pada informasi yang bias atau tidak akurat yang sering kali mempengaruhi hasil pemilu dan kebijakan pemerintah. Cass Sunstein dalam *Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media* menekankan pentingnya kesadaran politik dalam melawan hoaks yang beredar di media sosial dan bagaimana pendidikan politik dapat membantu pemilih untuk memilah informasi yang valid (Sunstein, 2017).

Secara keseluruhan pendidikan politik berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan individu dengan proses politik secara lebih bermakna dan produktif. Pendidikan politik yang baik tidak hanya melibatkan pemberian informasi tetapi juga mengajarkan individu untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang berdasarkan pemahaman mendalam. Pendidikan politik yang berkelanjutan akan menghasilkan pemilih yang lebih rasional yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas partisipasi politik dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan politik harus menjadi salah satu prioritas utama bagi negara-negara yang ingin memperkuat demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat yang dihasilkan adalah suara yang cerdas, informatif, dan berdasarkan pada pertimbangan yang matang.

Peran pendidikan politik dalam membangun partisipasi politik yang berkualitas sangat jelas. Ini tidak hanya tentang meningkatkan angka partisipasi dalam pemilu tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang teredukasi, cerdas, dan siap berkontribusi aktif dalam proses politik secara berkelanjutan. Sehingga, melalui pendidikan politik yang baik, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.●

BAB III PEMBAHASAN

A. Tren Peningkatan dan Penurunan Partisipasi Pemilih Sukoharjo dari Masa Ke Masa

Pilkada memiliki peran krusial dalam sistem pemerintahan daerah sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan secara demokratis. Melalui Pilkada, warga daerah dapat secara langsung menentukan Bupati/Walikota beserta wakilnya yang akan memimpin pemerintahan daerah selama lima tahun ke depan. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, di mana kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat setempat untuk menjamin akuntabilitas kepada publik. Pilkada yang demokratis dianggap mampu melegitimasi pemerintahan daerah, karena kepala daerah terpilih memperoleh mandat langsung dari rakyat. Dengan legitimasi tersebut, kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah daerah diharapkan selaras dengan aspirasi masyarakat lokal.

Di samping sebagai sarana legitimasi, Pilkada juga berfungsi mendorong sirkulasi elit politik secara teratur di daerah. Setiap periode Pilkada, para kandidat (baik petahana maupun penantang) menawarkan program dan visi untuk daerahnya, sehingga Pilkada menjadi ajang kompetisi gagasan pembangunan daerah. Bagi sistem politik lokal, kompetisi ini penting untuk regenerasi kepemimpinan dan memastikan pemerintahan daerah tidak stagnan. Dengan kata lain, Pilkada merupakan instrumen *checks and balances* di tingkat daerah, rakyat dapat “menggajar” petahana yang kinerjanya buruk dengan tidak memilihnya kembali, atau sebaliknya memberikan kesempatan kedua jika dinilai berhasil. Pemerintah daerah hasil Pilkada yang partisipatif cenderung memiliki hubungan keterwakilan yang lebih kuat dengan warganya, sehingga diharapkan tercipta pemerintahan lokal yang lebih responsif dan efektif.

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo, sebagai bagian dari Pilkada Jawa Tengah, mencerminkan dinamisasi proses demokrasi yang berlangsung di tingkat lokal. Dari Pilkada 2013 hingga 2024, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih. Berbagai faktor, seperti political mobilization, akses informasi, dan kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu, mempengaruhi seberapa besar antusiasme masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Sistem Pilkada langsung di Indonesia mulai diterapkan pasca reformasi, seiring terbitnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum itu, kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat. Sukoharjo melaksanakan Pilkada langsung pertamanya pada tahun 2010, menyusul berakhirnya masa jabatan Bupati sebelumnya. Pada Pilkada Bupati Sukoharjo 2010 tersebut, kontestasi diikuti beberapa pasangan calon dan menghasilkan kemenangan petahana (*incumbent*) Wardoyo Wijaya dengan perolehan suara terbanyak. Tingkat partisipasi pemilih saat Pilkada 2010 itu tercatat sekitar 65,8%, menandai partisipasi awal era Pilkada langsung di Sukoharjo.

Memasuki tahun 2015, pemerintah menerapkan kebijakan Pilkada Serentak secara nasional. Pilkada Serentak pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Sejak itu, jadwal Pilkada disinkronkan secara nasional setiap lima tahun sekali. Sukoharjo kembali menggelar Pilkada pada 2015 dan 2020 sesuai jadwal serentak tersebut.

Dengan demikian, hingga kini Sukoharjo telah melaksanakan Pilkada langsung setidaknya tiga kali (2010, 2015, 2020), dan selanjutnya akan mengikuti jadwal Pilkada serentak nasional (misalnya Pilkada serentak berikutnya pasca Pemilu 2024). Perkembangan ini menunjukkan konsistensi Sukoharjo dalam melaksanakan demokrasi lokal sesuai regulasi nasional. Berikut elaborasi lengkap tentang bagaimana penurunan serta peningkatan partisipasi di Kabupaten Sukoharjo

1. Pilkada 2013 (Pilgub Jawa Tengah)

Pilkada Jawa Tengah tahun 2013 menjadi salah satu momentum penting dalam dinamika politik lokal termasuk di Kabupaten

Sukoharjo. Pilkada ini tidak hanya menjadi ajang pemilihan kepala daerah tetapi juga mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo tercatat sebesar 61,4% yang berarti bahwa hampir sepertiga dari total pemilih terdaftar memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya dari 686.534 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) hanya 421.676 orang yang hadir di tempat pemungutan suara (TPS) dan memberikan suara mereka sementara 264.858 orang lainnya memilih untuk tidak berpartisipasi dalam proses demokrasi ini. Angka ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam partisipasi politik di tingkat lokal yang perlu diperhatikan secara serius.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat Sukoharjo pada saat itu. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi partisipasi pemilih adalah tingkat ketidakpedulian politik yang masih cukup tinggi terutama di wilayah pedesaan. Bagi sebagian masyarakat terutama yang tinggal di daerah pedesaan politik dianggap sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Isu-isu politik sering kali tidak dianggap memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan mereka sehingga tidak menumbuhkan rasa urgensi untuk terlibat dalam proses pemilihan.

Pandangan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh pemerintah dan penyelenggara pemilu. Kurangnya akses terhadap informasi politik membuat banyak masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai pentingnya pemilu dan bagaimana pemimpin yang mereka pilih dapat mempengaruhi kebijakan publik yang akan dijalankan.

Selain itu keterbatasan saluran komunikasi politik yang efektif juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Informasi mengenai pemilu, kandidat yang bertarung, serta program-program yang mereka tawarkan tidak tersebar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Media massa dan media sosial pada saat itu belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat sosialisasi yang dapat menjangkau lebih banyak pemilih. Sosialisasi yang terbatas ini membuat banyak

pemilih tidak mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai pentingnya menggunakan hak suara mereka dalam menentukan pemimpin daerah. Akibatnya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk bersikap apatis dan tidak menghadiri TPS pada hari pemungutan suara.

Selain faktor sosial dan komunikasi rendahnya partisipasi pemilih juga tidak terlepas dari kurangnya daya tarik dalam kontestasi politik yang berlangsung saat itu. Kompetisi politik dalam Pilkada 2013 di Jawa Tengah termasuk di Sukoharjo cenderung didominasi oleh figur-figur yang dianggap tidak cukup mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat secara luas. Kandidat yang muncul dalam pemilihan ini tidak mampu menawarkan gagasan atau program yang dapat membangkitkan antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Akibatnya banyak pemilih yang merasa bahwa siapapun kandidat yang terpilih tidak akan membawa perubahan signifikan terhadap kehidupan mereka. Sikap apatis ini semakin diperkuat oleh citra politik yang berkembang di masyarakat, di mana politik sering kali dianggap hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kepentingan masyarakat luas tidak menjadi prioritas utama.

Fenomena rendahnya partisipasi pemilih ini juga mencerminkan bahwa kesadaran politik masyarakat pada saat itu masih tergolong rendah. Pendidikan politik yang tidak berkelanjutan menyebabkan masyarakat tidak memahami secara mendalam mengenai peran strategis mereka dalam menentukan arah kebijakan daerah. Bagi sebagian besar masyarakat, pemilu masih dianggap sebagai sekadar ritual politik lima tahunan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Persepsi ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis pemilu, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan mereka terhadap sistem politik yang ada. Kurangnya kepercayaan ini bisa disebabkan oleh pengalaman masa lalu, di mana banyak pemimpin yang terpilih gagal memenuhi janji kampanye mereka atau justru terlibat dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini semakin memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan mengurangi motivasi mereka untuk

menggunakan hak suara dalam pemilu.

Selain itu rendahnya partisipasi pemilih juga berkaitan dengan kurangnya upaya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sosialisasi yang seharusnya menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat justru tidak berjalan secara maksimal. Informasi mengenai waktu pelaksanaan pemilu, mekanisme pemungutan suara, serta pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Kurangnya sosialisasi ini semakin memperdalam jarak antara masyarakat dan proses politik, yang pada akhirnya berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2013.

Di sisi lain, kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih. Banyak masyarakat, terutama yang berada di sektor informal, lebih memilih untuk bekerja daripada meluangkan waktu mereka untuk datang ke TPS dan memberikan suara. Bagi mereka, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dianggap lebih penting daripada berpartisipasi dalam pemilu yang hasilnya belum tentu memberikan perubahan langsung terhadap kondisi ekonomi mereka. Faktor ekonomi ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah.

Meski partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2013 tergolong rendah, fenomena ini memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya memperkuat pendidikan politik di tingkat lokal. Meningkatkan akses informasi politik bagi masyarakat, memperluas jangkauan sosialisasi pemilu, serta mendorong lahirnya kandidat-kandidat yang mampu merepresentasikan aspirasi masyarakat adalah langkah-langkah krusial dalam membangun partisipasi politik yang lebih inklusif di masa mendatang. Pemerintah dan penyelenggara pemilu harus berupaya lebih keras untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi politik dan memahami pentingnya peran mereka dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

partisipasi pemilih adalah dengan memanfaatkan teknologi digital dalam sosialisasi pemilu. Pemanfaatan media sosial dan platform digital lainnya dapat membantu menjangkau lebih banyak pemilih, terutama generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Selain itu, diperlukan program pendidikan politik yang berkelanjutan di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran politik sejak dini. Program ini harus dirancang sedemikian rupa agar mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem politik dan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Selain itu, partai politik dan kandidat yang bertarung dalam pemilu juga perlu memperbaiki strategi komunikasi mereka dengan masyarakat. Mereka harus mampu menawarkan program-program yang konkret dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan antusiasme pemilih untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kandidat yang mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat dan menunjukkan komitmen yang jelas terhadap perbaikan kondisi daerah akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari pemilih.

Dengan demikian, rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada 2013 tidak hanya menjadi cermin dari kondisi politik saat itu, tetapi juga menjadi tantangan bagi pembangunan demokrasi yang lebih partisipatif dan berkeadilan. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk memastikan bahwa partisipasi politik terus meningkat dan proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih baik di masa mendatang. Kesadaran politik yang lebih tinggi dan partisipasi yang lebih luas dalam pemilu akan menjadi kunci bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

2. Pilkada 2014 (Pilpres dan Pileg)

Tingkat partisipasi pemilih di Sukoharjo pada Pilpres 2014 dan Pileg 2014 menunjukkan gambaran yang kontras dibandingkan dengan Pilkada 2013. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih mencapai 76,8% dengan jumlah pemilih sebanyak 523.004 orang. Angka ini

mencerminkan tingginya minat masyarakat untuk terlibat dalam proses politik yang berskala nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Sukoharjo memiliki perhatian yang lebih besar terhadap pemilihan presiden dibandingkan dengan pemilihan kepala daerah. Keterlibatan aktif ini tidak hanya dipengaruhi oleh pentingnya posisi presiden dalam sistem pemerintahan, tetapi juga oleh dinamika politik nasional yang lebih intens dan dekat dengan keseharian masyarakat. Pilpres 2014 sendiri berlangsung dalam atmosfer politik yang sangat kompetitif, dengan figur-figur nasional yang memiliki daya tarik besar dan program kampanye yang secara langsung menyentuh berbagai isu kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, dalam Pileg 2014, tingkat partisipasi pemilih juga cukup tinggi, mencapai 75,4% dengan 510.238 pemilih. Angka ini menunjukkan bahwa pemilu legislatif memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat Sukoharjo. Dalam konteks ini, partisipasi masyarakat lebih dipengaruhi oleh kedekatan hubungan antara pemilih dan calon legislatif yang berasal dari daerah pemilihan yang sama. Keberadaan calon legislatif yang berasal dari komunitas lokal, serta jaringan sosial yang kuat, menjadi faktor penting yang mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, pemilu legislatif juga dianggap lebih relevan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di tingkat nasional, terutama terkait dengan kebijakan-kebijakan pembangunan yang langsung berdampak pada kehidupan sehari-hari.

Perbedaan signifikan dalam tingkat partisipasi antara Pilkada 2013, Pilpres 2014, dan Pileg 2014 mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih antusias terhadap pemilu yang memiliki dampak langsung dan luas terhadap kehidupan mereka. Isu-isu nasional yang mencakup kebijakan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan isu-isu lokal yang dianggap lebih sempit dan terbatas. Kampanye politik yang masif dan intensif pada tingkat nasional juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Media massa, baik televisi, radio, maupun media sosial, menjadi instrumen utama dalam menyebarkan informasi politik dan membentuk opini publik. Selain itu, tingginya partisipasi dalam Pilpres dan

Pileg juga mencerminkan bahwa masyarakat lebih tergerak untuk berpartisipasi ketika kompetisi politik berlangsung secara kompetitif dan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki popularitas tinggi. Debat publik, janji kampanye, dan pemberitaan media berhasil membangun narasi politik yang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih mereka. Hal ini berbanding terbalik dengan Pilkada lokal yang sering kali dianggap hanya melibatkan segelintir elit politik tanpa menawarkan perubahan yang signifikan.

Selain faktor kompetisi politik, aspek emosional dan psikologis juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Dalam Pilpres 2014, persaingan yang ketat antara dua pasangan calon presiden menciptakan polarisasi yang kuat di masyarakat. Polarisasi ini tidak hanya membentuk loyalitas politik yang tinggi tetapi juga mendorong individu untuk lebih aktif dalam menggunakan hak suaranya. Pemilih merasa bahwa suara mereka memiliki dampak yang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan nasional, terutama dalam konteks persaingan yang ketat dan hasil yang dianggap akan sangat menentukan masa depan bangsa. Berbeda dengan pemilu lokal yang cenderung dianggap kurang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan sehari-hari, pemilu nasional memunculkan rasa keterlibatan yang lebih tinggi di antara pemilih.

Sementara itu, dalam Pileg 2014, faktor kedekatan personal antara calon legislatif dan masyarakat setempat berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Calon legislatif sering kali memiliki hubungan yang lebih erat dengan konstituen mereka dibandingkan dengan kandidat dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini terlihat dari cara mereka melakukan kampanye yang lebih personal, seperti mendatangi rumah warga, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan memberikan bantuan kepada komunitas. Kedekatan ini menciptakan rasa keterikatan emosional yang mendorong masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sebagai bentuk dukungan terhadap calon yang mereka kenal secara langsung.

Namun, meskipun tingkat partisipasi dalam Pilpres dan Pileg 2014 cukup tinggi, masih terdapat tantangan yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan partisipasi politik secara keseluruhan. Salah satu

tantangan utama adalah ketimpangan informasi politik yang masih terjadi di berbagai kelompok masyarakat. Meskipun media sosial dan media massa telah berperan dalam meningkatkan kesadaran politik, masih banyak masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat dan terpercaya. Penyebaran hoaks dan kampanye negatif juga menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga kualitas partisipasi politik yang sehat dan berbasis informasi yang benar.

Selain itu, kendala teknis dalam penyelenggaraan pemilu juga turut mempengaruhi partisipasi pemilih. Beberapa pemilih mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses tempat pemungutan suara (TPS) akibat faktor geografis atau keterbatasan fasilitas pemilu. Hal ini terutama terjadi di daerah pedesaan yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih harus mencakup perbaikan dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih inklusif, seperti menyediakan TPS yang lebih mudah dijangkau dan meningkatkan transparansi dalam proses pemungutan suara.

Selain itu, faktor ekonomi juga turut berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Pada saat pemilu berlangsung, sebagian masyarakat yang bekerja di sektor informal atau harian lebih memilih untuk tetap bekerja dibandingkan meluangkan waktu untuk pergi ke TPS. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama bagi masyarakat dalam menentukan partisipasi mereka dalam pemilu. Oleh karena itu, kebijakan yang memberikan kemudahan bagi pemilih untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya tanpa mengorbankan aspek ekonomi perlu dipertimbangkan oleh penyelenggara pemilu.

Implikasi dari tingginya partisipasi dalam Pilpres dan Pileg 2014 adalah adanya dorongan bagi para kandidat dan partai politik untuk lebih serius dalam mendekati pemilih. Kesadaran bahwa masyarakat lebih tertarik pada pemilu yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan mereka seharusnya menjadi pelajaran bagi penyelenggara pemilu dan aktor politik dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif. Selain itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam

meningkatkan pendidikan politik agar masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemilu nasional tetapi juga dalam pemilu lokal yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Secara keseluruhan, tingginya partisipasi dalam Pilpres dan Pileg 2014 di Sukoharjo menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang lebih tinggi ketika mereka merasa pemilu tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Faktor kompetisi politik yang ketat, media massa yang berperan aktif, serta keterikatan emosional dengan kandidat menjadi faktor utama yang mendorong tingginya partisipasi. Namun, masih terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa partisipasi politik yang tinggi juga diiringi dengan peningkatan kualitas demokrasi yang lebih inklusif dan transparan.

3. Pilkada 2015 (Pilbup Sukoharjo)

Pilkada Sukoharjo 2015 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah politik lokal karena berlangsung dengan fenomena calon tunggal. Fenomena ini muncul sebagai dampak dari dinamika politik lokal yang tidak menghasilkan kompetisi antara dua atau lebih pasangan calon, sehingga hanya ada satu pasangan calon yang bertarung melawan kotak kosong. Dari total 672.591 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), sebanyak 445.164 pemilih menggunakan hak pilih mereka, menghasilkan tingkat partisipasi sebesar 66,2%. Meskipun angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Pilkada 2013, fenomena calon tunggal tetap menimbulkan perdebatan mengenai kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat.

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2015 secara langsung berpengaruh pada tingkat antusiasme masyarakat. Kurangnya alternatif pilihan sering kali membuat pemilih merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi sejak awal. Ketiadaan kompetisi antar-kandidat membuat masyarakat cenderung apatis, karena merasa bahwa pemilu hanya menjadi formalitas belaka. Pemilih yang sebelumnya mungkin menaruh harapan pada pergantian kepemimpinan atau kebijakan baru, justru kehilangan motivasi untuk

terlibat dalam proses demokrasi. Sikap apatis ini tercermin dari jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya, yaitu sebanyak 227.427 orang.

Namun, meskipun hanya ada satu calon, tingkat partisipasi sebesar 66,2% menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat perlahan mengalami peningkatan. Salah satu faktor yang mendorong partisipasi ini adalah upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo. KPU berperan penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa meskipun hanya ada satu calon, proses pemilihan tetap menjadi mekanisme penting dalam memastikan legitimasi pemimpin daerah. Kampanye sosialisasi yang menekankan pentingnya suara masyarakat dalam memberikan mandat kepada calon terpilih, meskipun tanpa lawan, menjadi salah satu instrumen yang berhasil menjaga partisipasi pemilih.

Selain itu, partisipasi pemilih juga dapat diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung jawab politik masyarakat. Bagi sebagian pemilih, menggunakan hak suara dalam kondisi calon tunggal dianggap sebagai cara untuk tetap terlibat dalam proses demokrasi, meskipun pilihan yang tersedia sangat terbatas. Keputusan ini menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat tidak semata-mata bergantung pada kompetisi, tetapi juga pada pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam sistem politik.

Tingginya partisipasi pemilih dalam kondisi calon tunggal juga dapat dihubungkan dengan hubungan personal antara pemilih dan calon yang bersangkutan. Calon tunggal dalam Pilkada Sukoharjo 2015 merupakan petahana yang memiliki jaringan sosial dan dukungan yang kuat di masyarakat. Jejaring sosial yang sudah terbangun dengan baik, ditambah dengan program-program pembangunan yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, menjadi salah satu faktor yang mendorong pemilih untuk tetap datang ke TPS. Selain itu, petahana biasanya memiliki keuntungan dalam segi akses terhadap sumber daya politik dan birokrasi yang dapat digunakan untuk memobilisasi dukungan masyarakat. Faktor ini menjadi salah satu alasan mengapa calon tunggal tetap mampu memperoleh legitimasi politik yang cukup kuat dari masyarakat, meskipun tanpa adanya

kompetisi yang signifikan.

Meski demikian, fenomena calon tunggal tetap menyisakan tantangan bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal. Tidak adanya kompetisi politik yang sehat dapat mempersempit ruang diskusi publik dan mengurangi tekanan bagi calon untuk menawarkan program-program yang inovatif dan solutif. Dalam sebuah kompetisi politik yang sehat, kehadiran lebih dari satu kandidat dapat mendorong terciptanya debat publik yang lebih substansial, di mana masyarakat dapat membandingkan visi, misi, serta rekam jejak para kandidat sebelum menentukan pilihannya. Namun, dalam konteks calon tunggal, diskusi politik cenderung minim karena tidak ada perdebatan yang melibatkan lebih dari satu kubu. Akibatnya, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengevaluasi calon berdasarkan perbandingan dengan kandidat lain.

Selain itu, keterbatasan pilihan juga berpotensi menurunkan kualitas partisipasi politik, karena masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang benar-benar sesuai dengan aspirasi mereka. Dalam kondisi ideal, pemilih seharusnya dapat menilai berbagai alternatif kandidat dan memilih yang paling sesuai dengan harapan mereka. Namun, dalam situasi calon tunggal, masyarakat hanya memiliki dua opsi: memilih calon yang tersedia atau memilih kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap keterbatasan pilihan. Pilihan terhadap kotak kosong seringkali dipahami sebagai ekspresi ketidakpuasan politik, tetapi dalam banyak kasus, hasil akhirnya tetap mengarah pada kemenangan calon tunggal karena minimnya mobilisasi politik dari oposisi atau pihak-pihak yang menginginkan perubahan.

Pilkada Sukoharjo 2015 memberikan pelajaran penting bahwa partisipasi pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kandidat, tetapi juga oleh kualitas sosialisasi, tingkat kesadaran politik masyarakat, dan hubungan sosial antara kandidat dan pemilih. Meskipun fenomena calon tunggal seringkali dipandang sebagai anomali dalam demokrasi, partisipasi yang cukup tinggi di Sukoharjo menunjukkan bahwa masyarakat tetap memiliki kesadaran politik yang terus tumbuh. Kesadaran ini dapat ditafsirkan sebagai bentuk penerimaan terhadap

calon yang ada, atau sebagai bagian dari tanggung jawab politik warga negara dalam mendukung jalannya pemerintahan daerah.

Namun, di sisi lain, partisipasi yang cukup tinggi dalam kondisi calon tunggal juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai seberapa kompetitif sistem politik lokal dalam menciptakan kader-kader pemimpin baru. Jika hanya ada satu calon yang maju dalam pemilu, hal ini bisa menjadi indikasi adanya dominasi politik yang terlalu kuat dari satu kelompok atau partai, sehingga menutup peluang bagi kandidat lain untuk ikut berkompetisi. Dominasi politik yang terlalu kuat dapat melemahkan sistem demokrasi secara keseluruhan karena mengurangi dinamika politik yang sehat dan mendorong terbentuknya politik oligarki di tingkat daerah.

Oleh karena itu, ke depan, upaya peningkatan partisipasi politik perlu dibarengi dengan penguatan kompetisi politik yang sehat, serta sosialisasi yang menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menentukan masa depan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong partisipasi lebih luas dari berbagai elemen masyarakat dalam proses pencalonan kepala daerah. Partai politik, sebagai institusi utama dalam rekrutmen politik, juga memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pemilihan kepala daerah tetap kompetitif dan memberikan alternatif yang lebih luas bagi pemilih.

Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses politik juga menjadi aspek penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Jika masyarakat merasa bahwa sistem politik dijalankan dengan adil dan terbuka, maka kemungkinan besar tingkat partisipasi pemilih akan tetap tinggi, meskipun dalam kondisi calon tunggal. KPU dan lembaga penyelenggara pemilu lainnya juga harus terus meningkatkan strategi komunikasi politik agar masyarakat memahami pentingnya pemilu sebagai sarana untuk menegakkan demokrasi di tingkat lokal.

Dengan demikian, Pilkada Sukoharjo 2015 menjadi contoh yang menarik dalam studi politik lokal. Di satu sisi, fenomena calon tunggal menunjukkan adanya tantangan dalam kompetisi politik di tingkat daerah, tetapi di sisi lain, partisipasi yang tetap tinggi menunjukkan

bahwa kesadaran politik masyarakat masih terjaga. Hal ini menjadi refleksi bagi para pemangku kepentingan politik bahwa demokrasi yang sehat tidak hanya bergantung pada jumlah kandidat yang bertarung, tetapi juga pada kualitas kompetisi, transparansi politik, dan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka.

4. Pilkada 2018 (Pilgub Jawa Tengah)

Pilkada Jawa Tengah 2018, yang juga mencakup Pilkada di Kabupaten Sukoharjo, mencatatkan peningkatan signifikan dalam tingkat partisipasi pemilih dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 mencapai 73,5%, dengan jumlah pemilih sebanyak 657.563 orang. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang lebih tinggi dalam menggunakan hak pilih mereka, menandakan adanya perubahan dalam dinamika politik lokal yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, politik, dan ekonomi.

Salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya partisipasi pemilih adalah adanya kompetisi politik yang lebih ketat di tingkat Pilgub Jawa Tengah. Pilkada 2018 menghadirkan dua pasangan calon gubernur yang memiliki popularitas tinggi dan rekam jejak yang dikenal luas oleh masyarakat. Kompetisi antara Ganjar Pranowo-Taj Yasin dan Sudirman Said-Ida Fauziah menarik perhatian masyarakat melalui gagasan yang ditawarkan serta strategi kampanye yang intensif. Persaingan yang ketat ini menciptakan dinamika politik yang lebih menarik, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka memiliki pengaruh nyata terhadap hasil pemilu. Kontras antara visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh kedua pasangan calon memberikan ruang bagi masyarakat untuk membandingkan dan menentukan pilihan politik yang sesuai dengan aspirasi mereka.

Selain itu, kampanye politik yang lebih masif dan terarah juga berperan penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Para pasangan calon memanfaatkan berbagai saluran komunikasi, mulai dari media massa, media sosial, hingga pertemuan langsung dengan masyarakat untuk menyampaikan program kerja dan menjangkau dukungan. Kehadiran media sosial sebagai instrumen kampanye yang

semakin dominan memperluas jangkauan informasi politik, terutama di kalangan pemilih muda yang sebelumnya cenderung kurang aktif dalam proses pemilu. Kampanye yang intensif ini tidak hanya meningkatkan kesadaran politik masyarakat tetapi juga membangun rasa keterlibatan langsung dalam proses politik.

Isu-isu yang diangkat dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 juga menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Tema-tema seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian utama masyarakat, terutama di daerah-daerah yang menghadapi tantangan pembangunan. Isu-isu tersebut dianggap memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menentukan pemimpin yang mampu merealisasikan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Selain itu, faktor lainnya yang turut mendorong peningkatan partisipasi adalah keberhasilan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melakukan sosialisasi pemilu. KPU Sukoharjo bersama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemuda, secara aktif melakukan edukasi politik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, baik cetak maupun digital, serta melalui kegiatan komunitas yang melibatkan masyarakat secara langsung. Hal ini memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat bahwa pemilu bukan sekadar proses formalitas, tetapi merupakan mekanisme utama dalam menentukan pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan kebijakan daerah.

Tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilgub Jawa Tengah 2018 menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya hak suara mereka dalam menentukan arah kebijakan daerah. Partisipasi politik yang tinggi juga mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu yang berlangsung secara demokratis dan transparan. Faktor ini juga menunjukkan bahwa ketika pemilih diberikan pilihan yang kompetitif dan menarik, mereka lebih cenderung

untuk berpartisipasi dalam pemilu. Hal ini menggarisbawahi bahwa salah satu faktor penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah adanya kandidat yang memiliki kapasitas dan kredibilitas yang diakui oleh masyarakat.

Selain itu, tingginya tingkat partisipasi dalam Pilkada 2018 juga dapat dihubungkan dengan meningkatnya kesadaran politik di kalangan masyarakat. Masyarakat mulai memahami bahwa pemilihan kepala daerah bukan hanya sekadar ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dalam menentukan kebijakan publik yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Kesadaran ini semakin diperkuat dengan adanya diskusi publik, debat kandidat, dan berbagai forum yang memungkinkan masyarakat untuk lebih memahami visi dan misi para calon gubernur. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya terlibat sebagai pemilih pasif, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang lebih substansial.

Meskipun Pilkada Jawa Tengah 2018 mencatatkan tingkat partisipasi yang tinggi, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam menjaga tren positif ini. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga konsistensi partisipasi politik ini, terutama pada pemilu-pemilu lokal yang sering kali dianggap kurang menarik oleh masyarakat. Pemilu lokal, seperti pemilihan bupati dan walikota, sering kali mengalami penurunan partisipasi dibandingkan dengan pemilihan gubernur atau presiden. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, minimnya kompetisi, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi kepala daerah dalam pemerintahan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya yang lebih strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan politik masyarakat. Pendidikan politik yang berkelanjutan akan membantu masyarakat memahami bahwa setiap suara yang mereka berikan memiliki dampak langsung terhadap kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, peningkatan transparansi dalam proses pemilu juga menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Keberadaan sistem pemilu yang terbuka dan adil

akan memberikan jaminan bahwa setiap suara benar-benar dihitung dan dihargai dalam proses demokrasi.

Langkah lainnya yang dapat dilakukan adalah mendorong munculnya kandidat yang lebih beragam dan memiliki rekam jejak yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Keberagaman kandidat yang berkualitas akan memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga meningkatkan minat mereka dalam berpartisipasi dalam pemilu. Selain itu, mekanisme pemilu yang lebih inklusif, seperti keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pencalonan dan perumusan kebijakan, juga dapat memperkuat demokrasi di tingkat lokal.

Secara keseluruhan, Pilkada Jawa Tengah 2018 memberikan gambaran yang positif mengenai perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Tingginya tingkat partisipasi pemilih menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu sebagai mekanisme utama dalam menentukan kepemimpinan daerah. Ke depan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan partisipasi politik harus terus dilakukan melalui penguatan kompetisi politik, peningkatan transparansi, serta sosialisasi yang lebih efektif. Dengan demikian, demokrasi lokal dapat berkembang menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara luas.

5. Pemilu 2019 (Pilpres)

Tingkat partisipasi pemilih di Sukoharjo pada Pilpres 2019 mencapai angka tertinggi dalam satu dekade terakhir, yaitu sebesar 82,6%, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya sebanyak 563.185 orang dari total 682.083 pemilih yang terdaftar. Angka ini menunjukkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat Sukoharjo dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu nasional. Peningkatan tajam dalam partisipasi ini tidak hanya merefleksikan dinamika politik nasional yang semakin kompetitif, tetapi juga menunjukkan semakin kuatnya kesadaran politik masyarakat mengenai pentingnya pemilu dalam menentukan arah kebijakan negara.

Salah satu faktor utama yang mendorong tingginya partisipasi

adalah kompetisi politik yang sangat sengit antara dua pasangan calon presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pilpres 2019 merupakan kelanjutan dari rivalitas politik yang sudah terjadi sejak Pilpres 2014, sehingga menciptakan polarisasi politik yang lebih kuat di masyarakat. Polarisasi ini membuat masyarakat merasa bahwa suara mereka memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu dan arah kebijakan nasional. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya melihat pemilu sebagai rutinitas politik, tetapi sebagai kesempatan untuk menentukan pemimpin yang mampu merepresentasikan kepentingan mereka.

Kampanye politik yang masif dan intensif juga menjadi faktor krusial dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Kedua pasangan calon melakukan kampanye secara besar-besaran, baik melalui pertemuan langsung dengan masyarakat maupun melalui media massa dan media sosial. Media sosial memainkan peran yang sangat signifikan dalam menyebarluaskan informasi politik dan membangun narasi kampanye. Isu-isu nasional seperti pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, lapangan kerja, dan pemberantasan korupsi menjadi bahan kampanye yang dominan, sehingga menarik perhatian masyarakat yang merasa bahwa kebijakan-kebijakan tersebut memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Selain itu, kehadiran media sosial dalam Pilpres 2019 menjadi semakin dominan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih banyak terpapar informasi politik melalui platform digital seperti Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Diskusi politik yang semakin marak di media sosial juga mendorong keterlibatan masyarakat dalam memahami visi dan misi para calon. Meskipun maraknya berita hoaks menjadi tantangan dalam pemilu ini, keberadaan media sosial tetap berkontribusi dalam memperluas kesadaran politik, terutama di kalangan pemilih muda.

Tingginya partisipasi pemilih juga menunjukkan bahwa masyarakat lebih tergerak untuk berpartisipasi dalam pemilu yang dianggap memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka. Pemilu nasional dinilai lebih relevan dibandingkan Pilkada lokal karena kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah pusat memiliki cakupan

yang lebih luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Persepsi ini membuat masyarakat merasa bahwa pilihan presiden akan menentukan masa depan bangsa, sehingga mereka terdorong untuk berpartisipasi secara aktif.

Keterlibatan masyarakat dalam Pilpres 2019 juga didorong oleh adanya peran berbagai organisasi masyarakat dan lembaga independen yang aktif melakukan sosialisasi pemilu. Kegiatan sosialisasi ini melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi pemuda, komunitas akademik, dan kelompok keagamaan yang turut berperan dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Program pendidikan pemilih yang menargetkan kelompok pemilih pemula dan perempuan berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan mereka.

Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo juga memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi pemilih dengan melakukan sosialisasi pemilu secara intensif. KPU menggunakan berbagai metode untuk menjangkau masyarakat, mulai dari kampanye melalui media lokal, pemasangan spanduk dan baliho di berbagai lokasi strategis, hingga penggunaan media sosial untuk menyebarluaskan informasi tentang tata cara pemungutan suara. Sosialisasi yang dilakukan secara masif ini membantu masyarakat memahami pentingnya menggunakan hak pilih mereka dalam menentukan masa depan negara.

Faktor lain yang turut meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilpres 2019 adalah efektivitas sistem pemilu yang diterapkan. KPU berhasil meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan suara dengan menyediakan fasilitas yang memadai di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Antrean yang lebih teratur, pengawasan yang lebih ketat, serta peningkatan jumlah petugas pemilu turut berkontribusi dalam memastikan proses pemilu berjalan lancar dan minim hambatan. Kepercayaan masyarakat terhadap transparansi proses pemilu juga meningkat, yang pada akhirnya mendorong lebih banyak pemilih untuk datang ke TPS dan menggunakan hak suaranya.

Tingginya partisipasi pemilih dalam Pilpres 2019 di Sukoharjo menegaskan bahwa masyarakat cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu yang bersifat nasional dibandingkan dengan pemilu lokal. Hal ini menunjukkan bahwa kompetisi politik yang ketat, isu-isu nasional yang relevan, dan kampanye yang efektif memiliki daya tarik yang lebih besar dibandingkan dengan pemilu di tingkat daerah. Namun, fenomena ini juga menjadi tantangan bagi penguatan demokrasi di tingkat lokal, di mana pemilu daerah sering kali dianggap kurang menarik dan tidak berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Ke depan, peningkatan partisipasi politik di tingkat lokal membutuhkan upaya yang lebih besar dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemilu daerah. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan relevansi isu-isu lokal dalam kampanye politik. Para calon kepala daerah harus mampu mengangkat isu-isu yang benar-benar berkaitan dengan kepentingan masyarakat setempat, seperti peningkatan layanan kesehatan, perbaikan infrastruktur daerah, dan penyediaan lapangan kerja. Dengan demikian, masyarakat akan merasa bahwa pemilu daerah memiliki dampak langsung terhadap kehidupan mereka, sehingga mereka lebih terdorong untuk berpartisipasi.

Selain itu, edukasi politik yang berkelanjutan juga menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pemilu mendatang. Program pendidikan politik yang melibatkan sekolah, universitas, dan komunitas masyarakat perlu diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam proses demokrasi. Transparansi dalam penyelenggaraan pemilu juga perlu terus dijaga agar masyarakat tetap memiliki kepercayaan terhadap sistem pemilu dan terdorong untuk berpartisipasi.

Tingginya partisipasi dalam Pilpres 2019 memberikan pelajaran penting bahwa masyarakat akan lebih aktif berpartisipasi ketika mereka merasa bahwa pilihan politik yang mereka buat benar-benar memiliki dampak terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, menciptakan pemilu yang kompetitif, transparan, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dalam

memperkuat demokrasi di Indonesia. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pilpres 2019 dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan, dalam pemilu-pemilu berikutnya, baik di tingkat nasional maupun lokal.

6. Pilkada 2020 (Pilbup Sukoharjo)

Pilkada Sukoharjo 2020 mencatat tingkat partisipasi pemilih sebesar 78,5%, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 520.335 orang dari total 662.278 pemilih terdaftar. Capaian ini tergolong tinggi, terutama jika dibandingkan dengan fenomena Pilkada sebelumnya yang menunjukkan bahwa calon tunggal sering kali berdampak pada apatisisme pemilih. Namun, tingginya partisipasi ini memberikan indikasi bahwa masyarakat Sukoharjo semakin menyadari pentingnya menggunakan hak pilih mereka, meskipun pilihan politik yang tersedia sangat terbatas.

Tingginya partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Salah satu faktor penting adalah kampanye politik yang lebih terstruktur dan masif, terutama melalui pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo. KPU secara aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai media, mulai dari media cetak, elektronik, hingga media sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan hak suara, meskipun hanya dihadapkan pada satu pasangan calon. Edukasi politik ini menekankan bahwa suara masyarakat tetap memiliki arti penting dalam menjaga legitimasi proses demokrasi, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui kotak suara.

Selain sosialisasi yang masif, akses informasi yang semakin terbuka melalui media sosial juga turut berperan dalam mendorong partisipasi pemilih. Media sosial menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi mengenai tahapan pemilu, visi-misi calon, serta pentingnya partisipasi politik. Platform seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp digunakan tidak hanya oleh penyelenggara pemilu, tetapi juga oleh masyarakat untuk saling berbagi informasi dan membangun kesadaran politik kolektif. Kemudahan akses informasi ini membantu

mempersempit kesenjangan pengetahuan politik antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam proses pemilu.

Peningkatan partisipasi ini juga dapat dikaitkan dengan semakin kuatnya budaya demokrasi di kalangan masyarakat Sukoharjo. Meskipun pilihan politik yang tersedia terbatas, masyarakat tetap merasa memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Kesadaran ini tumbuh seiring dengan meningkatnya pemahaman bahwa pemilu merupakan salah satu instrumen penting untuk menyalurkan aspirasi dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. Selain itu, adanya kolom “tidak setuju” (kotak kosong) dalam surat suara memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengekspresikan ketidakpuasan terhadap calon tunggal, sehingga mendorong partisipasi meskipun pilihan yang tersedia terbatas.

Peran aktif kelompok masyarakat sipil dan komunitas lokal juga menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Berbagai kelompok masyarakat, termasuk organisasi pemuda, organisasi perempuan, dan kelompok keagamaan, turut serta dalam kampanye sadar memilih. Kegiatan diskusi, penyuluhan, dan simulasi pemilu yang melibatkan masyarakat secara langsung berhasil memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemilu dan hak pilih. Tingginya partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2020 memberikan gambaran bahwa masyarakat semakin memahami esensi demokrasi, di mana pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memperkuat legitimasi pemerintahan. Namun, meskipun partisipasi yang tinggi menjadi capaian positif, fenomena calon tunggal tetap menimbulkan tantangan dalam memperkuat kualitas demokrasi lokal.

7. Pilkada 2024 (Pilbup Sukoharjo)

Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tetap stabil di angka 74,3%, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 508.592 orang. Stabilitas tingkat partisipasi ini menjadi indikasi bahwa kesadaran politik masyarakat Sukoharjo semakin matang, meskipun di tengah fenomena calon

tunggal yang terjadi di beberapa daerah. Partisipasi yang relatif tinggi ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo, terutama dalam memanfaatkan platform digital sebagai media utama dalam menyampaikan informasi pemilu. Salah satu faktor utama yang mendorong stabilitas partisipasi pemilih adalah kampanye yang lebih inklusif dan partisipatif. KPU Sukoharjo tidak hanya menasar kelompok pemilih tradisional, tetapi juga memperluas jangkauan kampanye kepada pemilih muda, perempuan, dan kelompok marginal melalui berbagai media sosial dan aplikasi digital. Kampanye ini menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab demokratis, sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemilu dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Akses informasi yang lebih luas melalui platform digital juga memainkan peran penting dalam menjaga partisipasi pemilih. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp memungkinkan informasi mengenai tahapan pemilu, visi-misi calon, dan tata cara pemungutan suara dapat tersebar dengan cepat dan merata. KPU Sukoharjo juga aktif menggelar diskusi daring, webinar, dan simulasi pemilu berbasis digital untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik. Selain itu, meningkatnya partisipasi juga didukung oleh peran komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam menyebarkan informasi pemilu dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Keterlibatan aktif kelompok masyarakat ini berhasil membangun kesadaran politik kolektif, terutama di kalangan pemilih pemula dan perempuan.

Meskipun fenomena calon tunggal sering kali dihubungkan dengan rendahnya tingkat partisipasi, Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya pemilu sebagai mekanisme legitimasi demokrasi. Kesadaran ini menjadi bukti bahwa masyarakat tidak hanya melihat pemilu sebagai ajang memilih pemimpin, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan. Ke depan, tantangan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Sukoharjo adalah

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

memperkuat kualitas kompetisi politik dan memperluas ruang partisipasi masyarakat di luar momentum pemilu. Edukasi politik yang berkelanjutan, transparansi dalam proses pemilu, serta fasilitasi akses informasi yang lebih luas menjadi langkah strategis dalam membangun demokrasi lokal yang lebih inklusif dan partisipatif.

Tabel Tren Partisipasi Pemilih Sukoharjo 2013 - 2024

Tahun	Jenis Pemilihan	Jumlah Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Tidak Menggunakan Hak Pilih	Partisipasi Pemilih (%)	Tidak Menggunakan Hak Pilih (%)
2013	Pilgub Jateng	686534	421676	264858	61,4%	38,6%
2014	Pilpres	680790	523004	157786	76,8%	23,2%
2014	Pileg	676540	510238	166302	75,4%	24,6%
2015	Pilbup	672591	445164	227427	66,2%	33,8%
2018	Pilgub Jateng	657563	483401	174162	73,5%	26,5%
2019	Pilpres	682083	563185	118898	82,6%	17,4%
2020	Pilbup	663059	520335	142724	78,5%	21,5%
2024	Pilbup	684491	508592	175899	74,3%	25,7%

Jika melihat data historis Pilkada di Sukoharjo, partisipasi pemilih cenderung lebih fluktuatif dan umumnya lebih rendah dibanding pemilu nasional. Pada Pilkada Bupati Sukoharjo 2010, sekitar 65-66% pemilih terdaftar menggunakan hak pilih. Lima tahun kemudian, Pilkada Sukoharjo 2015 menunjukkan partisipasi yang masih relatif rendah; laporan Panwaslu mencatat hanya sekitar 66,17% pemilih yang menggunakan hak suaranya pada Pilkada 9 Desember 2015. Artinya, sepertiga lebih warga Sukoharjo yang memiliki hak pilih tidak datang ke TPS pada 2015. Menariknya, tren ini berbalik pada Pilkada Sukoharjo 2020. Di tengah suasana pandemi Covid-19, Pilkada 2020 di Sukoharjo justru mencatat kenaikan partisipasi hingga mencapai 78,8%. Angka tersebut melampaui target partisipasi yang biasanya dipatok ~75% dan jauh lebih tinggi daripada partisipasi Pilkada

sebelumnya. Peningkatan ini menjadikan Pilkada 2020 sebagai Pilkada dengan partisipasi tertinggi dalam sejarah Sukoharjo, mendekati angka partisipasi pemilu nasional.

Tren partisipasi dalam Pilkada Sukoharjo juga dapat dibandingkan dengan partisipasi pada pemilihan tingkat provinsi (Pilgub) yang melibatkan Sukoharjo. Pada Pilkada Gubernur Jawa Tengah 2013, partisipasi pemilih di Sukoharjo relatif rendah, hanya sekitar 57,9%. Kemudian saat Pilgub Jateng 2018, partisipasi di Sukoharjo naik signifikan menjadi sekitar 70,9%. Kenaikan ini sejalan dengan tren provinsi secara keseluruhan, di mana Pilgub 2018 memang lebih menarik minat pemilih dibanding 2013. Secara umum, data historis menunjukkan bahwa partisipasi pemilih Sukoharjo pada ajang Pilpres/ Pileg nasional cenderung lebih tinggi daripada pada Pilkada lokal. Misalnya, partisipasi pemilih Sukoharjo dalam Pilpres 2019 mencapai sekitar 82,6%(sejalan dengan tren nasional), sedangkan pada Pilkada 2015 hanya di kisaran pertengahan 60% seperti disebutkan tadi. Perbedaan ini mengindikasikan adanya pola bahwa warga lebih bersemangat menggunakan hak pilih untuk pemilihan nasional ketimbang pemilihan lokal, meskipun pola ini tidak mutlak dan bisa dipengaruhi berbagai faktor.

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat perbandingan jelas antara tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres, Pileg, dan Pilkada (khususnya di Sukoharjo). Pertama, partisipasi dalam Pilpres (pemilihan presiden) cenderung paling tinggi. Secara nasional Pilpres 2019 mencapai 81,9%, dan di Sukoharjo angkanya serupa di atas 80%. Pilpres biasanya menyedot perhatian besar karena menyangkut pemimpin nasional dan seringkali dibarengi polarisasi dan kampanye masif, sehingga mendorong lebih banyak orang untuk datang ke TPS.

Kedua, partisipasi dalam Pileg (pemilihan legislatif) besarnya hampir sebanding dengan Pilpres, apalagi sejak 2019 ketika Pileg dan Pilpres dilaksanakan serentak di hari yang sama. Pada 2019, partisipasi Pileg nasional 81,7% nyaris sama dengan Pilpres. Namun pada 2014 saat Pileg terpisah dari Pilpres, partisipasi Pileg (75,1%) lebih rendah dibanding Pilpres 2014 (69,6% di Pilpres putaran pertama)

Di Sukoharjo sendiri, partisipasi pemilih Pileg 2019 untuk DPR RI

tercatat sekitar 82,3%, menunjukkan kesetaraan minat pemilih dalam memilih presiden maupun wakil rakyat ketika pemilu diselenggarakan serentak. Jika tidak serentak, partisipasi Pileg cenderung sedikit di bawah Pilpres karena daya tarik kontestasinya berbeda, Pilpres lebih personal antara dua kandidat pasangan calon, sementara Pileg melibatkan banyak calon legislatif dan partai sehingga mungkin kurang greget bagi sebagian pemilih.

Ketiga, partisipasi dalam Pilkada (pemilihan kepala daerah) umumnya paling rendah di antara tiga jenis pemilihan tersebut. Di banyak daerah, Pilkada kabupaten/kota kerap hanya diikuti oleh 60-70% pemilih atau bahkan kurang. Kasus Sukoharjo sebelum 2020 mencerminkan hal ini: Pilkada 2010 dan 2015 berada di kisaran 2/3 pemilih menggunakan hak suara. Faktor lokal mempengaruhi, misalnya tingkat kedekatan pemilih dengan calon atau persepsi bahwa Pilkada “kurang penting” dibanding pemilu nasional. Meski demikian, Pilkada 2020 Sukoharjo menjadi pengecualian dengan partisipasi mendekati 79% – mendekati partisipasi Pilpres – yang menunjukkan bahwa di kondisi tertentu gap partisipasi pusat-daerah bisa diperkecil.

Secara ringkas, Pilpres biasanya mengundang partisipasi tertinggi, disusul Pileg, lalu Pilkada di urutan terakhir. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Sukoharjo, tetapi juga di banyak daerah lain. Misalnya, sejumlah Pilkada serentak 2015 di berbagai daerah dilaporkan hanya mencapai partisipasi 50-65%, padahal pada Pemilu 2014 sebelumnya partisipasi nasional masih sekitar 70-75%. Hal ini mengindikasikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu di tingkat daerah untuk meningkatkan animo pemilih dalam Pilkada.

B. Faktor yang Mempengaruhi Tren Partisipasi Pilkada Sukoharjo

Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan tren penurunan partisipasi dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya. Sebagaimana data resmi yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo, Syakbani Eko Raharjo, mencatat bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024 mencapai 74,3%, yang mengalami penurunan dibandingkan dengan Pilkada 2020 sebesar 78,8% (Kab-sukoharjo.kpu.go.id, 4 Desember 2024).

Fenomena ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi minat pemilih dalam menggunakan hak pilihnya. Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan ini adalah mekanisme pemilihan dengan kotak kosong, yang membuat tingkat persaingan politik menjadi rendah.

Fenomena ini diperkuat berdasarkan data yang diperoleh dari detik.com (2024) yang menunjukkan bahwa dalam Pilkada Sukoharjo 2024, kotak kosong berhasil meraih kemenangan di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di TPS 03 Palur, Kecamatan Mojolaban, kotak kosong memperoleh 225 suara, sementara pasangan Etik-Sapto hanya mendapatkan 180 suara. Keunggulan kotak kosong juga terjadi di TPS 04 Pucangan, Kecamatan Kartasura, dengan perolehan 221 suara, mengalahkan Etik-Sapto yang hanya memperoleh 153 suara. Situasi serupa terjadi di TPS 006 Wonorejo, Kecamatan Polokarto, di mana kotak kosong mendapatkan 189 suara, unggul dari Etik-Sapto yang hanya meraih 165 suara.

Kotak kosong juga unggul tipis dari pasangan calon tunggal di TPS lain. Misalnya, di TPS 05 Makamhaji, pasangan Etik-Sapto memperoleh 205 suara, sedangkan kotak kosong meraih 215 suara. Sementara itu, di TPS 01 Mulur, kotak kosong meraih 231 suara, lebih tinggi dibandingkan Etik-Sapto yang hanya mendapatkan 196 suara. Di TPS 04 Kelurahan Kartasura, pasangan Etik-Sapto mengumpulkan 134 suara, tetapi kalah dari kotak kosong yang memperoleh 160 suara. Di TPS 24 Cemani, Kecamatan Grogol, kotak kosong kembali unggul dengan 169 suara, sementara Etik-Sapto hanya meraih 126 suara. Tren serupa juga terjadi di TPS 10 Kartasura, dimana kotak kosong memperoleh 174 suara, lebih banyak dibandingkan Etik-Sapto yang hanya mendapatkan 148 suara.

Selanjutnya, di TPS 25 Cemani, Kecamatan Grogol, kotak kosong kembali mengungguli pasangan calon dengan 150 suara, sedangkan Etik-Sapto hanya memperoleh 118 suara. Keunggulan kotak kosong juga terlihat di TPS 19 Kartasura, dengan 123 suara, mengalahkan Etik-Sapto yang hanya memperoleh 117 suara. Di TPS 002 Demakan, Kecamatan Mojolaban, kotak kosong mencatat kemenangan dengan 209 suara, sementara pasangan Etik-Sapto hanya memperoleh 160 suara. Keunggulan kotak kosong di berbagai TPS tersebut mencerminkan

sikap kritis masyarakat terhadap sistem pemilihan yang hanya menghadirkan satu pasangan calon, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya keterlibatan pemilih dalam memberikan dukungan terhadap kandidat yang tersedia. Tingginya perolehan suara untuk kotak kosong dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpuasan publik terhadap terbatasnya opsi politik yang diberikan dalam pemilu ini. Banyak pemilih tampaknya merasa bahwa mekanisme pemilihan semacam ini tidak cukup merepresentasikan aspirasi mereka, sehingga memilih untuk mengekspresikan ketidaksetujuan mereka melalui suara kosong.

Fenomena ini juga dapat diartikan sebagai bentuk protes politik dari masyarakat yang menginginkan adanya kompetisi yang lebih sehat dalam pemilu. Dalam demokrasi yang ideal, pemilih seharusnya memiliki lebih dari satu alternatif kandidat yang dapat mereka pertimbangkan berdasarkan rekam jejak, visi-misi, serta kebijakan yang diusung. Namun, ketika mereka hanya diberikan satu pilihan kandidat tanpa adanya kompetitor, sebagian pemilih cenderung menganggap bahwa pemilu ini sekadar formalitas dan tidak menawarkan peluang nyata bagi perubahan kepemimpinan yang lebih inklusif. Oleh karena itu, memilih kotak kosong menjadi strategi yang digunakan masyarakat untuk menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keterbatasan pilihan politik yang diberikan dalam Pilkada Sukoharjo 2024.

Selain sebagai ekspresi protes, tingginya suara kotak kosong di beberapa TPS juga dapat mencerminkan meningkatnya apatisisme politik di kalangan pemilih. Beberapa warga yang merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi sejak awal mungkin memilih untuk tidak datang ke TPS sama sekali, sementara mereka yang tetap datang tetapi tidak puas dengan pilihan yang ada akhirnya memilih kotak kosong sebagai bentuk partisipasi yang tetap memberikan pesan politis. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun partisipasi dalam pemilu tetap berlangsung, sebagian masyarakat merasa bahwa keterlibatan mereka dalam proses ini tidak membawa dampak yang signifikan terhadap arah pemerintahan di masa depan. Dominasi suara kotak kosong dalam beberapa TPS di Pilkada Sukoharjo 2024 bukan sekadar angka statistik, tetapi juga menjadi sinyal kuat bahwa sebagian masyarakat menghendaki sistem politik yang lebih kompetitif dan inklusif. Fenomena ini menunjukkan pentingnya

reformasi dalam proses pencalonan kepala daerah agar lebih terbuka, kompetitif, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dapat terus terjaga dan tingkat partisipasi politik di masa mendatang dapat meningkat.

Menurut Huntington dan Nelson (1994), masyarakat lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pemilu ketika mereka merasa bahwa pilihan mereka dapat memengaruhi hasil pemilihan. Dalam Pilkada dengan kompetisi yang ketat, pemilih memiliki insentif lebih besar untuk datang ke TPS karena suara mereka memiliki dampak langsung dalam menentukan pemenang. Sebaliknya, ketika hanya ada satu calon yang bertarung melawan kotak kosong, sebagian besar pemilih mungkin merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi, sehingga mereka kehilangan motivasi untuk berpartisipasi.

Pemikiran Samuel P. Huntington tentang partisipasi politik memberikan kerangka yang relevan dalam memahami dinamika naik turunnya tingkat partisipasi masyarakat. Huntington (1994) berpendapat bahwa partisipasi politik dalam sistem demokrasi dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem politik dan peluang perubahan yang dihasilkan dari proses tersebut. Semakin besar keyakinan masyarakat bahwa suara mereka dapat memengaruhi kebijakan atau hasil pemilu, maka semakin tinggi tingkat partisipasi yang akan terjadi. Fenomena penurunan partisipasi politik dari 78,8% menjadi 74,3% menjadi cerminan dari rendahnya insentif masyarakat untuk terlibat dalam proses pemilu. Keberadaan calon tunggal Etik-Sapto yang hanya menghadapi kotak kosong memperlihatkan minimnya kompetisi politik, sehingga masyarakat merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi. Hal ini selaras dengan pandangan Huntington yang menekankan bahwa rendahnya tingkat persaingan politik akan melemahkan motivasi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Tanpa adanya kompetisi yang sehat, masyarakat cenderung melihat pemilu hanya sebagai formalitas administratif, bukan sebagai sarana untuk mendorong perubahan.

Huntington juga menyoroti bahwa partisipasi politik dapat berfungsi sebagai sarana protes masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tidak representatif. Keunggulan kotak kosong di sejumlah TPS dalam Pilkada Sukoharjo 2024 menjadi bentuk nyata dari protes masyarakat

terhadap keterbatasan pilihan politik yang diberikan. Pilihan kotak kosong menunjukkan bahwa meskipun masyarakat tetap berpartisipasi dalam pemilu, mereka memilih untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap minimnya kompetisi yang tersedia. Ini mencerminkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran politik yang tinggi, namun mereka menolak untuk mendukung kandidat yang dianggap tidak mampu merepresentasikan aspirasi mereka.

Selain itu, Huntington menegaskan bahwa partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kompetisi, tetapi juga oleh tingkat sosialisasi politik dan kualitas pendidikan politik yang diterima oleh masyarakat. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, meskipun sosialisasi pemilu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, rendahnya kompetisi membuat efek sosialisasi ini kurang signifikan dalam mendorong partisipasi pemilih. Masyarakat yang telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pemilu tetap merasa bahwa pemilu ini tidak menawarkan pilihan yang berarti, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilih atau memilih kotak kosong. Fenomena ini juga berkaitan dengan konsep alienasi politik yang dijelaskan oleh Huntington, di mana masyarakat merasa terputus dari sistem politik karena tidak adanya alternatif yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Dalam hal ini, masyarakat Sukoharjo yang memilih kotak kosong atau tidak datang ke TPS menunjukkan gejala alienasi politik sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap proses pemilu yang berjalan.

Keberadaan calon tunggal dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024 yang hanya menghadapi pilihan kotak kosong membuat sebagian masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu. Mereka yang merasa bahwa hasil sudah pasti cenderung tidak melihat urgensi untuk memberikan suara. Keadaan ini sejalan dengan teori Damsar (2010), yang menjelaskan bahwa tingkat persaingan politik memiliki hubungan erat dengan minat pemilih dalam berpartisipasi. Jika pemilu dirasakan sebagai ajang formalitas tanpa persaingan yang sesungguhnya, masyarakat cenderung tidak antusias dalam berpartisipasi. Faktor kurangnya kompetisi, aspek sosialisasi dan pendidikan politik juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi pemilih. Seperti yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff (2000), pendidikan politik merupakan faktor penting dalam mendorong

partisipasi masyarakat dalam pemilu. Jika pemilih mendapatkan informasi yang cukup tentang pentingnya pemilu, mekanisme pencoblosan, serta dampak dari pilihan politik mereka, maka mereka cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilihnya. Namun, dalam Pilkada Sukoharjo 2024, meskipun sosialisasi pemilu tetap dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, efeknya terhadap peningkatan partisipasi tampaknya tidak terlalu signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya persepsi di masyarakat bahwa pemilu kali ini tidak menawarkan pilihan yang beragam, sehingga meskipun mereka telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya pemilu, mereka tetap merasa tidak memiliki insentif yang cukup untuk datang ke TPS.

Teori Adman Nursal (2004) juga menjelaskan bahwa sikap politik individu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan informasi yang mereka terima. Dalam hal ini, jika lingkungan sosial seseorang cenderung memiliki pandangan bahwa pemilu tidak menarik karena hanya ada calon tunggal, maka individu tersebut juga cenderung mengikuti sikap tersebut dan memilih untuk tidak berpartisipasi. Kampanye politik yang biasanya meningkatkan antusiasme pemilih juga kemungkinan kurang efektif dalam Pilkada Sukoharjo 2024, karena absennya persaingan yang kompetitif antara beberapa kandidat. Faktor lain yang turut memengaruhi partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024 adalah perubahan pola partisipasi politik masyarakat secara umum. Survei yang dilakukan dalam berbagai pemilu menunjukkan bahwa tren partisipasi politik dapat mengalami fluktuasi berdasarkan faktor eksternal seperti kepercayaan terhadap pemerintah, kondisi sosial-ekonomi, serta dinamika politik di tingkat nasional.

Penurunan partisipasi di Sukoharjo juga bisa dikaitkan dengan meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap proses politik yang berlangsung. Beberapa pemilih mungkin merasa bahwa pemilu tidak membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka, sehingga mereka memutuskan untuk tidak menggunakan hak suaranya. Fenomena ini dikenal sebagai alienasi politik, di mana masyarakat merasa terputus dari sistem politik karena kurangnya opsi yang mereka anggap mewakili aspirasi mereka. Diamond dan Morlino (2005) mengidentifikasi bahwa faktor struktural seperti pendidikan yang rendah, keterbatasan akses

informasi, dan kondisi ekonomi juga dapat berperan dalam menurunkan partisipasi pemilih. Di daerah dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, masyarakat mungkin kurang memahami konsekuensi dari keputusan politik mereka, sehingga mereka tidak merasa terdorong untuk berpartisipasi. Selain itu, keterbatasan akses informasi juga dapat membuat pemilih kurang memahami prosedur pemilu dan implikasi dari pilihan mereka.

Hambatan struktural lainnya yang dapat berkontribusi pada rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo adalah aksesibilitas terhadap tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun infrastruktur pemilu di Sukoharjo relatif baik, masih ada kelompok masyarakat tertentu, seperti penyandang disabilitas dan lansia, yang mungkin mengalami kesulitan dalam mencapai TPS. Kompleksitas prosedur pemilu, seperti proses administrasi yang membingungkan, juga dapat menjadi penghalang bagi pemilih yang kurang familiar dengan mekanisme pemilu. Selain faktor internal dari pemilih dan sistem pemilu, situasi eksternal seperti kondisi politik dan sosial di tingkat nasional juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik di Pilkada Sukoharjo. Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik di Indonesia mengalami berbagai tantangan, seperti meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, polarisasi politik, serta maraknya berita hoax yang dapat mempengaruhi persepsi pemilih.

Informasi yang beredar di media sosial dapat berperan besar dalam membentuk opini publik mengenai pemilu. Jika masyarakat lebih banyak menerima informasi yang bersifat negatif mengenai pemilu, misalnya tentang ketidakberdayaan suara mereka dalam menentukan perubahan, maka mereka cenderung lebih enggan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, strategi sosialisasi yang lebih efektif serta upaya peningkatan literasi politik menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Meskipun tingkat partisipasi dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan, keberlangsungan pemilu tetap berjalan dengan kondusif. Stabilitas dalam pelaksanaan pemilu menunjukkan bahwa meskipun partisipasi menurun, masyarakat tetap menghormati proses demokrasi yang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam meningkatkan partisipasi politik, mekanisme demokrasi di Sukoharjo tetap berjalan

dengan baik.

C. Peran Penyelenggara Pilkada Sukoharjo dalam Pendidikan Pemilih

Peningkatan partisipasi pemilih menjadi salah satu prioritas utama bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta para pemangku kepentingan di Sukoharjo. Berbagai strategi telah dirancang dan diimplementasikan untuk meningkatkan keterlibatan pemilih, terutama melalui program pendidikan politik, pemanfaatan media sosial, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan sosialisasi pemilu. Bab ini akan mengulas strategi-strategi utama yang dapat diterapkan untuk mendorong partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo. Pendidikan pemilih tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi juga memperbaiki kualitas demokrasi dengan meminimalkan pengaruh manipulasi politik, termasuk politik uang dan penyebaran informasi yang salah (Norris, 2003). Dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran kunci dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih sebagai bagian dari tanggung jawab institusional mereka. Penyelenggara memiliki peran sentral dalam membangun kesadaran politik dan mendorong partisipasi masyarakat yang bermakna melalui pendidikan pemilih. Peran ini tidak hanya bersifat administratif tetapi juga substantif dalam memperkuat legitimasi proses demokrasi. Sebagai lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, penyelenggara pemilu bertanggung jawab untuk menjamin bahwa pemilih mendapatkan informasi yang tepat, inklusif, dan bebas dari bias politik (Norris, 2003).

Penyelenggara memainkan peran penting sebagai sumber informasi terpercaya terkait seluruh proses Pilkada, mulai dari tata cara pemilihan, waktu dan tempat pemungutan suara, hingga prosedur teknis lainnya. Informasi ini menjadi esensial untuk menghindari kebingungan di antara pemilih, terutama di wilayah dengan tingkat literasi politik yang rendah. Menurut studi Milner (Milner, 2002), penyediaan informasi yang akurat oleh penyelenggara pemilu secara langsung mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Dalam konteks Pilkada di Indonesia, KPU sering menggunakan media massa, media sosial, dan kampanye langsung

untuk menjangkau masyarakat di seluruh lapisan sosial dan geografis. Pendidikan pemilih juga bertujuan untuk mendorong partisipasi kelompok marginal, seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. Penyelenggara pemilu bertanggung jawab memastikan bahwa program pendidikan pemilih dirancang untuk inklusivitas. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam proses politik (Habermas, 1996). misalnya, KPU menyediakan alat bantu khusus untuk pemilih penyandang disabilitas dan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil.

Selain memberikan informasi, penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilih memiliki kemampuan kritis dalam menghadapi berbagai bentuk manipulasi politik, termasuk politik uang dan penyebaran hoaks. Menurut Diamond & morlino (2005), pendidikan pemilih yang efektif mampu membangun daya tahan masyarakat terhadap tekanan politik yang tidak sehat. Dalam praktiknya, KPU di Indonesia sering mengintegrasikan isu-isu seperti anti politik uang dan anti hoaks ke dalam kurikulum pendidikan pemilih, baik melalui lokakarya langsung maupun kampanye digital. Dalam kerangka tata kelola pemilu yang baik, penyelenggara bertindak sebagai promotor transparansi. mereka tidak hanya mengedukasi pemilih tentang hak dan tanggung jawab, tetapi juga tentang mekanisme pengawasan pemilu. Hal ini memungkinkan pemilih untuk tidak hanya menjadi peserta pasif tetapi juga pengawas aktif dalam proses pemilu. Dengan demikian, penyelenggara memupuk budaya demokrasi partisipatoris yang lebih luas.

Penyelenggara Pilkada, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia, memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi politik, baik melalui pendidikan pemilih maupun program-program yang mempermudah akses informasi yang akurat dan terpercaya bagi publik. literasi politik dapat dipahami sebagai kemampuan individu untuk memahami dan memanfaatkan proses politik dalam rangka membuat keputusan yang informasional dalam kehidupan politik (Norris, 2003). literasi politik melibatkan penguasaan tentang bagaimana cara kerja demokrasi, pemahaman terhadap hak politik, serta keterampilan dalam menilai isu-isu politik dan kandidat yang muncul dalam Pilkada. Literasi

politik yang baik memungkinkan pemilih untuk membuat pilihan yang rasional dan berdasarkan pada informasi yang objektif, bukan sekadar berdasarkan opini atau pengaruh eksternal yang tidak berdasarkan bukti. Berikut merupakan elaborasi lebih lengkap terkait dengan peran penyelenggara Pilkada dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

1. KPU, Bawaslu, dan Sistem Demokrasi

Buku *Democracy and Its Critics* (1989), Robert A. Dahl menekankan bahwa demokrasi yang stabil dan legitimate tidak hanya bergantung pada keterlibatan rakyat dalam pemilu, tetapi juga pada keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang independen, transparan, dan akuntabel. Pemilu yang bebas dan adil hanya dapat terwujud jika institusi yang mengelolanya memiliki kredibilitas tinggi, beroperasi tanpa intervensi politik, serta mampu menjamin bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Dalam konteks Indonesia, peran ini dijalankan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai pengawas pemilu.

Menurut Dahl, keberadaan lembaga penyelenggara pemilu yang kuat dan independen menjadi fondasi utama bagi legitimasi pemerintahan yang dihasilkan melalui pemilu. Demokrasi yang sehat menuntut bahwa pemilu tidak hanya menjadi ajang formalitas politik, tetapi juga harus memberikan ruang kompetisi yang adil bagi semua peserta pemilu, menjamin hak pilih bagi setiap warga negara, serta memastikan hasil yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Hal ini sangat relevan dengan fungsi KPU dan Bawaslu di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip keterbukaan, kejujuran, dan keadilan.

Dahl menekankan bahwa lembaga penyelenggara pemilu memiliki tiga tanggung jawab utama: memastikan inklusivitas, menjaga kompetisi yang adil, dan menjamin transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Dalam konteks Indonesia, KPU sebagai penyelenggara utama pemilu memiliki peran dalam memastikan bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. KPU bertanggung jawab

dalam hal pendaftaran pemilih, penetapan daftar calon, pelaksanaan pemungutan suara, serta rekapitulasi hasil pemilu. Dalam prinsip inklusivitas, KPU harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses untuk berpartisipasi dalam pemilu, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini mengalami hambatan, seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, serta warga yang tinggal di daerah terpencil. Jika ada kelompok yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena hambatan administratif atau teknis, maka hal tersebut dapat merusak legitimasi pemilu dan memunculkan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi. Untuk mengatasi tantangan ini, KPU di Indonesia telah mengembangkan berbagai inovasi, seperti penyediaan TPS khusus bagi pemilih berkebutuhan khusus, layanan jemput suara bagi pemilih di rumah sakit, serta penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran pemilih untuk memastikan keakuratan data pemilih.

Dahl juga menyoroti pentingnya kompetisi yang adil dalam pemilu, yang berarti setiap kandidat dan partai politik harus mendapatkan akses yang setara dalam berkampanye serta dalam memperoleh informasi pemilih. Jika ada peserta pemilu yang mendapatkan keuntungan tidak adil, seperti dukungan terselubung dari aparat negara, dominasi akses terhadap media, atau penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik, maka pemilu kehilangan esensinya sebagai alat demokrasi. Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya pemilu, mencegah terjadinya kecurangan, serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dapat mengganggu keseimbangan dalam kompetisi politik. Dalam prinsip transparansi, Dahl menegaskan bahwa semua tahapan pemilu harus dapat diawasi oleh publik dan dijalankan dengan prosedur yang jelas. Lembaga penyelenggara pemilu harus membuka akses bagi pemantau independen, media, serta organisasi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pemilu tidak dijalankan secara tertutup atau manipulatif. Di Indonesia, KPU dan Bawaslu telah membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu melalui partisipasi relawan pemantau pemilu, diskusi publik, serta sistem pengaduan yang memungkinkan

warga melaporkan dugaan kecurangan.

Dahl juga menyoroti pentingnya independensi lembaga penyelenggara pemilu, yang berarti lembaga ini harus terbebas dari tekanan politik dan memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya. Dalam sistem demokrasi yang sehat, lembaga pemilu tidak boleh berada di bawah kendali eksekutif atau legislatif, karena hal ini dapat membuka peluang bagi intervensi politik yang menguntungkan pihak tertentu. KPU di Indonesia, sebagai lembaga independen, memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan pemilu tanpa campur tangan pemerintah, meskipun tantangan dalam menjaga netralitas tetap ada, terutama dalam hal tekanan politik dari aktor-aktor yang berkepentingan dalam pemilu.

Dahl juga menggarisbawahi pentingnya mekanisme hukum yang dapat menangani sengketa pemilu secara efektif dan adil. Dalam demokrasi yang sehat, setiap peserta pemilu yang merasa dirugikan harus memiliki jalur hukum yang jelas untuk mengajukan gugatan, dan penyelesaian sengketa harus dilakukan oleh lembaga yang netral dan profesional. Dalam sistem pemilu Indonesia, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, memberikan rekomendasi sanksi, serta berkoordinasi dengan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa hasil pemilu. Jika lembaga penyelenggara pemilu tidak memiliki sistem penyelesaian sengketa yang efektif, maka potensi konflik politik pasca-pemilu akan semakin tinggi, yang dapat mengancam stabilitas demokrasi.

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu juga menjadi perhatian utama dalam kajian Dahl. Ia berpendapat bahwa legitimasi demokrasi sangat bergantung pada apakah masyarakat percaya bahwa pemilu yang dijalankan benar-benar mewakili kehendak mereka. Jika publik merasa bahwa pemilu dikendalikan oleh kepentingan tertentu atau bahwa hasilnya telah direayasa, maka pemilu justru dapat menjadi pemicu instabilitas politik. Dalam konteks ini, KPU dan Bawaslu harus terus meningkatkan transparansi mereka, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dapat dijelaskan kepada publik, serta membangun sistem komunikasi yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi

yang jelas dan akurat mengenai jalannya pemilu.

Dahl juga menyinggung tantangan dalam menghadapi perkembangan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu. Digitalisasi proses pemilu dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi, tetapi juga membuka tantangan baru, seperti risiko peretasan data pemilih, manipulasi hasil pemilu secara digital, serta penyebaran hoaks yang dapat mempengaruhi opini publik. KPU Indonesia telah berupaya mengatasi tantangan ini dengan memperkenalkan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu dalam proses penghitungan suara, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan perdebatan mengenai keamanannya.

Berdasarkan kajian tersebut, Dahl dalam bukunya, *"Democracy and Its Critics"*, memberikan kerangka pemikiran yang relevan dalam menilai peran dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. Dalam sistem demokrasi yang sehat, KPU dan Bawaslu harus tetap menjaga independensi, transparansi, dan profesionalisme, memastikan bahwa pemilu berjalan secara inklusif dan kompetitif, serta membangun kepercayaan publik melalui sistem pengawasan yang kuat dan mekanisme hukum yang jelas. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, maka pemilu yang seharusnya menjadi instrumen utama dalam memperkuat demokrasi justru dapat berubah menjadi sumber delegitimasi politik dan ketidakstabilan sosial.

2. Peran KPU dan Bawaslu dalam Pendidikan Politik

Pendidikan politik memiliki peran fundamental dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi. Keberhasilan pemilu yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga oleh kesiapan masyarakat dalam memahami proses politik secara mendalam. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan pemilih yang lebih rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh manipulasi informasi atau politik identitas. Dalam teori pendidikan politik, Albert Bandura melalui Social Learning Theory menegaskan bahwa individu tidak hanya belajar melalui pengalaman langsung,

tetapi juga melalui observasi terhadap perilaku politik di lingkungan sosial mereka. Oleh karena itu, pendidikan politik yang efektif tidak hanya berfokus pada pemberian informasi secara satu arah, tetapi juga harus melibatkan interaksi sosial dan pengalaman langsung dalam proses politik. Pemilih yang aktif berdiskusi, terlibat dalam forum publik, serta mengamati perilaku politik para pemimpin dan tokoh masyarakat akan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai demokrasi dan proses pemilu.

Robert Dahl dalam *Democracy and Its Critics* juga menekankan pentingnya literasi politik dalam menjaga keberlanjutan demokrasi. Masyarakat yang memiliki pemahaman luas mengenai sistem politik akan lebih mampu menilai kandidat secara objektif, memahami isu-isu kebijakan, serta menghindari jebakan hoaks atau propaganda politik yang sering kali menyebar menjelang pemilu. Literasi politik yang baik menjadi fondasi bagi partisipasi yang bermakna, karena pemilih tidak hanya menggunakan hak suaranya, tetapi juga terlibat dalam mengawasi proses politik secara berkelanjutan.

Berdasarkan pemikiran Dahl dan Albert, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat dalam konteks Pilkada 2024 di Sukoharjo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo, sebagaimana dikutip dari situs resminya, menegaskan bahwa pendidikan politik menjadi salah satu strategi utama dalam memastikan pemilu yang berkualitas. KPU dan pemerintah daerah berupaya melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat, baik melalui kegiatan langsung seperti rapat koordinasi pendidikan politik maupun melalui media digital untuk menjangkau lebih banyak pemilih.

Salah satu strategi utama yang digunakan adalah penyelenggaraan rapat koordinasi pendidikan politik, sebagaimana diberitakan oleh Portal Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggelar pertemuan ini dengan tujuan memperkuat sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan partai politik, dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat (Sukoharjokab.go.id, 16 November 2023). Pendekatan ini sejalan dengan konsep demokrasi deliberatif dari Jürgen Habermas, yang

menekankan pentingnya ruang publik untuk diskusi yang rasional dan terbuka. Dalam konteks pendidikan politik, keterlibatan banyak pihak dalam mendiskusikan pemilu yang adil dan transparan akan meningkatkan kesadaran politik masyarakat serta memperkuat kepercayaan terhadap proses demokrasi.

Salah satu upaya itu direalisasikan melalui pelaksanaan *talkshow* yang bertajuk “Peran Komunitas dalam Mencapai Pemilu Berkualitas”, yang digelar oleh DPD PAN Sukoharjo dan menghadirkan Anggota KPU Sukoharjo, Suci Handayani, sebagai narasumber (Kab-sukoharjo.kpu.go.id, 4 Agustus 2022).

Suci menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam pemilu, baik sebagai pemilih, penyelenggara, pengawas, maupun dalam sosialisasi pemilu. Ia menegaskan bahwa pemilih yang cerdas harus menolak politik uang, mempertimbangkan rekam jejak kandidat, serta tidak terpengaruh oleh politik identitas berbasis SARA. Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa pemilu yang berkualitas membutuhkan regulasi yang tegas, peserta pemilu yang kompeten, birokrasi yang netral, dan penyelenggara yang berintegritas.

Beberapa peserta menyoroti tantangan pemilu, seperti budaya politik uang, beban kerja berat bagi petugas KPPS, serta ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Sukoharjo 2020. Suci menanggapi dengan menekankan pentingnya perubahan dari individu dalam menolak politik uang serta peningkatan persiapan pemilu 2024, termasuk seleksi lebih ketat bagi petugas KPPS dan peningkatan honorarium mereka. Ia juga menjelaskan bahwa penggunaan kotak suara berbahan duplex telah diuji ketahanannya dan dipilih atas pertimbangan efisiensi anggaran. Acara yang juga menghadirkan pengamat politik dari FE UGM, Yudi Janaka, serta Ketua PD Muhammadiyah Sukoharjo, H. Wiwaha Aji Santosa, ini mendapat antusiasme tinggi dari peserta, terutama dari kalangan mahasiswa dan komunitas masyarakat. Diskusi yang berlangsung menunjukkan bahwa pendidikan politik yang interaktif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu.

Selain kegiatan *talkshow* yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu Kabupaten Sukoharjo juga mengencangkan salah satu program

inovatif yang dijadikan sebagai suatu langkah dalam memasifkan pendidikan politik di antara para pemilih, yaitu “Desa Pengawasan”, sebuah inisiatif strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal jalannya pemilu (Sukoharjo.bawaslu.go.id, 28 Oktober 2021). Program ini tidak hanya berfokus pada pemberian edukasi mengenai proses pemilu, tetapi juga membangun pola pikir kritis di kalangan warga desa agar mereka lebih peka terhadap potensi pelanggaran serta memiliki keberanian untuk melaporkan segala bentuk kecurangan yang terjadi di lingkungannya. Dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas, program ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem politik yang lebih sehat dan demokratis, terutama di wilayah pedesaan yang sering kali memiliki keterbatasan akses terhadap informasi politik yang valid.

Lebih dari sekadar meningkatkan partisipasi politik, “Desa Pengawasan” bertujuan untuk membentuk masyarakat yang proaktif dalam menjaga integritas pemilu. Masyarakat tidak hanya diberikan pemahaman mengenai hak pilih mereka, tetapi juga diberdayakan untuk menjadi pengawas independen yang dapat berperan dalam memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan berbasis masyarakat ini, diharapkan dapat mengurangi risiko politik uang, intimidasi terhadap pemilih, penyalahgunaan wewenang oleh aparat, serta berbagai bentuk kecurangan lainnya yang dapat mencederai prinsip demokrasi.

Menurut laporan Bawaslu Sukoharjo, program ini semakin diperluas menjelang Pemilu 2024, dengan cakupan yang lebih luas serta pendekatan yang lebih intensif. Bawaslu berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk tokoh masyarakat, organisasi pemuda, lembaga keagamaan, serta komunitas lokal, guna memastikan bahwa pengawasan pemilu dilakukan secara kolektif dan menyeluruh. Penguatan program ini dilakukan tidak hanya melalui pelatihan dan sosialisasi langsung, tetapi juga dengan pemanfaatan teknologi digital agar masyarakat lebih mudah melaporkan dugaan pelanggaran secara cepat dan akurat.

Melalui pendekatan ini, “Desa Pengawasan” tidak hanya mengubah masyarakat dari pemilih pasif menjadi pemilih yang lebih sadar dan bertanggung jawab, tetapi juga menciptakan budaya politik yang lebih matang dan berintegritas. Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga demokrasi, memastikan bahwa suara mereka benar-benar dihitung dan dihargai, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang adil dan transparan. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek dalam menjaga kelancaran pemilu 2024, tetapi juga menjadi langkah progresif dalam membangun partisipasi politik yang lebih berkualitas di masa depan.

Selain melibatkan lembaga penyelenggara pemilu, partai politik juga memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Anthony Downs dalam teori perilaku pemilihnya menegaskan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan suara, tetapi juga sebagai agen edukasi yang bertugas memberikan informasi mengenai kebijakan dan program yang mereka tawarkan. Namun, sering kali partai politik lebih berfokus pada kepentingan elektoral mereka dibandingkan memberikan pendidikan politik yang objektif dan mendalam kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk menjalankan fungsinya dengan penuh tanggung jawab agar masyarakat dapat memahami perbedaan kebijakan dan ideologi dari setiap kandidat secara lebih baik.

Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu 2024. Dalam diskusi yang melibatkan KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil, disepakati bahwa pendidikan politik harus lebih inklusif dan menjangkau kelompok-kelompok yang selama ini kurang terwakili, seperti perempuan, pemilih pemula, penyandang disabilitas, serta masyarakat di daerah terpencil. Upaya ini mencerminkan pentingnya pemberdayaan kelompok marjinal sebagaimana yang dikemukakan oleh Norris (2003), yang menekankan bahwa pendidikan pemilih yang efektif harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Strategi lain yang digunakan dalam pendidikan politik menjelang Pemilu 2024 adalah pemanfaatan teknologi dan media digital. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan media sosial di Indonesia, penyelenggara pemilu mulai beralih ke metode digital untuk menyebarkan informasi politik secara lebih luas dan cepat. Media sosial digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai tahapan pemilu, tata cara pencoblosan, serta visi-misi kandidat. Namun, tantangan utama dalam penggunaan media digital adalah penyebaran hoaks dan disinformasi, yang sering kali memengaruhi persepsi pemilih terhadap proses politik. Oleh karena itu, literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan politik, agar masyarakat dapat memilah informasi yang valid dari sumber yang terpercaya.

Salah satu contoh implementasi pendidikan politik berbasis teknologi adalah pengembangan aplikasi dan situs web resmi oleh KPU dan Bawaslu yang memungkinkan pemilih mengakses informasi terkait pemilu secara langsung dan transparan. Selain itu, forum diskusi online dan webinar juga mulai digunakan sebagai sarana edukasi politik yang lebih fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Langkah ini sejalan dengan pandangan Dahl (1989), yang menekankan bahwa masyarakat yang memiliki akses informasi yang luas akan lebih mampu membuat keputusan politik yang rasional dan objektif. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan untuk meningkatkan pendidikan politik masyarakat, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah rendahnya minat sebagian masyarakat terhadap isu-isu politik, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap sistem politik atau kejenuhan terhadap dinamika politik yang dianggap tidak membawa perubahan yang nyata. Untuk mengatasi hal ini, pendidikan politik tidak hanya harus bersifat informatif tetapi juga harus lebih interaktif dan menarik, agar masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses politik.

Selain itu, peran media massa juga menjadi krusial dalam membentuk persepsi publik terhadap pemilu. Media yang berorientasi pada edukasi politik harus dapat memberikan informasi yang objektif dan berimbang mengenai proses pemilu dan kandidat yang bertarung.

Namun, dalam praktiknya, media sering kali digunakan sebagai alat propaganda politik yang justru memperkeruh pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik yang sebenarnya. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap pemberitaan politik agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berkualitas dan mendukung proses demokrasi yang sehat.

Secara esensial, pendidikan politik memiliki dampak yang besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dengan adanya berbagai upaya yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan partai politik, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem politik. Namun, tantangan masih tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa pendidikan politik dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan tidak hanya sekadar menjadi alat kampanye politik semata. Dengan pendidikan politik yang lebih inklusif, interaktif, dan berbasis pada literasi politik yang kuat, masyarakat diharapkan dapat menjadi pemilih yang lebih kritis, rasional, dan berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Pemilu yang berkualitas hanya dapat terwujud jika seluruh elemen masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai proses politik serta mampu membuat keputusan politik yang berdasarkan informasi yang valid dan relevan.

D. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

1. Partai Politik dan Sistem Demokrasi

Para ahli sepakat bahwa partai politik memegang peranan krusial dalam memperkuat dan membentuk demokrasi yang sehat. Fungsi utama partai politik adalah sebagai penghubung antara masyarakat dan negara, mengorganisasi kepentingan publik, serta menerjemahkannya menjadi kebijakan yang dapat dijalankan oleh pemerintah. Tanpa partai politik yang kuat dan responsif, aspirasi masyarakat kemungkinan besar akan kesulitan untuk diterjemahkan dalam kebijakan publik (Lijphart, 1966). Partai politik juga dipandang sebagai elemen vital untuk memastikan adanya partisipasi luas

dalam proses demokrasi. Dahl (1971) menekankan bahwa pluralitas partai politik memberikan ruang bagi beragam suara dan aspirasi masyarakat untuk terwakili, yang pada akhirnya memperkaya proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, peran pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik sangat penting, karena dengan pendidikan yang baik, kesadaran politik masyarakat akan meningkat, dan mereka pun akan lebih terlibat secara aktif dalam proses demokrasi.

Di sisi lain, partai politik berfungsi sebagai alat untuk meraih dukungan dan mobilisasi bagi kebijakan yang mereka perjuangkan. Tanpa pendidikan politik yang memadai dari partai, masyarakat berisiko menjadi apatis dan tidak terlibat dalam proses politik. Oleh karena itu, pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan mereka dalam pemilu dan dalam menentukan kebijakan publik (Eldersveld, 1964). Pippa Norris, dalam bukunya "Democratic Phoenix: Reinventing Political Activism," menegaskan bahwa pendidikan politik yang efektif dari partai-partai politik harus bersifat interaktif dan partisipatif, sehingga mendorong masyarakat tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai aktor yang terlibat dalam proses dialog dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, pendidikan politik dari partai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara serta menciptakan iklim demokrasi yang lebih sehat dan inklusif.

Kesimpulannya, pendidikan politik yang dijalankan oleh partai politik memiliki hubungan erat dengan penguatan demokrasi. Melalui pendidikan ini, kesadaran politik yang lebih tinggi dapat tercipta, yang akan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif, bukan hanya saat pemilu atau Pilkada, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan fungsi partai politik dalam sistem demokrasi, diharapkan masyarakat dapat bertransformasi menjadi subjek politik yang lebih kritis dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan bangsa.

Di negara demokrasi dengan sistem multipartai, keberadaan partai politik tidak dapat dipisahkan dari proses politik yang berjalan, karena partai politik merupakan komponen penting dalam mewujudkan demokrasi yang ideal. Dalam sistem multipartai, partai politik berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahan, mengumpulkan, mewakili, dan menyalurkan aspirasi serta kepentingan warga negara. Keberagaman pandangan, kepentingan, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat tercermin melalui partai-partai politik, memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam menentukan wakil mereka di lembaga legislatif dan eksekutif. Hal ini berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih representatif dan inklusif.

Peran partai politik juga diatur oleh berbagai perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menegaskan bahwa partai politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kesadaran politik di kalangan anggota dan masyarakat. Partai politik, dalam hal ini, berperan sebagai agen pendidikan politik yang mendalam, tidak hanya mengajarkan hak dan kewajiban politik, tetapi juga meningkatkan pemahaman mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi bangsa. Partai politik memiliki peran yang signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan menyediakan platform yang memungkinkan warga untuk menyuarakan pendapat dan aspirasi mereka. Melalui kampanye yang edukatif, mereka tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan popularitas kandidat, tetapi juga membantu masyarakat memahami berbagai pilihan kebijakan yang ditawarkan serta dampaknya terhadap kehidupan mereka. Oleh karena itu, para politikus dan aktivis dapat menyampaikan pesan yang jelas dan terarah mengenai isu-isu penting seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, yang langsung relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sebagai alternatif dalam demokrasi, partai politik juga bertindak sebagai saluran bagi masyarakat untuk mengungkapkan keinginan dan kebutuhan mereka, serta sebagai jembatan antara

individu dan pengambil keputusan. Melalui mekanisme pemilu, masyarakat dapat mengekspresikan suara mereka, yang pada gilirannya memberi legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. Dengan demikian, partai politik berfungsi sebagai penghubung yang sangat penting antara suara rakyat dan kebijakan publik yang diterapkan. Partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses politik berjalan secara adil dan transparan, menciptakan lingkungan politik yang mendukung kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia, serta memberikan rasa aman bagi setiap individu untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka.

Secara keseluruhan, partai politik memiliki peran lebih dari sekedar sarana pencalonan kandidat dalam pemilu; mereka juga merupakan agen perubahan yang dapat mengedukasi masyarakat mengenai nilai-nilai demokrasi dan pentingnya keterlibatan dalam kehidupan politik. Dengan program pendidikan politik yang berkelanjutan, seminar, dan diskusi publik, partai politik berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu sosial dan politik yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tanpa partai politik yang efektif, aspirasi masyarakat akan sulit terwujud, dan proses demokratisasi dapat terhambat. Oleh karena itu, partai politik harus berkomitmen untuk menjadi transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam menciptakan demokrasi yang kuat dan berdaya saing.

2. Partai Politik Alternatif dalam Masyarakat yang Beraspirasi di Negara Demokrasi

Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi, yang menandai adanya kemajuan dalam politik modern. Di negara demokrasi, partisipasi politik bukan hanya hak, melainkan kewajiban bagi setiap warga negara untuk memastikan suara mereka terdengar dalam proses pemerintahan. Di negara-negara dengan proses demokrasi yang matang, tingkat partisipasi politik biasanya meningkat seiring dengan tingginya kesadaran politik. Ini menunjukkan bahwa modernisasi politik berkaitan erat dengan

perbaikan dalam bidang politik dan pemerintahan, yang akhirnya berkontribusi pada kualitas demokrasi yang dijalankan. Fenomena peningkatan partisipasi politik dapat terlihat dari berbagai indikator, seperti bertambahnya jumlah pemilih dalam pemilu, keterlibatan aktif dalam organisasi masyarakat sipil, serta partisipasi dalam aksi protes damai untuk menyuarakan tuntutan politik. Partisipasi politik pada dasarnya adalah tindakan yang diambil oleh warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah (Sastroatmodjo, 1995). Melalui partisipasi ini, warga negara tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga berperan aktif memberikan masukan dan kritik terhadap kebijakan publik.

Modernisasi politik mencakup transformasi nilai-nilai dan norma yang mendasari hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi politik mencerminkan adanya ruang publik yang sehat dan terbuka, di mana berbagai kelompok masyarakat dapat menyuarakan aspirasi dan kepentingan mereka. Media massa dan platform digital menjadi alat efektif untuk mendemokratisasi informasi dan memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memudahkan warga negara untuk mengakses informasi, mengorganisasi diri, dan menyampaikan pendapat. Partisipasi aktif juga berperan dalam mengurangi ketidakpuasan sosial dan konflik yang mungkin muncul akibat keputusan politik yang tidak melibatkan suara rakyat. Dengan membangun budaya politik yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkontribusi, negara dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan kooperatif. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mendukung inisiatif yang mendorong partisipasi politik, seperti pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan mempermudah akses dalam proses pemungutan suara.

Partisipasi politik melalui partai politik menjadi alternatif dalam negara demokrasi, yang mencerminkan ciri khas modernisasi politik. Dalam sistem demokrasi, partai politik tidak hanya berfungsi sebagai lembaga untuk mencalonkan kandidat dalam pemilu, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan

memastikan suara mereka dihitung dalam pemerintahan. Partai politik berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, menyediakan platform di mana berbagai kepentingan dan pandangan masyarakat dapat disuarakan. Di negara-negara dengan proses demokrasi yang baik, tingkat partisipasi politik meningkat seiring dengan kesadaran politik yang tinggi. Kesadaran politik ini seringkali dipicu oleh pendidikan yang baik, akses informasi yang transparan, dan ruang publik yang terbuka. Dalam hal ini, peran partai politik sangat penting; mereka harus dapat menjadikan isu-isu publik yang relevan sebagai agenda, sehingga masyarakat merasa terlibat dan terwakili dalam diskursus politik.

Keberhasilan partai politik dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tergantung pada sejauh mana mereka memahami dan merespons kebutuhan serta harapan konstituen. Dalam konteks modernisasi politik, partai politik dituntut untuk lebih adaptif, memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk berinteraksi dengan pemilih. Ini juga mencakup kemampuan untuk membangun komunikasi dua arah, di mana anggota masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan kritik terhadap kebijakan yang diusulkan. Modernisasi politik, dalam hal ini, sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi yang lebih luas. Ketika partai politik aktif menyalurkan suara masyarakat dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, hal ini tidak hanya meningkatkan legitimasi partai, tetapi juga memperkuat kualitas demokrasi yang dijalankan. Partisipasi yang inklusif dan beragam sangat penting untuk memastikan representasi yang baik dan mencegah ketidakpuasan yang dapat merusak stabilitas politik.

Partisipasi politik yang tinggi akan membuat masyarakat merasa lebih terhubung dengan negara dan berkomitmen pada proses demokrasi. Oleh karena itu, peran aktif partai politik dalam menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat sangat strategis untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif. Modernisasi politik yang bercirikan partisipasi aktif tidak hanya menguntungkan partai politik itu sendiri, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih berdaya dan

terbuka. Partisipasi politik yang tinggi akan memperkuat legitimasi pemerintahan, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan kebijakan publik mencerminkan kehendak masyarakat. Ini adalah langkah krusial dalam mengembangkan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan, di mana setiap individu merasa memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan masa depan politik yang lebih baik bagi masyarakat mereka.

3. Peran Partai Politik dalam Pendidikan Politik

Partai politik seringkali dipandang hanya sebagai alat untuk meraih suara dalam pemilu dan pilkada, namun pandangan ini sangat terbatas. Sesungguhnya, peran partai politik jauh lebih luas dan kompleks. Salah satu fungsi yang sering terabaikan adalah peran partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat. Dalam hal ini, partai politik tidak hanya bertanggung jawab mendidik anggotanya, tetapi juga masyarakat luas agar memahami proses politik dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 menegaskan bahwa salah satu peran penting partai politik adalah sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan politik, baik untuk anggota maupun masyarakat secara umum. Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik ini diharapkan dapat membentuk kesadaran politik yang tinggi, sehingga masyarakat lebih paham akan demokrasi, proses pemilihan umum, dan pentingnya partisipasi mereka dalam menentukan arah serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Partai politik, sebagai lembaga pendidikan politik, juga memiliki peran penting dalam mengurangi apatisme politik, khususnya di kalangan generasi muda. Dengan mengajak generasi muda untuk aktif dalam diskusi politik dan memahami peran mereka dalam sistem demokrasi, partai dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kedewasaan politik sejak dini. Ini juga membuka peluang untuk munculnya pemimpin-pemimpin baru yang memiliki wawasan dan integritas yang baik di masa depan. Melalui program pendidikan yang

diselenggarakan oleh partai politik seperti seminar, lokakarya, dan diskusi publik masyarakat tidak hanya diberikan informasi, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis mengenai isu-isu politik yang dihadapi bangsa. Program-program ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pengambilan keputusan di tingkat lokal dan nasional, termasuk bagaimana undang-undang disusun serta bagaimana rakyat dapat terlibat dalam proses legislatif tersebut. Dengan demikian, masyarakat tidak merasa terasing dari sistem politik, tetapi justru merasa menjadi bagian integral dari proses yang memengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Partai politik berperan dalam meningkatkan kesadaran sosial dan politik masyarakat dengan mengangkat isu-isu yang relevan, seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, lingkungan hidup, dan pendidikan. Melalui kampanye dan program-program sosial, partai politik dapat mengedukasi masyarakat mengenai berbagai masalah yang membutuhkan perhatian bersama. Dengan memberikan informasi yang tepat dan relevan, partai politik dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan peka terhadap tantangan yang dihadapi bangsa. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak, baik partai politik itu sendiri maupun masyarakat untuk memahami bahwa peran partai politik tidak hanya terbatas pada masa pemilu, tetapi juga sebagai bagian integral dalam pendidikan politik yang berkelanjutan. Dengan meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pendidikan politik, partai politik dapat berkontribusi pada pembentukan warga negara yang lebih aktif, sadar, dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dan sosial di masa depan.

Pendidikan yang diberikan oleh partai politik memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik di kalangan masyarakat. Ketika partai politik terlibat secara aktif dalam memberikan edukasi mengenai mekanisme demokrasi, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta isu-isu yang berkembang, masyarakat akan lebih memahami peran penting mereka dalam proses politik. Dengan pemahaman yang lebih baik, kesadaran politik akan tumbuh, yang kemudian mendorong masyarakat untuk lebih terlibat dalam praktik demokrasi. Partisipasi politik yang muncul dari pendidikan ini tidak

hanya terbatas pada saat pemilu atau Pilkada, tetapi juga meluas ke berbagai aktivitas politik lainnya. Masyarakat yang teredukasi dengan baik cenderung lebih aktif dalam berdiskusi secara publik, menghadiri pertemuan komunitas, dan ikut serta dalam kegiatan pengawasan kebijakan pemerintah. Mereka akan merasa bahwa pendapat dan suara mereka memiliki nilai, dan dapat mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin yang mereka pilih.

Partai politik memiliki peran krusial dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, termasuk di Kabupaten Sukoharjo. Mereka bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran politik warga, mengedukasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta memberikan informasi yang akurat mengenai proses politik dan pemerintahan. Seperti contoh, pada tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sukoharjo meluncurkan program “Jagongan Demokrasi” yang bertujuan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat melalui format podcast. Edisi perdana program ini mengangkat tema “Peran partai politik dalam pendidikan politik masyarakat” dan menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo, Wawan Pribadi, S.Sos, sebagai narasumber. Dalam diskusi tersebut, Wawan menekankan pentingnya pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, yang tercermin dari perolehan kursi signifikan oleh PDIP dalam pemilihan legislatif tahun 2019, 2014, dan 2019.

Selain itu, dengan meningkatnya kesadaran politik, masyarakat tidak hanya menjadi objek yang dipengaruhi keputusan politik, tetapi juga subjek yang aktif. Mereka akan lebih proaktif dalam mencari informasi, memahami isu-isu sosial dan politik, serta memberikan masukan dan kritik yang konstruktif terhadap kebijakan yang ada. Masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya akan lebih peka terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi negara, mulai dari isu ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan hidup. Ketika mereka memiliki ketertarikan terhadap isu-isu ini, dorongan untuk berkontribusi dalam mencari solusi, baik melalui advokasi, pengorganisasian komunitas, atau kolaborasi dengan kelompok masyarakat lainnya, akan semakin meningkat. Keterlibatan yang lebih besar dari masyarakat dalam proses politik berkontribusi pada

terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel. Ketika suara rakyat diperhatikan dalam pengambilan keputusan, maka terciptalah iklim politik yang lebih sehat dan transparan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik bukan hanya kegiatan yang bersifat simbolis, melainkan investasi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa.

E. Perilaku Pemilih dalam Pilkada Sukoharjo

Pilkada Kabupaten Sukoharjo 2024 mencerminkan dinamika perilaku pemilih yang menarik, terutama dalam konteks adanya calon tunggal dan keberadaan kotak kosong sebagai alternatif pilihan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana pemilih merespons kondisi politik lokal yang terbatas dalam pilihan kandidat. Berdasarkan hasil resmi, pasangan calon tunggal Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. dan Eko Sapto Purnomo, S.E. memperoleh 319.923 suara atau sebesar 66,8%, sedangkan kolom kosong mendapatkan 159.256 suara atau sebesar 33,2%. Adapun tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Sukoharjo tercatat 74,3%, mengalami penurunan dibandingkan Pilkada 2020 yang mencapai 78,8%.

Menurunnya partisipasi dan tingginya suara untuk kotak kosong dalam beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengindikasikan adanya pergeseran perilaku pemilih. Beberapa TPS menunjukkan kotak kosong unggul atas pasangan calon, seperti di TPS 03 Palur, Kecamatan Mojolaban, di mana kotak kosong memperoleh 225 suara, sedangkan pasangan Etik-Sapto hanya mendapatkan 180 suara. Fenomena serupa terjadi di TPS 04 Pucangan, Kecamatan Kartasura, dengan kotak kosong meraih 221 suara, mengalahkan pasangan calon yang hanya memperoleh 153 suara.

Begitu pula di TPS 006 Wonorejo, Kecamatan Polokarto, kotak kosong memperoleh 189 suara, sementara pasangan calon hanya mendapatkan 165 suara. Jika melihat tren ini lebih dalam, perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 dapat dianalisis melalui berbagai teori perilaku pemilih, seperti Model Sosiologis (*Sociological Model*), Model Psikologi Sosial (Michigan Model), Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), dan *Civic Voluntarism Model* (CVM) sebagai berikut:

1. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Sosiologis (*Sociological Model*)

Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang tetap stabil di angka 74,3%, dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya mencapai 508.592 orang. Stabilitas tingkat partisipasi ini menjadi indikasi bahwa kesadaran politik masyarakat Sukoharjo semakin matang, meskipun di tengah fenomena calon tunggal yang terjadi di beberapa daerah. Partisipasi yang relatif tinggi ini mencerminkan keberhasilan berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Sukoharjo, terutama dalam memanfaatkan platform digital sebagai media utama dalam menyampaikan informasi pemilu. Salah satu faktor utama yang mendorong stabilitas partisipasi pemilih adalah kampanye yang lebih inklusif dan partisipatif. KPU Sukoharjo tidak hanya menyasar kelompok pemilih tradisional, tetapi juga memperluas jangkauan kampanye kepada pemilih muda, perempuan, dan kelompok marginal melalui berbagai media sosial dan aplikasi digital. Kampanye ini menekankan pentingnya menggunakan hak pilih sebagai bentuk tanggung jawab demokratis, sekaligus memberikan pemahaman mengenai mekanisme pemilu dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

Akses informasi yang lebih luas melalui platform digital juga memainkan peran penting dalam menjaga partisipasi pemilih. Pemanfaatan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp memungkinkan informasi mengenai tahapan pemilu, visi-misi calon, dan tata cara pemungutan suara dapat tersebar dengan cepat dan merata. KPU Sukoharjo juga aktif menggelar diskusi daring, webinar, dan simulasi pemilu berbasis digital untuk memperkuat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik. Selain itu, meningkatnya partisipasi juga didukung oleh peran komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dalam menyebarkan informasi pemilu dan mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilih. Keterlibatan aktif kelompok masyarakat ini berhasil membangun kesadaran politik kolektif, terutama di kalangan pemilih pemula dan perempuan.

Berdasarkan perspektif model sosiologis yang dikembangkan oleh

Lazarsfeld et al. (1944), perilaku pemilih dalam pemilu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh kondisi sosial yang melingkupi kehidupan mereka, seperti agama, kelas sosial, serta lingkungan komunitas. Faktor-faktor ini membentuk cara pandang pemilih terhadap kandidat, kebijakan, serta mekanisme pemilu secara keseluruhan. Dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, terdapat kemungkinan bahwa sebagian kelompok masyarakat merasa pasangan calon tunggal yang tersedia tidak sepenuhnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan mereka, sehingga mereka menggunakan kotak kosong sebagai bentuk perlawanan simbolis terhadap keterbatasan pilihan yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilih tidak selalu menggunakan hak pilihnya untuk memilih kandidat yang mereka dukung, tetapi juga bisa menggunakannya sebagai alat untuk mengungkapkan ketidakpuasan terhadap proses politik yang sedang berlangsung.

Agama seringkali menjadi variabel dominan yang mempengaruhi preferensi pemilih, terutama di daerah yang memiliki heterogenitas agama dan budaya yang tinggi. Faktor ini tidak hanya berpengaruh dalam hal identifikasi politik, tetapi juga dalam pembentukan persepsi terhadap kandidat yang bertarung dalam pemilu. Jika ada kelompok masyarakat yang merasa kurang terwakili oleh calon tunggal, baik karena perbedaan ideologi, latar belakang sosial, atau kebijakan yang diusung, maka mereka cenderung mengadopsi strategi pemilih protes, seperti tidak hadir ke TPS atau memilih kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik mereka. Dalam konteks ini, memilih kotak kosong bukan sekadar tindakan pasif, tetapi dapat dianggap sebagai sinyal politik dari masyarakat terhadap sistem pemilu yang mereka anggap kurang kompetitif atau tidak mencerminkan aspirasi politik mereka secara penuh.

Model sosiologis juga menunjukkan bahwa keterikatan sosial dalam komunitas dapat mempengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan pilihan mereka di bilik suara. Pemilih yang berada dalam lingkungan dengan kecenderungan politik yang kuat terhadap kandidat tertentu kemungkinan besar akan mengikuti pola yang sama, sedangkan mereka yang berada dalam komunitas dengan

keragaman pandangan politik lebih mungkin untuk mengembangkan sikap independen atau bahkan menolak kandidat yang tersedia. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, suara kotak kosong yang signifikan di beberapa TPS dapat mencerminkan bahwa terdapat kelompok pemilih yang secara kolektif memilih untuk menolak calon tunggal sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap sistem pencalonan yang kurang kompetitif. Model sosiologis dapat menjelaskan bagaimana latar belakang sosial dan lingkungan sekitar membentuk keputusan politik masyarakat, serta bagaimana faktor-faktor seperti agama, kelas sosial, dan keterikatan komunitas berperan dalam menentukan pilihan pemilih. Di tengah keterbatasan pilihan dalam Pilkada Sukoharjo 2024, pemilih yang merasa aspirasinya tidak terwakili menggunakan kotak kosong sebagai sarana untuk mengekspresikan sikap politik mereka, sekaligus mengirimkan pesan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan kompetisi yang lebih terbuka dan representatif.

2. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Psikologi Sosial (*Michigan Model*)

Sudut pandang model psikologi Sosial (*Michigan Model*), perilaku pemilih dalam pemilu sangat dipengaruhi oleh identifikasi emosional terhadap partai politik, kandidat, serta persepsi mereka terhadap kredibilitas dan integritas pemimpin yang bertarung dalam kontestasi politik. Pemilih tidak selalu membuat keputusan berdasarkan analisis rasional terhadap kebijakan atau rekam jejak kandidat, melainkan sering kali dipengaruhi oleh hubungan psikologis dan emosional yang telah terbentuk sebelumnya, baik terhadap calon maupun terhadap sistem politik secara keseluruhan. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, di mana hanya terdapat satu pasangan calon, faktor psikologis ini semakin menonjol dalam menentukan pola perilaku pemilih. Realitas politik dalam Pilkada Sukoharjo menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal menimbulkan dinamika emosional yang berbeda dibandingkan pemilu dengan persaingan multi-kandidat. Bagi pemilih yang sudah memiliki keterikatan emosional dengan pasangan calon Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. dan Eko Sapto Purnomo, S.E., baik karena faktor loyalitas partai, rekam jejak calon, maupun hubungan

sosial dengan kandidat, maka mereka akan tetap memberikan suara meskipun tidak ada lawan yang bertarung. Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara pasangan calon tunggal yang mencapai 319.923 suara sah, yang menunjukkan bahwa mayoritas pemilih tetap memberikan dukungan kepada kandidat yang ada.

Bagi pemilih yang tidak memiliki afiliasi emosional dengan pasangan calon atau bahkan merasa kecewa dengan kepemimpinan sebelumnya, pilihan politik mereka menjadi lebih kompleks. Dalam kondisi politik yang memberikan pilihan yang sangat terbatas, banyak pemilih yang akhirnya mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui pemilihan kotak kosong, yang dalam Pilkada Sukoharjo 2024 memperoleh 159.256 suara sah. Ini menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari pemilih yang datang ke TPS memilih untuk tidak memberikan suara kepada pasangan calon tunggal, sebuah angka yang cukup besar dan mencerminkan adanya resistensi politik di kalangan masyarakat. Fenomena ini semakin menarik jika melihat bagaimana kotak kosong unggul di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS). Di beberapa wilayah, pemilih lebih memilih untuk mendukung kotak kosong dibandingkan calon tunggal, seperti di TPS 03 Palur, Kecamatan Mojolaban, di mana kotak kosong memperoleh 225 suara, mengalahkan pasangan Etik-Sapto yang hanya mendapatkan 180 suara. Situasi serupa terjadi di TPS 04 Pucangan, Kecamatan Kartasura, di mana kotak kosong meraih 221 suara, sementara pasangan calon hanya memperoleh 153 suara. Fenomena ini tidak hanya sekadar mencerminkan ketidakpuasan individu, tetapi juga menandakan adanya sentimen kolektif dalam komunitas tertentu yang merasa bahwa pasangan calon tidak merepresentasikan kepentingan mereka.

Pemilih yang mendukung kotak kosong khususnya di Sukoharjo bisa dikategorikan sebagai pemilih yang kritis dan skeptis terhadap sistem politik yang mereka hadapi. Mereka bukan hanya sekadar pemilih pasif, tetapi individu yang memiliki kesadaran politik dan merasa bahwa pemilu dengan calon tunggal tidak memberikan pilihan yang sesungguhnya. Berdasarkan teori Michigan Model, pemilih yang memiliki pengalaman politik negatif dengan kandidat yang sedang bertarung cenderung menunjukkan sikap penolakan, yang

dalam kasus Pilkada Sukoharjo 2024, ditunjukkan dengan memilih kotak kosong. Keputusan untuk mendukung kotak kosong juga bisa dikaitkan dengan faktor persepsi terhadap integritas calon dan kepuasan terhadap kepemimpinan sebelumnya. Jika pemilih menilai bahwa pasangan calon memiliki rekam jejak yang baik dan dapat dipercaya, mereka akan tetap memilihnya meskipun tanpa pesaing. Sebaliknya, bagi pemilih yang merasa kecewa dengan kepemimpinan sebelumnya atau tidak percaya bahwa pasangan calon tunggal dapat membawa perubahan yang signifikan, memilih kotak kosong menjadi cara untuk mengekspresikan aspirasi mereka. Ini dapat terlihat dari tingginya jumlah suara kotak kosong di beberapa TPS, yang menandakan bahwa ada kelompok pemilih yang secara aktif ingin menyampaikan pesan ketidakpuasan mereka terhadap sistem pemilihan yang hanya menyediakan satu kandidat.

Selain itu, menurunnya tingkat partisipasi pemilih dari 78,8% pada Pilkada 2020 menjadi 74,3% dalam Pilkada 2024 juga mencerminkan bahwa faktor psikologis memainkan peran dalam keputusan pemilih untuk tidak datang ke TPS. Dalam banyak studi perilaku pemilih, partisipasi politik sering kali berkaitan dengan motivasi emosional dan psikologis, di mana pemilih akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika mereka merasa bahwa suara mereka benar-benar berdampak. Dalam situasi di mana hasil pemilu dianggap sudah dapat diprediksi, seperti dalam pemilu dengan calon tunggal, pemilih yang tidak memiliki keterikatan dengan kandidat yang ada lebih cenderung untuk bersikap apatis dan memilih untuk tidak datang ke TPS. Bagi pemilih yang tetap datang ke TPS tetapi memilih kotak kosong, tindakan mereka dapat dikategorikan sebagai bentuk protes politik yang lebih aktif dibandingkan dengan pemilih yang golput. Pilihan ini menunjukkan bahwa mereka tetap ingin menggunakan hak suara mereka, tetapi tidak mendukung calon yang tersedia. Dalam sistem demokrasi, pola ini sering kali terjadi dalam pemilu dengan calon tunggal atau dalam kondisi di mana pemilih merasa bahwa kandidat yang tersedia tidak menawarkan alternatif yang mereka anggap layak.

Menariknya, dalam beberapa wilayah seperti Kartasura dan Grogol, suara kotak kosong cukup dominan dibandingkan dengan

wilayah lain. Ini menunjukkan bahwa preferensi pemilih terhadap kotak kosong bukan hanya sekadar keputusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan. Dalam teori psikologi politik, keputusan individu sering kali dipengaruhi oleh diskursus politik di komunitas mereka. Jika dalam suatu lingkungan terdapat kecenderungan kuat untuk mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes, maka individu dalam komunitas tersebut lebih mungkin untuk mengikuti pola yang sama.

Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, situasi ini terlihat di TPS-TPS di mana kotak kosong menang atas pasangan calon, seperti di TPS 05 Makamhaji, TPS 01 Mulur, dan TPS 24 Cemani. Keputusan kolektif ini bisa disebabkan oleh faktor diskusi politik di tingkat lokal, di mana kelompok masyarakat tertentu merasa bahwa mereka perlu mengirimkan pesan politik dengan cara yang lebih nyata. Dengan demikian, dari perspektif Model Psikologi Sosial (Michigan Model), perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 menunjukkan pentingnya faktor emosional dan psikologis dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Pemilih yang memiliki keterikatan dengan pasangan calon cenderung tetap memberikan suara mereka, sementara mereka yang merasa tidak memiliki hubungan emosional atau bahkan kecewa dengan calon tunggal lebih cenderung memilih kotak kosong atau tidak berpartisipasi sama sekali.

Fenomena ini menegaskan bahwa pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor rasional, tetapi juga oleh pengalaman politik, identifikasi emosional dengan partai atau kandidat, serta lingkungan sosial mereka. Pilkada Sukoharjo 2024 memberikan bukti nyata bahwa dalam demokrasi, pemilih tidak hanya menggunakan suara mereka untuk memilih kandidat yang mereka dukung, tetapi juga sebagai alat untuk mengekspresikan ketidakpuasan dan aspirasi politik mereka terhadap sistem pemilihan yang mereka hadapi.

3. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*)

Pendekatan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang dikembangkan oleh Anthony Downs (1957) juga dapat digunakan

untuk menganalisis perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024, terutama dalam konteks meningkatnya jumlah pemilih yang mendukung kotak kosong serta turunnya tingkat partisipasi dibandingkan Pilkada 2020. Teori ini berpendapat bahwa pemilih bertindak sebagai individu rasional yang mempertimbangkan manfaat dan biaya sebelum membuat keputusan politik. Dalam sistem demokrasi, pemilih akan memilih kandidat yang menurut mereka dapat memberikan keuntungan maksimal bagi kehidupan mereka, baik dalam hal kebijakan publik, kesejahteraan ekonomi, maupun stabilitas sosial. Namun, jika pemilih merasa bahwa tidak ada manfaat nyata yang bisa diperoleh dari memilih calon yang tersedia, mereka bisa saja memilih untuk tidak berpartisipasi atau mendukung kotak kosong sebagai bentuk protes terhadap pilihan yang terbatas.

Pilkada Sukoharjo 2024, memiliki beberapa indikasi kuat bahwa sebagian pemilih memutuskan untuk tidak mendukung pasangan calon tunggal karena mempertimbangkan bahwa hasil pemilu tidak akan berdampak besar pada kehidupan mereka. Fakta bahwa kotak kosong meraih 159.256 suara menunjukkan bahwa terdapat kelompok pemilih yang secara sadar memilih untuk tidak memberikan mandat kepada pasangan Hj. Etik Suryani, S.E., M.M. dan Eko Sapto Purnomo, S.E., meskipun mereka tetap datang ke TPS. Dari sudut pandang rasionalitas politik, keputusan ini dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap kebijakan yang telah dijalankan sebelumnya, ketidakpercayaan terhadap visi dan misi calon tunggal, atau skeptisisme terhadap kemungkinan perubahan yang signifikan setelah pemilu.

Pemilih yang memilih kotak kosong kemungkinan besar menganalisis bahwa tidak ada perbedaan substansial yang bisa mereka harapkan dari pemimpin berikutnya dibandingkan kepemimpinan sebelumnya. Dalam teori Downs, pemilih akan tetap memilih jika mereka melihat ada keuntungan rasional yang bisa diperoleh dari pilihan tersebut. Namun, dalam Pilkada Sukoharjo 2024, sebagian besar pemilih yang memilih kotak kosong mungkin merasa bahwa tidak ada insentif yang cukup kuat untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon, sehingga mereka lebih memilih untuk menolak calon yang ada dengan cara memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan politik.

Selain itu, faktor rekam jejak calon dan kebijakan yang ditawarkan juga berperan dalam keputusan pemilih. Bagi pemilih yang merasa bahwa kepemimpinan sebelumnya telah berjalan dengan baik dan masih menguntungkan mereka, dukungan terhadap pasangan calon tunggal menjadi pilihan rasional. Ini dapat menjelaskan mengapa pasangan Etik-Sapto tetap memperoleh 319.923 suara, yang menunjukkan bahwa masih ada mayoritas pemilih yang melihat adanya manfaat dari mempertahankan kepemimpinan yang ada. Namun, bagi pemilih yang tidak melihat kebijakan signifikan yang dapat membawa perubahan atau bahkan kecewa dengan kebijakan sebelumnya, memilih kotak kosong menjadi opsi yang lebih masuk akal dibandingkan sekadar mengikuti arus politik tanpa pertimbangan.

Lebih jauh, dalam teori Downs, pemilih juga mempertimbangkan biaya dalam berpartisipasi dalam pemilu, baik dalam bentuk waktu, energi, maupun dampak ekonomi yang mungkin mereka alami akibat hasil pemilu. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, fakta bahwa tingkat partisipasi menurun dari 78,8% pada Pilkada 2020 menjadi 74,3% menunjukkan bahwa ada sejumlah pemilih yang merasa tidak ada urgensi yang cukup besar untuk ikut serta dalam pemilu ini. Mereka yang bersikap apatis mungkin berpikir bahwa dengan atau tanpa keterlibatan mereka, hasil pemilu tetap akan sama, yaitu kemenangan bagi pasangan calon tunggal. Dalam kondisi seperti ini, pemilih yang rasional akan memilih untuk tidak datang ke TPS sama sekali karena merasa bahwa suara mereka tidak akan memberikan dampak signifikan dalam mengubah arah kepemimpinan daerah.

Dinamika perilaku pemilih ini semakin menarik jika dikaitkan dengan data perolehan suara di beberapa TPS yang menunjukkan keunggulan kotak kosong atas pasangan calon. Di TPS 03 Palur, Kecamatan Mojolaban, kotak kosong memperoleh 225 suara, mengalahkan pasangan Etik-Sapto yang hanya mendapatkan 180 suara. Begitu pula di TPS 04 Pucangan, Kecamatan Kartasura, kotak kosong menang dengan 221 suara dibandingkan pasangan calon yang hanya memperoleh 153 suara. Fenomena ini semakin menegaskan bahwa sebagian pemilih secara sadar menggunakan

strategi rasional dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka, bukan sekadar karena ketidaktahuan atau faktor emosional semata.

Pemilih yang mendukung kotak kosong mungkin juga mempertimbangkan potensi dampak dari kemenangan calon tunggal terhadap kehidupan ekonomi dan sosial mereka. Jika mereka merasa bahwa kebijakan yang ditawarkan oleh pasangan calon tidak akan menguntungkan mereka atau bahkan berpotensi merugikan dalam jangka panjang, maka memilih kotak kosong menjadi bentuk protes politik yang lebih efektif dibandingkan golput. Hal ini sejalan dengan pemikiran Downs bahwa pemilih hanya akan berpartisipasi jika mereka melihat adanya keuntungan nyata yang bisa diperoleh dari pemilu.

Di sisi lain, fenomena meningkatnya dukungan terhadap kotak kosong juga dapat dijelaskan dari perspektif strategi politik oposisi yang tidak bisa ikut dalam kontestasi. Dalam beberapa kasus, pihak yang merasa dirugikan oleh sistem pemilu bisa saja menggalang kekuatan dengan mengajak pemilih untuk memilih kotak kosong sebagai bentuk delegitimasi terhadap hasil pemilu. Jika suara kotak kosong dalam pemilu dengan calon tunggal melebihi suara pasangan calon, maka pemilu bisa dianggap gagal, dan pemilihan ulang harus dilakukan. Meskipun dalam Pilkada Sukoharjo 2024 kotak kosong tidak menang secara keseluruhan, suara yang signifikan tetap memberikan sinyal politik bahwa terdapat kelompok pemilih yang menolak keberlanjutan kepemimpinan dari pasangan calon yang ada.

Berdasarkan analisis tersebut, Teori Pilihan Rasional menjelaskan bahwa pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 membuat keputusan politik berdasarkan pertimbangan untung-rugi yang bersifat logis. Pemilih yang melihat keuntungan dari memilih pasangan calon akan tetap memberikan suara mereka, sedangkan pemilih yang merasa tidak ada manfaat dari memilih calon tunggal cenderung memilih kotak kosong atau tidak berpartisipasi sama sekali. Fenomena tingginya suara kotak kosong di beberapa TPS serta turunnya tingkat partisipasi dibandingkan Pilkada 2020 menunjukkan bahwa banyak pemilih yang merasa tidak memiliki alternatif politik yang memadai, sehingga mereka memilih jalur rasional untuk menyampaikan

aspirasi mereka, baik melalui kotak kosong maupun dengan tidak menggunakan hak pilihnya.

4. Perilaku Pemilih dalam Perspektif Model Civic Voluntarism Model (CVM)

Berdasarkan perspektif Civic Voluntarism Model atau CVM yang dikembangkan oleh Verba et al. (1995), partisipasi politik seseorang sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya (waktu, uang, dan keterampilan), psikologi politik (kepercayaan diri dalam memengaruhi politik), serta motivasi untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks Pilkada Sukoharjo 2024, menurunnya angka partisipasi dari 78,8% pada Pilkada 2020 menjadi 74,3% dapat dikaitkan dengan rendahnya kompetisi politik akibat keberadaan calon tunggal serta minimnya insentif yang dirasakan oleh pemilih untuk ikut serta dalam pemilu.

Pemilu yang kompetitif memiliki pemilih yang cenderung lebih terdorong untuk datang ke TPS karena mereka merasa bahwa suara mereka memiliki pengaruh nyata dalam menentukan hasil pemilu. Namun, dalam kondisi seperti Pilkada Sukoharjo 2024, di mana hanya terdapat satu pasangan calon yang maju, banyak pemilih yang mungkin merasa bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi sejak awal, sehingga partisipasi dalam pemilu tidak lagi menjadi sesuatu yang dirasa penting atau berdampak langsung bagi mereka. Dalam Civic Voluntarism Model, kondisi ini mencerminkan rendahnya motivasi politik masyarakat, di mana mereka yang merasa bahwa suara mereka tidak akan mengubah hasil pemilu lebih cenderung untuk tidak menggunakan hak pilihnya.

Faktor lain yang dapat menjelaskan menurunnya partisipasi pemilih adalah kurangnya pendidikan politik yang efektif, yang membuat sebagian pemilih merasa bahwa pemilu bukanlah sesuatu yang perlu mereka prioritaskan. Jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang kuat mengenai pentingnya pemilu sebagai mekanisme demokrasi, mereka cenderung untuk bersikap apatis dan tidak melihat nilai dari berpartisipasi dalam proses politik. Dalam banyak kasus, pemilih dengan tingkat literasi politik yang rendah sering kali merasa

bahwa suara mereka tidak memiliki dampak signifikan, sehingga mereka memilih untuk tidak ikut serta dalam pemilu, baik karena ketidakpedulian maupun karena kurangnya akses terhadap informasi politik yang memadai.

Selain itu, faktor sumber daya yang tersedia bagi pemilih, sebagaimana dikemukakan dalam Civic Voluntarism Model, juga dapat menjadi penyebab turunnya tingkat partisipasi dalam Pilkada Sukoharjo 2024. Sumber daya ini mencakup waktu, uang, dan keterampilan, yang semuanya berperan dalam menentukan apakah seseorang akan berpartisipasi dalam pemilu atau tidak. Bagi pemilih yang memiliki keterbatasan waktu, misalnya karena kesibukan pekerjaan atau tanggung jawab lain, pergi ke TPS untuk memberikan suara mungkin dianggap sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Begitu pula bagi mereka yang menghadapi kendala ekonomi, seperti pekerja harian yang harus memilih antara menggunakan waktunya untuk bekerja atau datang ke TPS, pemilu bisa saja dianggap sebagai aktivitas yang memiliki "biaya" lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh.

Jika dibandingkan dengan Pilkada 2020, di mana persaingan lebih kompetitif dan masyarakat lebih terdorong untuk ikut serta dalam pemilu, situasi dalam Pilkada 2024 jauh berbeda. Dalam beberapa TPS, terlihat bahwa kotak kosong berhasil memperoleh suara yang signifikan, menunjukkan bahwa motivasi pemilih dalam mendukung pasangan calon tunggal cukup rendah. Di TPS 03 Palur, Kecamatan Mojolaban, kotak kosong bahkan mengungguli pasangan Etik-Sapto dengan perolehan 225 suara dibandingkan 180 suara. Fenomena serupa terjadi di TPS 04 Pucangan, Kecamatan Kartasura, di mana kotak kosong meraih 221 suara, sementara pasangan calon hanya memperoleh 153 suara.

Kondisi ini menunjukkan bahwa motivasi untuk memilih sangat erat kaitannya dengan tingkat kompetisi dalam pemilu. Jika pemilih merasa bahwa tidak ada pilihan yang benar-benar merepresentasikan kepentingan mereka, atau jika mereka tidak memiliki kepercayaan diri bahwa suara mereka dapat mengubah hasil pemilu, maka mereka cenderung untuk tidak menggunakan hak pilih mereka atau memilih

kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik. Dalam Civic Voluntarism Model, fenomena ini disebut sebagai rendahnya tingkat psikologi politik, di mana pemilih yang merasa bahwa partisipasi mereka tidak berkontribusi secara signifikan terhadap sistem politik akan lebih mudah untuk bersikap apatis.

Faktor lain yang berkontribusi terhadap penurunan partisipasi adalah minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik sebelum pemilu berlangsung. Dalam Civic Voluntarism Model, individu yang lebih sering terlibat dalam aktivitas politik, seperti diskusi politik, keanggotaan dalam organisasi masyarakat sipil, atau partisipasi dalam kegiatan sosialisasi pemilu, cenderung memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk ikut serta dalam pemilu. Namun, dalam Pilkada Sukoharjo 2024, tampaknya partisipasi politik sebelum pemilu relatif rendah, yang menyebabkan kurangnya dorongan bagi masyarakat untuk datang ke TPS. Jika pemilih hanya dihadapkan dengan informasi politik yang minim dan tidak terlibat dalam diskusi publik mengenai pemilu, maka kemungkinan besar mereka tidak akan merasa termotivasi untuk berpartisipasi.

Selain itu, keberadaan politik uang atau insentif elektoral juga berperan dalam memotivasi atau menghambat partisipasi pemilih. Dalam beberapa kasus, pemilih yang sebelumnya terdorong untuk memilih karena adanya insentif tertentu, seperti program bantuan sosial yang dikaitkan dengan pemilu, mungkin menjadi kurang tertarik untuk berpartisipasi jika mereka merasa bahwa tidak ada manfaat langsung yang mereka peroleh dari pemilu. Jika dalam pemilu sebelumnya terdapat faktor kompetisi yang tinggi yang membuat calon-calon berlomba-lomba untuk menarik dukungan pemilih, maka dalam Pilkada 2024 dengan calon tunggal, insentif ini menjadi lebih lemah, sehingga pemilih yang hanya terdorong oleh faktor manfaat langsung menjadi lebih enggan untuk berpartisipasi.

Dalam beberapa TPS, seperti TPS 05 Makamhaji dan TPS 10 Kartasura, di mana kotak kosong meraih suara lebih banyak dibandingkan pasangan calon, dapat diasumsikan bahwa banyak pemilih yang merasa bahwa tidak ada kandidat yang benar-benar mewakili kepentingan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk

memberikan suara kepada kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap proses politik yang mereka anggap kurang kompetitif. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan politik pemilih terhadap efektivitas pemilu dalam menciptakan perubahan juga berperan dalam menentukan apakah mereka akan memilih atau tidak.

Menurunnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 dapat dijelaskan melalui pendekatan Civic Voluntarism Model, di mana rendahnya motivasi politik, minimnya kepercayaan diri dalam memengaruhi sistem politik, serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas politik sebelum pemilu menjadi faktor utama dalam membentuk perilaku pemilih. Dalam sistem demokrasi yang sehat, partisipasi politik yang tinggi menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat yang aktif dalam menentukan arah kebijakan daerah. Namun, dalam kasus Pilkada Sukoharjo, turunnya angka partisipasi serta meningkatnya suara kotak kosong memberikan indikasi bahwa pemilih merasa kurang termotivasi untuk berpartisipasi akibat minimnya kompetisi dan kurangnya keyakinan bahwa pemilu akan membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan mereka.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu mendatang, penting bagi penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat pendidikan politik, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi sebelum pemilu, serta menciptakan sistem politik yang lebih kompetitif dan memberikan insentif nyata bagi pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. Dari data yang ada, pola perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 juga menunjukkan bahwa preferensi terhadap kotak kosong lebih dominan di beberapa wilayah dibandingkan lainnya. Di daerah dengan karakter pemilih yang lebih kritis dan memiliki akses informasi yang luas, seperti Kartasura dan Grogol, kotak kosong lebih banyak dipilih. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih dengan tingkat pendidikan politik yang lebih tinggi cenderung lebih aktif dalam mengekspresikan sikap politiknya, termasuk melalui penolakan terhadap calon tunggal. Sementara di daerah dengan keterikatan sosial yang lebih kuat, pasangan calon mendapatkan suara yang lebih dominan.

Fenomena ini juga mengindikasikan bahwa dukungan terhadap petahana atau calon yang berafiliasi dengan kekuasaan sebelumnya tidak selalu menjamin kemenangan mutlak, terutama jika pemilih merasa tidak memiliki pilihan lain yang lebih kompetitif. Hal ini sejalan dengan teori Anthony Downs tentang rasionalitas terbatas, di mana pemilih membuat keputusan berdasarkan informasi yang terbatas dan tidak selalu optimal. Jika pemilih merasa bahwa pemilu tidak menawarkan alternatif nyata, mereka bisa memilih untuk tidak berpartisipasi atau memilih kotak kosong sebagai bentuk perlawanan pasif terhadap sistem politik yang ada.

Dalam perspektif partisipasi politik, menurunnya angka partisipasi dibandingkan Pilkada 2020 juga mengindikasikan bahwa pemilih kurang terdorong untuk datang ke TPS karena tidak adanya kompetisi yang signifikan. Pemilu yang kompetitif cenderung menarik lebih banyak partisipasi, karena pemilih merasa bahwa suara mereka memiliki dampak nyata terhadap hasil pemilu. Sebaliknya, ketika hanya ada satu calon, beberapa pemilih menganggap bahwa hasil pemilu sudah dapat diprediksi, sehingga motivasi mereka untuk berpartisipasi berkurang.

Berdasarkan analisis tersebut, perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana kehadiran calon tunggal memengaruhi tingkat partisipasi dan meningkatnya jumlah pemilih yang memilih kotak kosong. Data yang menunjukkan bahwa kotak kosong menang di beberapa TPS menandakan adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap proses politik yang kurang kompetitif. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemilih di Sukoharjo memiliki tingkat kesadaran politik yang cukup tinggi, di mana mereka tidak hanya pasif menerima kandidat yang tersedia, tetapi juga menggunakan kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik mereka.

Menurunnya tingkat partisipasi juga memberikan sinyal bahwa perlu adanya strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan keterlibatan politik masyarakat, baik melalui pendidikan politik, peningkatan transparansi dalam proses pencalonan, maupun upaya untuk mendorong munculnya lebih banyak kandidat dalam

pemilu mendatang. Jika fenomena seperti ini terus berulang, maka legitimasi pemilu sebagai mekanisme utama dalam demokrasi bisa terancam, karena pemilih tidak lagi merasa bahwa suara mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil politik yang terjadi. Dengan demikian, Pilkada Sukoharjo 2024 memberikan pelajaran penting tentang bagaimana pemilih merespons pemilu dengan calon tunggal, serta bagaimana faktor sosial, psikologis, dan rasionalitas politik memengaruhi keputusan pemilih dalam menggunakan hak suaranya.●

BAB IV

MODEL PENDIDIKAN PEMILIH BERKELANJUTAN

A. Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih yang Berkelanjutan

Pendidikan pemilih adalah aspek yang sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada. Mengingat bahwa situasi politik sering berubah, pemahaman yang mendalam mengenai proses pemilihan bukan hanya membantu masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif, tetapi juga memfasilitasi mereka dalam menjadi pemilih yang lebih rasional dan kritis. Pendidikan pemilih mencakup pengertian terhadap prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti penghargaan terhadap hasil pemilu, kesadaran akan hak suara sebagai hak fundamental, serta penolakan terhadap praktik politik uang. Oleh karena itu, pendidikan pemilih tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendidik individu, tetapi juga sebagai langkah jangka panjang dalam membentuk budaya demokrasi yang lebih matang. Agar setiap individu dapat menggunakan hak pilihnya dengan bijak, mereka memerlukan pemahaman yang baik mengenai sistem Pemilu dan dampak dari setiap pilihan yang dibuat. Pendidikan pemilih yang efektif pada akhirnya berperan dalam menentukan kualitas demokrasi, karena pemilih yang teredukasi dengan baik akan lebih mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam proses demokrasi.

Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat vital dalam pendidikan pemilih ini. Sebagai lembaga yang independen, KPU bertanggung jawab tidak hanya dalam mengelola Pemilu yang adil dan bebas, tetapi juga dalam memastikan adanya pendidikan pemilih yang transparan dan inklusif. Tanggung jawab ini lebih dari sekadar memberikan informasi teknis mengenai Pemilu, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. KPU harus menanamkan pemahaman bahwa setiap suara

memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan kebijakan yang berdampak luas. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi sangat bergantung pada transparansi dan integritas KPU dalam menjalankan tugasnya.

Pendidikan pemilih yang komprehensif oleh KPU harus mencakup pemahaman teknis tentang Pemilu, kesadaran politik, serta pengetahuan tentang isu-isu sosial yang berkembang. Berbagai program pendidikan, seperti sosialisasi, seminar, dan pelatihan, harus dirancang untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat, terutama pemilih pemula dan kelompok rentan. Pemilih pemula, seperti pelajar SMA dan mahasiswa, sering kali memiliki pengetahuan politik yang terbatas. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inovatif, seperti simulasi pemungutan suara dan diskusi interaktif, dapat menjadi metode yang efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka. Sementara itu, pemilih rentan, seperti mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki akses terbatas terhadap informasi, memerlukan pendekatan berbasis komunitas. Kegiatan ini harus dilaksanakan tidak hanya saat menjelang Pemilu, tetapi harus berlanjut sepanjang waktu agar pemilih selalu memiliki akses kepada informasi yang akurat dan terkini.

Penting bagi KPU untuk merancang strategi yang memastikan pendidikan pemilih menjadi bagian dari budaya lokal. Sebagai contoh, pembentukan kelompok diskusi rutin di tingkat desa atau komunitas dapat menjadi langkah yang efektif untuk mempertahankan keberlanjutan program ini. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi berbasis smartphone untuk memberikan informasi mengenai Pemilu, lokasi TPS, dan cara memilih, juga dapat menjangkau pemilih di daerah terpencil yang sulit diakses secara langsung. Pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU sebaiknya bersifat holistik, dengan menggabungkan pengetahuan teknis dan pengembangan kesadaran kritis tentang proses politik. Melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih partisipatif dan terinformasi dengan baik, yang pada gilirannya memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara bijaksana demi kemajuan bersama.

B. Polemik Tentang Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih:

Apakah Terbatas pada Aspek Teknis?

Pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU sering kali dipersepsikan hanya mencakup aspek teknis, seperti prosedur pemungutan suara, cara pengisian surat suara, serta informasi mengenai tempat pemungutan suara. Namun, pandangan ini kerap mengabaikan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan dinamika sosial politik yang semakin kompleks, pendidikan pemilih seharusnya melibatkan pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi kehidupan warga negara dalam kerangka demokrasi. Oleh karena itu, peran KPU tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi teknis, tetapi juga harus mencakup upaya untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terkait isu-isu sosial, politik, dan ekonomi yang relevan.

Meningkatnya kompleksitas Pemilu, seperti penggunaan teknologi digital dan sistem pemungutan suara baru, pemilih harus dipersiapkan untuk memahami lebih dari sekadar aspek teknis dalam proses Pemilu. Isu-isu seperti keamanan data pemilih, transparansi sistem pemilu berbasis digital, dan potensi penyalahgunaan teknologi dalam proses pemilihan semakin menjadi perhatian utama dalam pendidikan pemilih. KPU harus memberikan pengetahuan yang lebih luas mengenai cara-cara baru dalam melaksanakan Pemilu, yang tidak hanya mencakup pemahaman prosedural, tetapi juga cara untuk memastikan integritas dan keabsahan suara dalam sistem digital. Oleh karena itu, pendidikan pemilih yang responsif terhadap perkembangan teknologi perlu diberikan agar masyarakat mampu memahami dan menghadapi tantangan yang muncul dalam Pemilu modern.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang efektif seharusnya mencakup pemahaman lebih luas, seperti hak dan kewajiban pemilih, pentingnya partisipasi dalam demokrasi, serta isu-isu politik dan sosial yang lebih dalam. Sebagai contoh, banyak pemilih yang tidak menyadari dampak kebijakan publik yang mereka pilih terhadap kehidupan sehari-hari mereka, seperti bagaimana kebijakan ekonomi atau kebijakan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan

mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pendidikan pemilih perlu melampaui aspek teknis dan mendorong pemilih untuk berpikir kritis tentang implikasi kebijakan yang mereka pilih. Pemahaman semacam ini akan menghasilkan pemilih yang tidak hanya tahu cara memilih, tetapi juga tahu mengapa mereka memilih kandidat atau kebijakan tertentu.

Beberapa program pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU di berbagai daerah telah berhasil menjelaskan prosedur pemungutan suara sekaligus membahas isu-isu politik yang lebih luas, seperti dampak kebijakan publik terhadap masyarakat. Program-program ini juga mencakup diskusi mengenai dampak ekonomi dari kebijakan yang diambil oleh calon pemimpin, sehingga pemilih dapat melihat hubungan langsung antara pilihan mereka dengan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri serta masyarakat secara keseluruhan. Dengan pendekatan ini, KPU dapat membangun kesadaran akan pengaruh keputusan politik terhadap kehidupan sehari-hari pemilih, serta menekankan pentingnya partisipasi mereka dalam memperkuat suara dalam setiap kebijakan yang diterapkan. Program-program ini dirancang untuk memberikan pemilih pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks di mana mereka memberikan suara, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan tidak hanya kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan bersama yang lebih luas (Faqih et al., 2022; Fernandes et al., 2023; Rosyida et al., 2024).

Di luar negeri, banyak negara dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi, seperti Finlandia atau Belanda, telah berhasil mengimplementasikan pendidikan pemilih yang komprehensif. Pendidikan semacam ini tidak hanya menasar pengetahuan teknis tentang proses politik, tetapi juga mengajak masyarakat untuk berpikir kritis tentang isu-isu yang mereka hadapi dalam kehidupan sosial mereka. Di Kanada, misalnya, Elections Canada telah menjalankan program pendidikan pemilih yang melibatkan diskusi mengenai nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan tanggung jawab sosial (EC, 2021). Program ini bertujuan untuk membantu pemilih memahami bagaimana keputusan politik dapat mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, dan mengajak mereka untuk mengembangkan pemahaman kritis tentang kebijakan yang mereka pilih, terutama dalam konteks hak individu, kesetaraan, dan

keadilan sosial. Program ini mengajak pemilih untuk memahami lebih jauh daripada sekadar mengisi kotak suara, tetapi untuk merenungkan konteks sosial yang lebih luas dari setiap pilihan yang mereka buat (Ansori, 2019).

Di Australia, Australian Electoral Commission (AEC, 2021) juga telah mengembangkan program pendidikan pemilih yang lebih holistik, yang tidak hanya menjelaskan prosedur Pemilu, tetapi juga mengajak pemilih untuk berpikir kritis tentang isu-isu politik yang relevan, seperti perubahan iklim, kesehatan, dan pendidikan. Program ini mendorong pemilih untuk mengevaluasi kebijakan yang diajukan oleh calon-calon berdasarkan keberlanjutan lingkungan, kebijakan kesehatan universal, atau pemerataan pendidikan. Dengan pendekatan ini, pendidikan pemilih tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga memfasilitasi dialog antara pemilih dan isu-isu yang mereka hadapi langsung di masyarakat (Nur Wardhani, 2018).

Meskipun KPU memiliki tanggung jawab teknis yang signifikan dalam pelaksanaan Pemilu, pendidikan pemilih yang lebih holistik dan berfokus pada pengembangan kesadaran politik sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih secara keseluruhan. Pendidikan semacam ini tidak hanya memberikan dampak positif pada kualitas demokrasi, tetapi juga membentuk pemilih yang lebih rasional dan bertanggung jawab dalam memilih, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi hasil Pemilu. Hal ini akan memastikan bahwa pemilih tidak hanya tahu cara menggunakan hak suara mereka, tetapi juga memahami tanggung jawab dan implikasi dari pilihan yang mereka buat.

C. Peran KPU dalam Meningkatkan Kesadaran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat besar dalam menyelenggarakan pendidikan pemilih yang tidak hanya berfokus pada peningkatan pemahaman teknis, tetapi juga pada peningkatan kesadaran dan daya kritis masyarakat. Sebagai lembaga yang berperan vital dalam penyelenggaraan Pemilu, KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya mengetahui prosedur pemungutan suara, tetapi juga memahami peran mereka dalam proses

demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU harus mampu menggabungkan dua dimensi penting: penyampaian informasi teknis dan pengembangan kesadaran sosial-politik masyarakat. Dengan menggunakan berbagai platform dan metode inovatif, KPU dapat lebih mendekati diri kepada masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam Pemilu dan Pilkada.

Pendidikan pemilih yang efektif akan menghasilkan pemilih yang tidak hanya mengetahui hak-hak mereka, tetapi juga memahami bagaimana keputusan politik yang mereka buat dapat mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka. Program-program ini dapat dilaksanakan melalui lokakarya interaktif, penggunaan media sosial yang efektif, dan pengembangan konten multimedia yang menarik untuk menarik perhatian masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pemilih yang efektif dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, terutama di kalangan pemilih pemula (Faqih et al., 2022; Malik et al., 2022; Nur Wardhani, 2018).

Di era digital saat ini, KPU dapat memanfaatkan media sosial sebagai alat penyebaran informasi yang cepat dan efisien. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan konsep-konsep dasar demokrasi dan partisipasi politik, terutama kepada generasi muda. Dengan menyajikan informasi dalam format menarik seperti video pendek, infografis, atau podcast, KPU dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya berpartisipasi dalam Pemilu. Media sosial memungkinkan KPU untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan cara komunikasi yang lebih efektif (Kasim et al., 2023; Wulandari & Fernandes, 2021).

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga pendidikan juga merupakan cara penting untuk memperkuat upaya pendidikan pemilih. Kerjasama ini dapat memperluas perspektif mengenai kebutuhan pendidikan pemilih yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Misalnya, KPU dapat bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok kepemudaan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengedukasi komunitas yang sulit dijangkau secara langsung. Selain itu, integrasi pendidikan pemilih

dalam kurikulum pendidikan formal dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan etika politik di kalangan generasi muda, sehingga mereka lebih siap untuk berpartisipasi dalam demokrasi sejak dini. Pendidikan pemilih yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah dapat membantu menciptakan budaya politik yang sehat dan mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses demokrasi, baik di dalam maupun di luar sekolah.

Di negara-negara seperti Swedia dan Norwegia, pendidikan pemilih yang melibatkan diskusi terbuka dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih (Hariyanti & Hambali, 2021; Ismail et al., 2024). Di negara-negara dengan tingkat partisipasi politik yang tinggi, seperti Jerman dan Kanada, program pendidikan pemilih juga telah terbukti menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran sosial dan politik masyarakat. Di negara-negara ini, pendidikan pemilih tidak hanya memberikan informasi teknis mengenai cara memilih, tetapi juga mengajarkan pemilih untuk berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan politik yang mereka hadapi. Program-program pendidikan pemilih yang melibatkan masyarakat dalam diskusi tentang isu-isu politik dan sosial juga membantu meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda.

Contohnya, di Jerman, inisiatif yang melibatkan masyarakat dalam pendidikan pemilih tidak hanya membahas prosedur pemilu, tetapi juga mencakup simulasi proses pemungutan suara dan membandingkan pilihan politik yang ada. Hal ini membantu pemilih untuk memahami konteks politik saat ini dan membuat keputusan berdasarkan pemahaman yang lebih luas mengenai pilihan-pilihan yang tersedia. Dengan memanfaatkan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif, KPU dapat secara efektif meningkatkan pemahaman politik dan partisipasi masyarakat. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan demokrasi yang lebih sehat dan berdaya. Menyadari bahwa pendidikan pemilih adalah investasi jangka panjang untuk masa depan demokrasi, KPU diharapkan untuk terus mengeksplorasi dan mengimplementasikan strategi pendidikan yang lebih komprehensif. Melalui strategi yang lebih terintegrasi, KPU dapat memastikan bahwa pendidikan pemilih tidak hanya berlaku selama Pemilu atau Pilkada, tetapi juga menjadi bagian

dari pembelajaran sepanjang hayat yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

D. Tantangan dan Solusi dalam Penyuluhan Pemilih

Meskipun KPU memiliki peran penting dalam pendidikan pemilih, tantangan yang dihadapi dalam proses tersebut sangat besar. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya penyebaran disinformasi melalui media sosial dan platform online. Disinformasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti hoaks, gambar atau video yang dimanipulasi, serta pesan yang dipolitisasi dengan tujuan mempengaruhi opini publik secara menyesatkan. Karena media sosial memungkinkan informasi tersebar dengan cepat tanpa adanya verifikasi yang memadai, masyarakat menjadi rentan terhadap informasi yang tidak akurat. Untuk mengatasi hal ini, KPU perlu merancang strategi yang lebih efektif dalam menangkal informasi yang salah dan menyebarkan fakta yang valid kepada masyarakat, agar pemilih tidak mudah terjebak dalam pusaran disinformasi.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan literasi media di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pemilih muda. KPU dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, media, dan organisasi masyarakat, untuk menyusun materi literasi media yang tidak hanya mengajarkan cara mengecek kebenaran informasi, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak dari disinformasi terhadap stabilitas demokrasi dan kualitas Pemilu. Dengan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang valid, diharapkan pemilih dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi yang akurat. Selain itu, KPU dapat mengintegrasikan literasi media ke dalam program pendidikan pemilih yang lebih luas, dengan melibatkan pemilih dalam kegiatan praktis untuk memverifikasi informasi melalui berbagai sumber yang dapat dipercaya. Seminar literasi media dan pelatihan di sekolah-sekolah untuk mengenali hoaks dapat sangat bermanfaat. Kegiatan ini dapat dilakukan di sekolah-sekolah, komunitas lokal, atau melalui platform online untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Tantangan lainnya adalah terbatasnya akses informasi pemilih,

terutama di daerah-daerah terpencil, di mana akses terhadap informasi yang berkualitas masih sangat rendah. Infrastruktur komunikasi yang terbatas, seperti jaringan internet yang buruk, rendahnya tingkat literasi digital, dan kurangnya sarana komunikasi yang efektif, menjadi kendala utama dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah tersebut. Keterbatasan akses ini mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat mengenai proses Pemilu dan calon-calon yang bertanding. Untuk mengatasi hal ini, KPU dapat bekerja sama dengan organisasi lokal untuk menyebarkan informasi secara langsung atau menggunakan metode alternatif seperti radio komunitas atau pertemuan tatap muka yang memungkinkan terjadinya dialog lebih terbuka.

Kerjasama dengan organisasi masyarakat lokal, seperti LSM, kelompok pemuda, dan tokoh masyarakat setempat, dapat menjadi cara yang efektif untuk menjangkau pemilih di daerah terpencil. Organisasi-organisasi ini dapat membantu dalam mendistribusikan materi pendidikan pemilih dan memfasilitasi diskusi yang lebih interaktif mengenai isu-isu politik yang relevan. Selain itu, media alternatif seperti radio komunitas, yang masih banyak digunakan di beberapa daerah, dapat dimaksimalkan untuk menyampaikan informasi Pemilu secara lebih inklusif. Program edukasi melalui siaran radio dapat disiarkan secara rutin dengan melibatkan pemangku kepentingan lokal untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme Pemilu dan hak serta kewajiban pemilih.

E. Evaluasi dan Dampak Pendidikan Pemilih

Salah satu elemen penting dalam mengelola program pendidikan pemilih adalah kemampuan untuk mengukur dampak yang dihasilkan oleh setiap inisiatif yang dilakukan oleh KPU. Pengukuran dampak ini tidak hanya bertujuan untuk mengevaluasi apakah tujuan program tercapai, tetapi juga untuk memahami sejauh mana perubahan yang terjadi pada pemilih, baik dalam hal pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka terkait dengan proses demokrasi. Untuk itu, pengukuran yang akurat dan sistematis sangat penting, agar KPU dapat merumuskan kebijakan yang lebih terarah dan merancang program yang lebih efektif di masa depan.

Untuk mengukur dampak pendidikan pemilih, KPU dapat menggunakan berbagai metode yang terstruktur. Salah satunya adalah melalui survei pasca-kegiatan yang mengumpulkan umpan balik langsung dari peserta. Survei ini harus mencakup pertanyaan-pertanyaan yang mendalam, seperti tingkat pemahaman peserta tentang hak pilih mereka, sejauh mana mereka menyadari isu-isu politik yang relevan, serta perasaan mereka mengenai kesiapan berpartisipasi dalam Pemilu setelah mengikuti program pendidikan pemilih tersebut. Selain itu, survei yang dilakukan sebelum dan setelah program juga akan memberikan gambaran yang jelas mengenai perubahan pengetahuan dan sikap peserta secara langsung. Perbandingan data ini memungkinkan KPU untuk menilai apakah pendidikan pemilih tersebut berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka.

Selanjutnya, untuk memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai dampak jangka panjang dari pendidikan pemilih, KPU dapat melakukan penelitian longitudinal. Pendekatan ini memungkinkan untuk memantau perubahan perilaku pemilih dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi korelasi antara partisipasi dalam program pendidikan pemilih dan tingkat partisipasi mereka dalam Pemilu. Sebagai contoh, penelitian longitudinal dapat mengungkap apakah pemilih yang menerima pendidikan pemilih lebih cenderung berpartisipasi dalam Pemilu berikutnya atau apakah mereka lebih aktif dalam mencari informasi terkait calon atau isu-isu politik setelah mengikuti program tersebut. Data ini sangat berharga dalam menilai keberlanjutan dampak pendidikan pemilih dan bagaimana informasi yang diterima selama program memengaruhi pola perilaku pemilih di masa depan.

Selain pengukuran berbasis survei, analisis data partisipasi pemilih dalam Pemilu setelah program pendidikan juga dapat memberikan informasi yang sangat berarti. KPU dapat memanfaatkan data partisipasi pemilih yang sudah tersedia, lalu membandingkannya dengan data sebelumnya untuk melihat apakah ada peningkatan signifikan dalam jumlah pemilih yang terlibat setelah mengikuti pendidikan pemilih. Hal ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program dalam mendorong partisipasi aktif di kalangan pemilih. Melakukan analisis mendalam terhadap data yang terkumpul memungkinkan KPU untuk

memperoleh wawasan yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi pemilih. Ini meliputi motivasi pemilih untuk berpartisipasi, tingkat kepercayaan terhadap sistem Pemilu, serta hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam menggunakan hak pilih mereka. Dengan data tersebut, KPU dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih dalam program pendidikan pemilih. Misalnya, apakah ada kelompok tertentu yang masih kurang mendapat informasi atau merasa tidak terwakili dalam sistem Pemilu, dan bagaimana program dapat disesuaikan untuk menjangkau kelompok-kelompok tersebut.

Informasi yang diperoleh dari analisis ini sangat penting untuk menyempurnakan desain program pendidikan pemilih di masa mendatang. KPU dapat menggunakan hasil pengukuran dampak untuk memperbaiki konten program, memilih metode penyampaian informasi yang lebih efektif, dan memastikan bahwa program tersebut lebih inklusif, menjangkau lebih banyak pemilih, dan memenuhi kebutuhan beragam segmen masyarakat. Pendekatan berbasis data ini akan memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan pendidikan pemilih yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial-politik yang terus berkembang.

F. Peran KPU dalam Pendidikan Pemilih Berkelanjutan untuk Masa Depan Demokrasi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tantangan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Proses adaptasi ini mencakup tidak hanya kemajuan dalam teknologi dan dinamika sosial, tetapi juga memperhatikan keberagaman budaya dan sosial yang ada di Indonesia. KPU harus mempertimbangkan berbagai karakteristik masyarakat yang sangat beragam, mulai dari faktor geografis, tingkat pendidikan, hingga akses terhadap teknologi dan informasi. Oleh karena itu, KPU perlu mengembangkan model pendidikan pemilih yang responsif terhadap perubahan sosial dan teknologi, sekaligus memperhatikan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, baik yang perkotaan maupun pedesaan. Hal ini mengharuskan KPU untuk menggunakan pendekatan yang tidak hanya berbasis digital, tetapi juga metode langsung yang sesuai dengan

kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat.

KPU perlu memperhatikan beberapa rekomendasi strategis yang dapat diterapkan dalam pengembangan berkelanjutan. Pertama, evaluasi periodik terhadap program pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan sangat penting untuk menilai keberhasilan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Evaluasi ini seharusnya tidak hanya mengukur pemahaman peserta terhadap prosedur Pemilu, tetapi juga harus mengevaluasi perubahan sikap politik mereka, tingkat keterlibatan mereka dalam proses demokrasi, serta motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu. Survei dan wawancara dengan peserta bisa memberikan data yang mendalam, memberikan wawasan langsung mengenai dampak yang dirasakan. Berdasarkan umpan balik dari peserta, KPU dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program tetap relevan dan menarik bagi masyarakat.

Kedua, pemanfaatan teknologi terbaru dalam penyampaian informasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan efektivitas program pendidikan pemilih. Salah satu solusi potensial adalah pengembangan aplikasi mobile yang menyediakan informasi interaktif seputar Pemilu, seperti jadwal pemilu, lokasi tempat pemungutan suara (TPS), dan cara memberikan suara. Fitur dalam aplikasi ini dapat mencakup pengingat waktu pemilu, panduan untuk mengenali kandidat yang sesuai dengan preferensi politik pemilih, serta forum diskusi yang memungkinkan pemilih untuk berdialog dengan ahli atau sesama pemilih mengenai isu-isu politik terkini. Dengan fitur-fitur ini, aplikasi dapat membantu memperkuat keterlibatan masyarakat, mendorong mereka untuk lebih sadar dan aktif dalam proses pemilu.

Selanjutnya, KPU perlu memperkuat kerja sama dengan media massa dan platform digital untuk menyebarkan informasi yang lebih luas dan akurat mengenai Pemilu. Bermitra dengan saluran media, baik yang tradisional seperti televisi dan radio, maupun yang lebih baru seperti podcast di Spotify atau YouTube, akan memungkinkan KPU menjangkau berbagai demografi dan kelompok usia yang berbeda. Dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan jurnalis dan media, KPU dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik lebih tepat sasaran dan mengurangi risiko disinformasi. Salah satu contoh

strategisnya adalah mengadakan pelatihan atau workshop bagi media untuk memperkuat kapasitas mereka dalam menyampaikan informasi yang akurat terkait Pemilu.

Penting juga bagi KPU untuk melibatkan pemilih aktif, terutama yang berasal dari kelompok pemilih muda, dalam program pendidikan pemilih. Pemilih muda, yang sering kali lebih akrab dengan teknologi dan media sosial, dapat memainkan peran kunci dalam menjembatani komunikasi antara KPU dan generasi muda yang lebih luas. Mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar dan mendorong teman-teman sebaya mereka untuk berpartisipasi lebih aktif dalam Pemilu. Dengan melibatkan mereka, KPU tidak hanya menciptakan rasa kepemilikan terhadap proses Pemilu, tetapi juga memperkuat jaringan informasi yang menjangkau komunitas mereka.

Selain itu, integrasi pendidikan pemilih dalam kurikulum pendidikan formal sangat penting untuk menanamkan kesadaran politik sejak dini. Program pendidikan pemilih yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah akan memperkenalkan siswa pada konsep-konsep dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan yang lebih mendalam. Melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti debat, diskusi kelompok, dan lokakarya tentang demokrasi dan Pemilu, siswa dapat mengembangkan sikap kritis dan pemahaman yang lebih baik mengenai peran mereka dalam sistem politik. Dengan demikian, mereka akan lebih termotivasi untuk terlibat dalam demokrasi baik di dalam maupun di luar sekolah.

KPU juga dapat memperkaya materi pendidikan pemilih dengan menghubungkannya dengan isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Membahas isu-isu kontemporer, seperti perubahan iklim, pendidikan, atau ekonomi, akan membuat pendidikan pemilih lebih relevan dan hidup. Dengan menyesuaikan materi pendidikan dengan situasi politik dan sosial yang ada, seperti dampak kebijakan terkait isu-isu tersebut terhadap kehidupan sehari-hari, peserta program akan lebih merasa terhubung dan terdorong untuk berpartisipasi. Pemilih yang merasa relevansi isu-isu tersebut akan lebih termotivasi untuk memberikan suara mereka dalam Pemilu. Dengan mengimplementasikan strategi-strategi ini, KPU tidak hanya dapat memperkuat infrastruktur pendidikan pemilih yang sudah

ada, tetapi juga memperluas jangkauan dan dampak dari program-program yang dijalankan. Pendidikan pemilih yang berkelanjutan dan inovatif akan membantu menciptakan budaya politik yang lebih matang, sadar, dan partisipatif di seluruh lapisan masyarakat. Langkah ini tidak hanya penting dalam konteks Pemilu dan Pilkada, tetapi juga untuk memperkuat daya kritis masyarakat terhadap isu-isu politik dan sosial lainnya. Melalui pendekatan yang lebih kritis dan komprehensif, KPU dapat memberdayakan masyarakat untuk menjadi pemilih yang terinformasi, serta warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Dengan cara ini, pendidikan pemilih bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU, tetapi juga bagian dari tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang solid antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan akan memperkuat ketahanan terhadap informasi yang salah dan menciptakan kebudayaan demokrasi yang lebih inklusif dan informatif. ●

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi pemilih dalam Pilkada Sukoharjo mencerminkan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Fluktuasi tingkat partisipasi dipengaruhi oleh kompetisi politik, efektivitas kampanye, media sosial, literasi politik, serta kondisi sosial-ekonomi dan budaya. Keputusan pemilih tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh strategi sosialisasi dan kebijakan pemilu. Data menunjukkan bahwa partisipasi dalam pemilihan nasional lebih tinggi dibandingkan Pilkada lokal, seperti Pilpres 2019 yang mencapai 82,6%, sedangkan Pilkada 2015 hanya 66,2%. Hal ini disebabkan oleh eksposur informasi yang lebih luas, kompetisi politik yang ketat, serta keterlibatan media nasional. Sebaliknya, Pilkada seringkali menghadapi tantangan seperti calon tunggal, yang membuat pemilih kurang tertarik karena minimnya pilihan.

Salah satu hambatan utama dalam meningkatkan partisipasi pemilih adalah politik uang dan disinformasi, yang dapat melemahkan kesadaran politik dan menurunkan kepercayaan terhadap pilkada. Literasi politik dan digital menjadi kunci agar pemilih dapat memahami pentingnya pilkada serta membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat. Strategi peningkatan partisipasi harus difokuskan pada pendidikan pemilih yang berkelanjutan, kampanye digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Pendidikan politik harus melibatkan sekolah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan media lokal. Kampanye berbasis digital perlu diperkuat karena pemilih muda lebih aktif di dunia maya, dengan strategi seperti pemanfaatan media sosial, influencer politik, dan gamifikasi politik untuk meningkatkan keterlibatan mereka.

Transparansi penyelenggaraan pemilu menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. KPU Sukoharjo harus memastikan

pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan, sehingga tidak ada kecurigaan terhadap hasilnya. Kerja sama dengan media massa dan organisasi masyarakat sipil juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan publik terhadap jalannya Pilkada. Faktor sosial-ekonomi turut memengaruhi partisipasi pemilih. Kelompok ekonomi bawah cenderung memiliki partisipasi lebih rendah karena keterbatasan waktu dan akses informasi. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada kebijakan seperti pengadaan TPS yang lebih mudah dijangkau, kampanye door-to-door, serta pemanfaatan teknologi untuk penyebaran informasi bagi pemilih di daerah terpencil.

Selain ekonomi, budaya politik masyarakat juga memengaruhi partisipasi. Masih banyak yang menganggap pemilu hanya sebagai hak, bukan kewajiban, sehingga tidak merasa perlu memilih, terutama jika tidak ada kandidat yang mewakili aspirasi mereka. Oleh karena itu, kampanye KPU harus menekankan bahwa pemilu adalah tanggung jawab warga negara dalam membangun pemerintahan yang lebih baik. Pemilih muda juga menjadi aspek krusial dalam Pilkada mendatang. Partisipasi mereka cenderung lebih rendah dibandingkan pemilih yang lebih tua, akibat minimnya edukasi politik dan kurangnya relevansi isu politik dalam kehidupan mereka. Simulasi pemilu bagi siswa SMA dan mahasiswa, debat politik berbasis isu, serta kampanye digital dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan generasi muda dapat menjadi strategi untuk meningkatkan keterlibatan mereka.

Aspek teknis penyelenggaraan pemilu juga harus diperbaiki. Masalah seperti logistik pemilu, kesiapan petugas KPPS, serta pencatatan hasil pemilu yang bermasalah masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sistem administrasi dan pelatihan bagi penyelenggara pemilu, agar pemilu berjalan lancar dan minim hambatan. Adapun berdasarkan analisis teoretis perilaku pemilih yang ada, Pilkada Sukoharjo 2024 mencerminkan kompleksitas dinamika politik yang terjadi dalam pemilu dengan calon tunggal. Penurunan partisipasi dari 78,8% pada Pilkada 2020 menjadi 74,3% serta tingginya jumlah suara untuk kotak kosong menunjukkan bahwa pemilih tidak sekadar menggunakan hak pilih mereka, tetapi juga mengekspresikan sikap politik tertentu terhadap sistem yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran kotak kosong bukan hanya sekadar alternatif teknis dalam pemilu, tetapi juga

menjadi simbol ketidakpuasan politik masyarakat terhadap minimnya kompetisi dalam kontestasi politik lokal.

Dari perspektif Model Sosiologis, keterikatan sosial dalam komunitas berperan penting dalam menentukan pola pemilihan. Beberapa kelompok masyarakat kemungkinan merasa bahwa pasangan calon yang tersedia tidak cukup merepresentasikan aspirasi mereka, sehingga mereka memilih kotak kosong sebagai bentuk protes. Tren ini terlihat di berbagai TPS di Kecamatan Mojolaban, Kartasura, dan Polokarto, di mana kotak kosong unggul atas pasangan calon tunggal. Faktor sosial, agama, dan budaya politik lokal dapat menjelaskan mengapa dalam beberapa daerah, pemilih lebih memilih menolak kandidat dibandingkan memberikan dukungan penuh. Dari sudut pandang Model Psikologi Sosial (Michigan Model), keputusan pemilih sering kali dipengaruhi oleh hubungan emosional dengan kandidat atau partai politik. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, pemilih yang memiliki keterikatan dengan pasangan calon cenderung tetap memberikan suara, sementara mereka yang tidak memiliki hubungan emosional atau bahkan kecewa dengan kepemimpinan sebelumnya lebih cenderung memilih kotak kosong. Keunggulan kotak kosong di beberapa TPS menunjukkan bahwa ada sentimen kolektif dalam komunitas tertentu yang merasa bahwa pasangan calon tidak cukup merepresentasikan kepentingan mereka. Hal ini semakin diperkuat dengan menurunnya partisipasi, yang mengindikasikan bahwa banyak pemilih merasa tidak ada urgensi untuk ikut serta dalam pemilu karena hasilnya dianggap sudah dapat diprediksi.

Dari pendekatan Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*), pemilih bertindak berdasarkan kalkulasi manfaat dan biaya. Dalam Pilkada Sukoharjo 2024, sebagian pemilih kemungkinan menilai bahwa memilih calon tunggal tidak akan memberikan dampak signifikan bagi kehidupan mereka, sehingga mereka memilih untuk tidak datang ke TPS atau memilih kotak kosong sebagai bentuk ekspresi politik. Minimnya insentif politik dalam pemilu tanpa kompetisi menjadi salah satu alasan utama mengapa pemilih enggan berpartisipasi, terutama bagi mereka yang melihat bahwa kebijakan calon tunggal tidak memberikan perubahan signifikan atau bahkan dianggap tidak menguntungkan.

Dari perspektif Civic Voluntarism Model (CVM), faktor-faktor seperti

motivasi politik, kepercayaan diri dalam memengaruhi hasil pemilu, serta keterlibatan dalam aktivitas politik sebelumnya menjadi faktor yang menentukan tingkat partisipasi pemilih. Minimnya sosialisasi politik dan rendahnya insentif untuk memilih dalam pemilu dengan calon tunggal membuat sebagian pemilih merasa bahwa suara mereka tidak akan berpengaruh. Dalam konteks Pilkada Sukoharjo, ini menjadi salah satu faktor utama di balik menurunnya angka partisipasi dibandingkan dengan Pilkada 2020. Dari berbagai perspektif yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa perilaku pemilih dalam Pilkada Sukoharjo 2024 mencerminkan kombinasi antara faktor sosiologis, psikologis, rasionalitas politik, serta tingkat keterlibatan politik yang lebih luas. Keputusan pemilih untuk memilih kotak kosong bukan sekadar bentuk ketidakpedulian, tetapi juga sinyal politik yang menunjukkan keinginan masyarakat untuk pemilu yang lebih kompetitif dan representatif. Tingginya suara kotak kosong di beberapa TPS menjadi indikasi bahwa ada ketidakpuasan kolektif yang cukup signifikan terhadap proses politik yang berlangsung.

Selain itu, menurunnya partisipasi dalam Pilkada Sukoharjo dibandingkan Pilkada 2020 juga menjadi tantangan bagi demokrasi lokal. Jika tren ini terus berlanjut, maka pemilu dapat kehilangan fungsinya sebagai mekanisme utama dalam melegitimasi kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, perlu adanya strategi peningkatan partisipasi politik, seperti memperkuat pendidikan politik, meningkatkan transparansi dalam proses pencalonan, serta mendorong kompetisi politik yang lebih sehat di masa mendatang. Kesimpulannya, Pilkada Sukoharjo 2024 memberikan gambaran nyata bagaimana pemilih merespons pemilu dengan calon tunggal serta bagaimana faktor sosial, psikologis, dan rasionalitas politik memengaruhi keputusan pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Untuk memastikan demokrasi tetap sehat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam membangun sistem pemilu yang lebih kompetitif, transparan, dan inklusif.

B. Rekomendasi untuk Peningkatan Partisipasi Pemilih

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, terdapat beberapa

rekomendasi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo, yaitu:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

- a. Mengintegrasikan pendidikan pemilih ke dalam kurikulum sekolah dan universitas.
- b. Menyelenggarakan forum diskusi dan debat publik tentang Pilkada untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
- c. Menggunakan media lokal dan komunitas untuk menyebarkan informasi pemilu.
- d. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan organisasi keagamaan dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat.
- r. Mendorong keterlibatan aktif komunitas lokal dalam pemantauan pemilu guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital dan Media Sosial

- a. Memanfaatkan teknologi berbasis data untuk menganalisis perilaku pemilih dan merancang strategi kampanye yang lebih efektif serta tepat sasaran.
- b. Mengembangkan konten edukasi pemilu berbasis digital, seperti infografis, video pendek, dan webinar interaktif.
- c. Melibatkan influencer dan tokoh masyarakat dalam kampanye pemilu.
- d. Menggunakan aplikasi dan platform digital untuk menyebarkan informasi pemilu secara real-time.
- e. Meningkatkan keamanan dan akurasi data pemilih melalui sistem digital yang terintegrasi untuk mencegah kesalahan administrasi dan memastikan setiap warga terdaftar dengan benar.

3. Peningkatan Transparansi dan Kepercayaan terhadap Penyelenggara Pemilu

- a. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemantauan pemilu.

- b. Menyediakan akses informasi yang lebih luas tentang tahapan dan prosedur pemilu.
- c. Membangun mekanisme pengaduan yang efektif untuk mencegah kecurangan pemilu.
- d. Memperkuat independensi penyelenggara pemilu dengan memastikan bahwa setiap tahapan pemilu bebas dari intervensi politik dan kepentingan tertentu.
- e. Meningkatkan akuntabilitas hasil pemilu melalui publikasi data secara terbuka dan penyelenggaraan audit independen terhadap proses pemungutan serta penghitungan suara.

4. Mempermudah Akses bagi Pemilih di Daerah Terpencil dan Kelompok Rentan

- a. Mengoptimalkan penggunaan TPS keliling untuk menjangkau daerah yang sulit diakses.
 - b. Memberikan edukasi khusus bagi pemilih disabilitas dan kelompok masyarakat adat agar lebih mudah menggunakan hak pilihnya.
 - c. Meningkatkan fasilitas transportasi dan logistik untuk memastikan kelancaran pemilu di daerah terpencil.
 - d. Meningkatkan jumlah dan distribusi petugas pemilu di daerah terpencil agar proses pemungutan suara dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh pemilih.
 - e. Mengembangkan layanan pendampingan bagi pemilih lansia dan penyandang disabilitas guna memastikan mereka dapat memberikan suara secara mandiri dan nyaman.
5. Meningkatkan Kompetisi Politik yang Sehat dan Berkualitas
- a. Mendorong partai politik untuk lebih aktif dalam kaderisasi calon kepala daerah yang kompeten.
 - b. Memberikan insentif bagi calon independen agar kompetisi politik lebih terbuka dan adil.
 - c. Menghindari politik uang dengan meningkatkan pengawasan terhadap kampanye pemilu.
 - d. Memperketat regulasi dan seleksi kandidat agar hanya calon dengan rekam jejak yang baik dan kapasitas kepemimpinan yang

mumpuni dapat maju dalam kontestasi politik.

- e. Meningkatkan edukasi politik bagi masyarakat untuk mendorong pemilih memilih berdasarkan visi, misi, dan program kerja kandidat, bukan karena faktor pragmatis seperti politik uang atau popularitas semata.

Tingkat partisipasi pemilih di Pilkada Sukoharjo masih memiliki tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait politik uang, fenomena calon tunggal, disinformasi, serta keterlibatan pemilih muda dan pemilih pemula. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti pendidikan pemilih yang berkelanjutan, kampanye digital yang inovatif, transparansi pemilu, serta sinergi dengan berbagai stakeholder, tingkat partisipasi pemilih dapat terus meningkat. Keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi pemilih tidak hanya akan memperkuat legitimasi hasil pemilu, tetapi juga akan menciptakan pemerintahan daerah yang lebih demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.●

PUSTAKA

- Aspinall, E., & Sukmajati, A. (2016). *Patronage and democracy in Southeast Asia*. Cambridge University Press.
- Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. (28 Oktober 2021). Bawaslu Kembali Gencarkan Pengembangan Desa Pengawasan. Diakses pada 2 Maret 2025 <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kembali-gencarkan-pengembangan-desa-pengawasan>
- Birch, S. (2011). *Electoral systems and electoral participation: A review of the empirical literature*. *Electoral Studies*, 30(2), 155-164. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2010.11.008>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (1982). *Qualitative research for education: An introduction to theory and methods*. Allyn and Bacon.
- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., & Stokes, D. E. (1960). *The American voter*. John Wiley & Sons, Inc.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and its critics*. New Haven, CT: Yale University Press
- Dahl, R. A. (2008). *On democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Damsar. (2010). *Sosiologi politik: Kajian teori dan fenomena politik dalam masyarakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- DetikJateng.com. (27 November 2024). Pilkada Sukoharjo: Kotak Kosong Menang di Sejumlah TPS. Diakses pada 2 Maret 2025 <https://www.detik.com/jateng/pilkada/d-7659960/pilkada-sukoharjo-kotak-kosong-menang-di-sejumlah-tps>
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *The quality of democracy: An overview*. *Journal of Democracy*, 16(1), 20-31.
- Downs, A. (1957). *An economic theory of democracy*. Harper and Row.
- Eldersveld, S. J. (1964). *Political parties: A behavioral analysis*. Chicago University Press.
- Endriasari, P. P., & Santoso, R. B. (2022). Strategi KPU dalam Meningkatkan

- Partisipasi Pemilih saat Pandemi Covid-19 dalam Pilkada Sukoharjo 2020. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 6(2). <https://jurnal.um-tapsel.ac.id>
- Gerber, A. S., Green, D. P., & Shachar, R. (2003). *Voting may be habit-forming: Evidence from a randomized experiment. American Political Science Review*, 97(3), 429–441. <https://doi.org/10.1017/S0003055403000737>
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Huntington, S. P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi politik di negara berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta
- KPU Kabupaten Sukoharjo. (2015). *Data Pilkada Sukoharjo 2015*. Sumber: Formulir DB1 KPU Sukoharjo 2015. <https://id.wikipedia.org>
- KPU Kabupaten Sukoharjo. (24 Agustus 2022). *Pendidikan Politik Untuk Mendorong Pemilu Yang Berkualitas*. Diakses pada 2 Maret 2025 <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id/blog/read/pendidikan-politik-untuk-mendorong-pemilu-yang-berkualitas>
- KPU Kabupaten Sukoharjo. (4 Desember 2024). *KPU Kabupaten Sukoharjo Tetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada 2024, Partisipasi Pemilih Mengalami Penurunan*. Diakses pada 2 Maret 2025 <https://kab-sukoharjo.kpu.go.id/blog/read/kpu-kabupaten-sukoharjo-tetapkan-hasil-rekapitulasi-penghitungan-suara-pilkada-2024-partisipasi-pemilih-mengalami-penurunan>
- Komisi II DPR RI. (2019). *Membangun Demokrasi dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu*. *Info Singkat*, Vol. XI, No. 9/1/P3DI, Mei 2019. <https://berkas.dpr.go.id>
- Lazarsfeld, P. F., Berelson, B., & Gaudet, H. (1944). *The people's choice: How the voter makes up his mind in a presidential campaign*. New York, NY: Columbia University Press
- Liddle, R. W., & Mujani, S. (2007). *The Indonesian electorate in 2004: A deeper analysis. Asian Journal of Comparative Politics*, 3(2), 44–57.
- Lijphart, A. (1966). *The political parties and political systems in the Mediterranean: A comparative analysis*. The University of California Press.
- Milbrath, L. W., & Goel, M. L. (1977). *Political participation: How and why do people get involved in politics?*. Rand McNally.
- Milner, H. (2002). *The internet, political participation, and political efficacy*.

- International Journal of Public Opinion Research*, 14(4), 328-348.
- Norris, P. (2003). *Young people and political participation: The case of New Zealand*. *Political Science Review*, 17(3), 43-56.
- Nursal, A. (2004). *Political marketing: Strategi memenangkan pemilu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Portal Pemerintah Kab. Sukoharjo. (2025). *Partisipasi Capai 74,3%, Pilkada Serentak 2024 Sukoharjo Tetap Berjalan Kondusif*. Diposting 24 Januari 2025. <https://portal.sukoharjokab.go.id>
- Przeworski, A., Alvarez, M. E., Cheibub, J. A., & Limongi, F. (1999). *Democracy and development: Political institutions and well-being in the world, 1950-1990*. Cambridge University Press.
- Putnam, R. D. (1995). *Bowling alone: America's declining social capital*. *Journal of Democracy*, 6(1), 65-78.
- Rush, M., & Althoff, P. (2000). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sukoharjokab.go.id. (16 November 2023). *Pemerintah Sukoharjo Menggelar Koordinasi Pendidikan Politik Menjelang Pemilu 2024*. Diakses pada 2 Maret 2025 <https://portal.sukoharjokab.go.id/2023/11/16/pemerintah-sukoharjo-menggelar-rapat-koordinasi-pendidikan-politik-menjelang-pemilu-2024/>
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1978). *Participation in America: Political democracy and social equality*. Harper & Row.
- Wolfinger, R. E. (1980). *Who participates in elections? American Political Science Review*, 74(1), 29-44.

TIM PENULIS

1. **Farah Rahmadhani S.IP**, merupakan Mahasiswa Magister (S2) Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) angkatan 2024 yang berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Ia merupakan lulusan S1 Ilmu Politik Universitas Airlangga yang aktif dalam dunia kepenulisan dengan menjadi asisten peneliti dan mengikuti ajang kompetisi riset secara nasional. Saat ini, ia sedang menempuh konsentrasi Tata Kelola Sumber Daya alam untuk lebih memahami dinamika politik dalam lanskap nasional dan global melalui mata kuliah seperti Political Ecology dan Multilevel Governance and the Politics of Climate Change. Farah dapat dihubungi melalui email farahrahmadhani@mail.ugm.ac.id
2. **David Kamaluddin El Barito**, Penulis merupakan seorang kader sekaligus pengurus DPD Partai Golkar (Golongan Karya) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai kader muda, ia menjalani aktivitas politiknya sebagai Anggota Tim Pemenangan Pileg (DPRD Kabupaten Tulungagung, DPRD Dapil Jatim VII, dan DPR RI Dapil Jatim VI); TKD (Tim Kampanye Daerah) Prabowo-Gibran Kabupaten Tulungagung; dan Pilkada Kota Yogyakarta 2024. Saat ini, ia sedang menempuh Program Magister (S2) Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada (UGM). untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi David melalui davidkamaluddinelbarito@mail.ugm.ac.id
3. **Harkosta Ario Sopaba**, Penulis Merupakan Kepala Sub Bidang Mutasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dan sedang menempuh studi pada Program Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada, angkatan 2024. Selain menulis, Costa Juga Sering aktif dalam Organisasi Pemuda di Papua terutama yang berorientasi pada pendidikan dan kemajuan anak-anak Papua, membangun Sumber Daya Manusia yang Lebih maju dan berkembang di Papua merupakan tujuan utama dari penulis. Tulisan ini diharapkan dapat membantu

PARTISIPASI PILKADA SUKOHARJO

para pembaca agar mendapatkan pengetahuan yang baru tentang mekanisme dan pelaksanaan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui email : harkostaariosopaba@mail.ugm.ac.id. ●